



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

**LAPORAN
PENYELENGGARAAN PE-
MERINTAHAN DAERAH
(LPPD)**

**TAHUN
2023**



**BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
TAHUN 2024**

**PEMERINTAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**



**LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN**

**TAHUN
2023**



**IHSAN BASIR, SH., LL. M
PJ. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN**

**BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
TAHUN 2024**



IHSAN BASIR, SH.,LL. M
Pj. BUPATI BANGGAI
KEPULAUAN

IKON
KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN

KOTA IKAN (INDAH, KREATIF,
AMAN DAN NYAMAN)

BAHASA
YANG DIKUASAI

- Indonesia & Inggris

KONTAK

+82210666605
Gelatik Residence
Blok A. No 09

lhsanbasir@Gmail.com

DATA PRIBADI

- Tempat, Tanggal Lahir : Makassar, 09 Nov 1970
- Alamat : Gelatik Residence
Blok A. No. 09
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Agama : Islam
- Status : Menikah

RIWAYAT PENDIDIKAN

- SDN 15 Palu. (1983-1986)
- SMP 1 Palu. (1986-1989)
- SMA Muhammadiyah II
Yogyakarta. (1989-1994)
- Universitas Brawijaya, Malang. (1994-2002)
- The University Of Melbourne, (2002)
Australia

RIWAYAT JABATAN

- kepala Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya II Bappedda
Sulteng.
- Kepala Bidang Pembinaan Pelatihan dan Penempatan
Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- Pj. Kepala Bidang Pembinaan Pelatihan dan Penempatan
Tenaga Kerja Pj pada Dinas Nakertrans.
- Kepala Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal dan Daerah
Tertentu pada Dinas Transmigrasi Prov. Sulteng.
- Kepala Biro Hukum Setda Prov. Sulteng.
- Pj. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Prov.
Sulteng.
- Kepala BPPID Prov. Sulteng
- Staf Ahli Gubernur Bidang SDM, Pengembangan Kawasan
dan Wilayah

PENGALAMAN ORGANISASI

- Wakil Presiden untuk Asosiasi Mahasiswa (1992-1993)
Hukum Pidana Universitas Brawijaya,
Malang, Indonesia.
- Ketua Departemen Sumberdaya Manusia (1998-2000)
pada Organisasi PCMI (Purna Caraka
Indonesia/Organisasi Pertukaran Pemuda
Indonesia-Luar Negeri) Sulteng.
- Anggota Tetap Australia Indonesia Legal (2002-2004)
Development Foundation Incorporated
(AILDF), Melbourne, Australia.
- Ketua PCMI (Purna Caraka Muda (2016-2022)
Indonesia/Organisasi Pertukaran Pemuda
Indonesia Luar Negeri) Sulawesi Tengah.



IHSAN BASIR, SH., LL. M
PJ. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan untuk tahun anggaran 2023 sesuai pedoman reviu atas laporan penyelenggaraan pemerintah daerah. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan penyelenggaraan pemerintah daerah menjadi tanggungjawab manajemen.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan penyelenggaraan pemerintah daerah telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal – hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan didalam laporan penyelenggaraan Pemerintah daerah ini.

Salakan, 18 Maret 2024



KISMANTO, SH.,MH

Pembina Tingkat I

NIP.19790321 200502 1 004



Kata Pengantar

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-NYA, sehingga tugas penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 dapat kami selesaikan.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan salah satu kewajiban Pemerintah Daerah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dalam mempertanggungjawabkan tugasnya, Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Presiden melalui Gubernur sebagaimana telah diamanatkan dalam pasal 70 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang disampaikan kepada Pemerintah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Besar harapan, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 ini, dapat mewujudkan Pemerintahan yang *Good Governance* dan menjadi daya pacu dalam rangka terwujudnya masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan yang sejahtera. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan dan meridhoi semua usaha kita. Amin.

Salakan, Maret 2024

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN



IHSAN BASIR, SH., LL.M



Daftar Isi

KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	ix
BAB. I PENDAHULUAN	I/1
1.1. Latar Belakang	I/1
1.1.1 Penjelasan Umum	I/2
a. Undang-undang pembentukan daerah	I/2
b. Data geografis wilayah	I/3
c. Jumlah penduduk	I/11
d. Jumlah kecamatan dan desa/kelurahan	I/16
e. Jumlah perangkat daerah, unit kerja perangkat daerah dan pegawai pemerintah	I/17
f. Realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah	I/18
1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah	I/20
a. Permasalahan strategis pemerintah daerah	I/21
b. Visi dan misi kepala daerah	I/21
c. Program pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan jangka menengah; dan	I/22
d. Kegiatan pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan tahunan	I/25
1.1.3 Penerapan standard pelayanan minimal	I/74
BAB. II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	II/1
2.1. Capaian Kinerja Makro	II/1
2.2. Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan	II/2
2.2.1 Indikator kinerja kunci keluaran	
2.2.2 Indikator kinerja kunci hasil	
2.2.3 Indikator kinerja kunci untuk fungsi penunjang urusan Pemerintahan	
2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	II/3
a. Target kinerja dalam perjanjian kinerja	II/3



b. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja	II/5
c. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya	II/8
d. Pengukuran capaian dibandingkan dengan target dalam pembangunan jangka pendek	II/10
e. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai	II/13
f. Analisis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja	II/14
BAB. III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN	III/1
1. Dasar Hukum	III/1
2. Gambaran umum pelaksanaan tugas pembantuan	III/1
3. Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan	III/2
3.1 Tugas pembantuan pusat yang dilaksanakan oleh daerah kabupaten	III/2
3.1.1 Target Kinerja	III/2
3.1.2 Realisasi	III/2
3.2 Tugas pembantuan provinsi yang dilaksanakan oleh daerah kabupaten	III/2
3.2.1 Target Kinerja	III/2
3.2.2 Realisasi	III/2
3.3 Permasalahan dan kendala	III/2
3.4 Saran dan tindak lanjut	III/2
BAB. IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	IV/1
4.1 Urusan Pendidikan	IV/1
4.1.1 Jenis pelayanan dasar	IV/1
4.1.2 Target pencapaian	IV/1
4.1.3 Realisasi	IV/2
4.1.4 Alokasi Anggaran	IV/4
4.1.5 Dukungan Personil	IV/4
4.1.6 Permasalahan dan Solusi	IV/5
4.1.7 Program Kegiatan	IV/5
4.2 Urusan Kesehatan	IV/6
4.2.1 Jenis pelayanan dasar	IV/6



4.2.2 Target pencapaian	IV/7
4.2.3 Realisasi	IV/8
4.2.4 Alokasi Anggaran	IV/14
4.2.5 Dukungan Personil	IV/15
4.2.6 Permasalahakan dan Solusi	IV/15
4.2.7 Program Kegiatan	IV/15
4.3 Urusan Pekerjaan Umum	IV/16
4.3.1 Jenis pelayanan dasar	IV/16
4.3.2 Target pencapaian	IV/16
4.3.3 Realisasi	IV/17
4.3.4 Alokasi Anggaran	IV/18
4.3.5 Dukungan Personil	IV/18
4.3.6 Permasalahakan dan Solusi	IV/19
4.3.7 Program Kegiatan	IV/19
4.4 Urusan Perumahan Rakyat	IV/20
4.4.1 Jenis pelayanan dasar	IV/20
4.4.2 Target pencapaian.....	IV/20
4.4.3 Realisasi	IV/21
4.4.4 Alokasi Anggaran	IV/21
4.4.5 Dukungan Personil	IV/21
4.4.6 Permasalahakan dan Solusi	IV/22
4.4.7 Program Kegiatan	IV/22
4.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	IV/23
a. Satuan Polisi Pamong Praja	IV/23
4.5.1 Jenis pelayanan dasar	IV/23
4.5.2 Target pencapaian.....	IV/23
4.5.3 Realisasi	IV/24
4.5.4 Alokasi Anggaran	IV/25
4.5.5 Dukungan Personil	IV/25
4.5.6 Permasalahakan dan Solusi	IV/26
4.5.7 Program Kegiatan	IV/27
b. Bencana	IV/27
4.5.1 Jenis pelayanan dasar	IV/27
4.5.2 Target pencapaian.....	IV/27
4.5.3 Realisasi	IV/28
4.5.4 Alokasi Anggaran	IV/29



4.5.5 Dukungan Personil	IV/29
4.5.6 Permasalahan dan Solusi	IV/30
4.5.7 Program Kegiatan	IV/30
4.6 Urusan Sosial	IV/30
4.6.1 Jenis pelayanan dasar	IV/31
4.6.2 Target pencapaian.....	IV/31
4.6.3 Realisasi	IV/32
4.6.4 Alokasi Anggaran	IV/35
4.6.5 Dukungan Personil	IV/35
4.6.6 Permasalahan dan Solusi	IV/36
4.6.7 Program Kegiatan	IV/37
BAB. V PENUTUP.....	V-1
5.1. Kesimpulan	V/1
5.2. Saran	V/1

LAMPIRAN



Daftar Tabel

Tabel	Uraian	Hal
1.1	Luas wilayah administrasi kecamatan	I/4
1.2	Kondisi topografi rata-rata per kecamatan di kab. bangkep	I/5
1.3	Klasifikasi tanah (soil taxonomy PPT, 1998) kab bangkep	I/6
1.4	Panjang wilayah sungai Kab. Bangkep	I/8
1.5	Distribusi sungai dan danau berdasarkan satuan ecorigion kab. bangkep	I/9
1.6	Pengamatan unsur iklim menurut bulan di stasiun syukuran aminudin amir luwuk, tahun 2023	I/10
1.7	Kecepatan angin dan tekanan udara di stasiun meteorologi aminudin amri luwuk	I/10
1.8	Jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk kecamatan di kab. Bangkep tahun 2023	I/11
1.9	Perbandingan jumlah penduduk kab. bangkep dengan kab/kota di prov .sulteng tahun 2018-2023	I/13
1.10	Rasio jenis kelamin penduduk per kecamatan di kab. bangkep tahun 2023	I/14
1.11	Luas wilayah dan jumlah penduduk menurut kecamatan di kab. bangkep tahun 2023	I/15
1.12	Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, Tahun 2023	I/16
1.13	Jumlah desa dan kelurahan berdasdarkan kecamatan di kab. bangkep	I/16
1.14	Unit perangkat daerah kab. bangkep tahun 2023	I/18
1.15	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kab. Bangkep Tahun 2023	I/22
1.16	Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023	I/25
2.1	Perjanjian kinerja kab.bangkep tahun 2023	II/3
2.2	Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja tahun 2023	II/5
2.3	Pengukuran capaian kinerja dibandingkan Dengan tahun sebelumnya 2022-2023	II/8
2.4	Capaian kinerja dibandingkan dengan Target RPD 2023-2026 kabupaten banggai kepulauan	II/10
4.1	Keadaan pns dan tenaga honorer tahun 2023	IV/4
4.2	Keadaan pns menurut pangkat / golongan tahun 2023	IV/4
4.3	Keadaan pns dan ptt tahun 2023	IV/18
4.4	Keadaan pns menurut pangkat / golongan tahun 2023	IV/19



4.5	Keadaan PNS dan PTT Tahun 2023	IV/21
4.6	Keadaan pns menurut pangkat/golongan tahun 2023	IV/22
4.7	Keadaan pns dan ptt tahun 2023	IV/25
4.8	Keadaan PNS menurut Pangkat / Golongan tahun 2023	IV/26
4.9	Keadaan pns dan ptt tahun 2023	IV/29
4.10	Keadaan pns menurut pangkat / golongan tahun 2023	IV/30
4.11	Keadaan pns dan ptt tahun 2023	IV/35
4.12	Keadaan pegawai berdasarkan esselonering tahun 2023	IV/36



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi yang luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu, melalui otonomi yang luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sejalan dengan penyelenggaraan otonomi daerah, pelaksanaan pembangunan daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan telah merumuskan rencana pembangunan daerah, baik rencana pembangunan jangka panjang dan jangka pendek dengan memperhatikan masukan, aspirasi serta kebutuhan masyarakat Banggai Kepulauan. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-2026 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-2026.

Berdasarkan rencana pembangunan daerah tersebut, Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan menyusun program dan kegiatan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat setiap tahun yang secara teknis dijabarkan dalam perencanaan tahunan yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 merupakan rencana pembangunan untuk mencapai seluruh target pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD/RPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-2026. Secara operasional, rencana tahunan tersebut dijabarkan secara lebih rinci dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023.



Sesuai dengan amanat Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD, serta menginformasikan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat. Untuk memenuhi kewajiban konstitusional tersebut, pada akhir Tahun Anggaran 2023 disusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 untuk disampaikan kepada Pemerintah sebagai bahan evaluasi kinerja pemerintah daerah sehingga diketahui prestasinya secara nasional.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 menggambarkan perkembangan pelaksanaan pembangunan pada Tahun Anggaran 2023. Dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 tertuang Visi, Misi, maupun strategi dan arah kebijakan yang dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan yang terukur.

1.1.1 Penjelasan Umum

a. Undang – Undang Pembentukan Daerah

Kabupaten Banggai Kepulauan adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah dengan ibukota Salakan, Kabupaten ini sebelumnya merupakan kesatuan wilayah Kabupaten Banggai yang resmi terbentuk menjadi daerah otonom melalui Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Morowali, Kabupaten Buol, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3966). pasal 5 menyebutkan Kabupaten Banggai Kepulauan berasal dari sebagian Kabupaten Banggai dengan Ibukota Salakan yang pada saat itu masih terdiri atas 7 kecamatan yaitu Kecamatan Banggai, Kecamatan Totikum, Kecamatan Tinangkung, Kecamatan Liang, Kecamatan Bulagi, Kecamatan Buko, Kecamatan Labobo Bangkurung.

Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan dalam mengembangkan wilayah dan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka kemudian pada tahun 2012 dilakukan pemekaran kecamatan sehingga jumlah



kecamatan telah mencapai 19 (Sembilan Belas) kecamatan dengan Kecamatan terluas adalah Kecamatan Bulagi Selatan.

Kemudian pada tahun 2013 dikeluarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2013 tentang pembentukan Kabupaten Banggai laut sebagai pemekaran dari Kabupaten Banggai Kepulauan yang mengambil beberapa Kecamatan sehingga sampai dengan saat ini Kabupaten Banggai Kepulauan tinggal memiliki 12 Kecamatan saja yang meliputi:

1. Kecamatan Tinangkung
2. Kecamatan Tinangkung Selatan
3. Kecamatan Tinangkung Utara
4. Kecamatan Totikum
5. Kecamatan Totikum Selatan
6. Kecamatan Liang
7. Kecamatan Peling Tengah
8. Kecamatan Bulagi Utara
9. Kecamatan Bulagi
10. Kecamatan Bulagi Selatan
11. Kecamatan Buko
12. Kecamatan Buko Selatan

b. Data Geografis Wilayah.

Kabupaten Banggai Kepulauan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah yang letaknya paling timur dan merupakan gugusan kepulauan, karena merupakan daerah kepulauan maka memiliki banyak potensi perairan seperti perikanan dan pariwisata apalagi daerah ini hanya berbatasan laut dengan Provinsi Maluku di sebelah timur . Secara geografis Kabupaten Banggai Kepulauan terletak pada posisi 1° 06' 30" Lintang Selatan sampai dengan 1° 35' 58" Lintang Selatan dan 122° 37' 6,3" Bujur Timur sampai dengan 123° 40' 1,9" Bujur Timur di Jazirah Timur Laut Pulau Sulawesi.

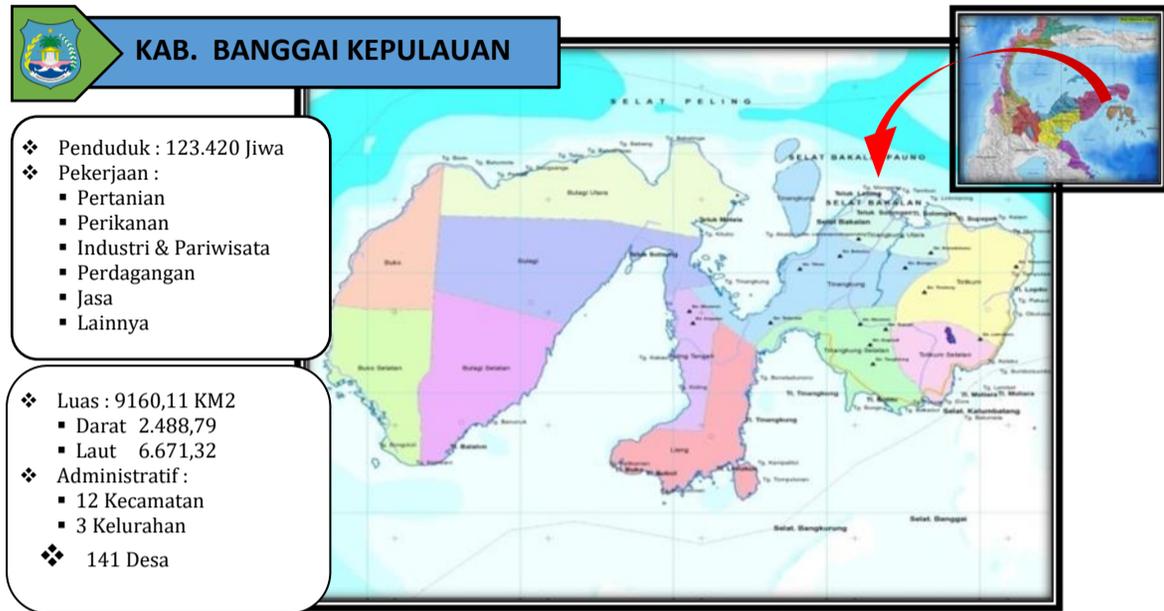
Batas-batas wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan meliputi :

- *Sebelah Utara* : kabupaten Banggai
- *Sebelah Selatan* : Kabupaten Banggai Laut
- *Sebelah timur* : Laut Maluku, dan
- *Sebelah Barat* : Selat Peling



Gambar I

Peta Administrasi Kabupaten Banggai Kepulauan



Sumber : BPS Kab. Bangkep 2023

Kabupaten Banggai Kepulauan memiliki luas wilayah ± 9.160,11 Km² yang terdiri dari luas darat 2.488,79 Km² yang terdiri dari satu pulau besar dan beberapa pulau kecil dan luas laut 6.671,32 Km² atau sekitar 72,83 % dari luas keseluruhan. Secara rinci luas wilayah per kecamatan di Kabupaten Banggai Kepulauan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Luas Wilayah Administrasi Kecamatan
di Kabupaten Banggai Kepulauan

Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	
	Darat	Laut
01. Totikum	155,45	1.082,85
02. Totikum Selatan	95,19	663,09
03. Tinangkung	312,60	446,96
04. Tinangkung Selatan	187,89	251,23
05. Tinangkung Utara	136,65	195,38
06. Liang	176,19	507,78
07. Peling Tengah	140,00	403,49
08. Bulagi	275,66	303,58
09. Bulagi Selatan	319,00	351,45
10. Bulagi Utara	318,00	350,21
11. Buko	184,84	1.050,60
12. Buko Selatan	187,32	1.064,70
Banggai Kepulauan	2.488,79	6.671,32

Sumber : BPS KAB. Bangkep tahun 2024

Kabupaten Banggai Kepulauan terletak antara 1° 06'' 30" Lintang Selatan sampai dengan 1°35' 58" Lintang Selatan dan 122° 37' 6,3" Bujur Timur sampai



dengan $123^{\circ} 40' 1,9''$ Bujur Timur di Pulau Sulawesi. Batas wilayah administrasi Kabupaten Banggai Kepulauan yaitu Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Banggai, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Banggai Laut, Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Maluku, Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Peling.

1. Topografi dan Kemiringan Lereng

Berdasarkan Topografi, wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan dapat dibagi menjadi 4 satuan utama, yaitu: pegunungan/perbukitan struktural, pegunungan/perbukitan karst, perbukitan intrusif, dan dataran rendah.

Pegunungan struktural terdapat di bagian barat Pulau Peling, memanjang dengan pola selatan - utara dengan ketinggian lebih dari 700 Mdpl, lereng curam hingga sangat curam dengan kemiringan ≥ 40 persen. Morfologi ini terdapat di sekitar perbatasan Kecamatan Buko, Kecamatan Buko Selatan, Kecamatan Bulagi Selatan, dan Kecamatan Bulagi. Perbukitan struktural terdapat hampir di seluruh wilayah, dengan ketinggian mulai ± 200 hingga ± 700 meter di atas muka air laut, dengan lereng relatif miring (15-30 persen) hingga berbukit curam (30-40 persen).

Pegunungan dan perbukitan karst menempati sebagian besar wilayah, dan secara lokal-lokal pada pulau-pulau lainnya. Ciri khas morfologi ini adalah pola kerucut dan lembah karst, dolin, gua, ponor, dan sungai bawah tanah. Puncaknya terdapat di Gunung Tinakong (558 meter) dan Bukit Balombong. Dataran rendah terbentang di sepanjang wilayah pesisir dan lembah-lembah antar perbukitan atau pegunungan, yang sebagian besar dijumpai di bagian utara, dan sebagian kecil di bagian selatan.

Rincian kondisi tinggi rata-rata dari permukaan laut di tiap Kecamatan dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 1.2
Kondisi topografi rata-rata per kecamatan
di Kabupaten Banggai Kepulauan

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Tinggi DPL (m)
1	Totikum	Sambiut	10
2	Totikum Selatan	Kalumbatan	2
3	Tinangkung	Salakan	3
4	Tinangkung Selatan	Mansamat A	3
5	Tinangkung Utara	Batulombu	1
6	Liang	Liang	2
7	Peling Tengah	Patukuki	2
8	Bulagi	Bulagi 1	3
9	Bulagi Selatan	Lolantang	5



10	Bulagi Utara	Sambulangan	5
11	Buko	Tataba	2
12	Buko Selatan	Lumbi-Lumbia	3

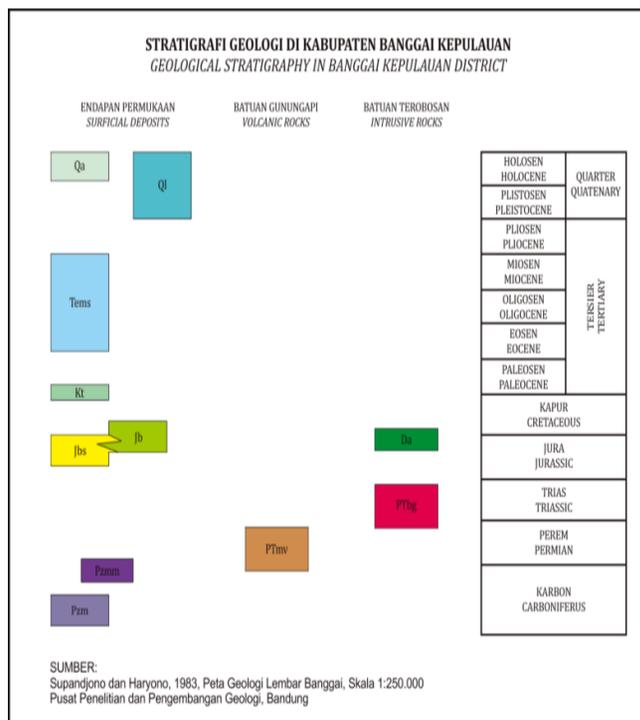
Sumber: BPS Kab. Banggai Kepulauan tahun 2024

2. Geologi

Secara geologi regional, akibat sejarah geotektonik yang terjadi, maka batuan yang mengalasi wilayah kajian adalah batuan malihan, granit, dan batuan gunung api. Batuan tertua berupa Kompleks Batuan Malihan (PZm) yang terdiri atas sekis, gneis, dan kuarsit. Kemudian menyusul Formasi Menanga (Cmm) yang terbentuk dari perselingan batu gamping hablur, batu pasir malihan, batusabak, dan filit, dengan penarikan radiometri menyatakan berumur Karbon (tidak terdapat di Kabupaten Banggai Kepulauan). Stratigrafi batuan penyusun Kabupaten Banggai Kepulauan disajikan dalam Gambar 2

Gambar 2

Stratigrafi Geologi Kabupaten Banggai Kepulauan



Era	Periode atau Zaman	Kala	Lama (Juta tahun)	Umur (Juta tahun)	Orogenik
KENOZOIKUM	Kwartier	Holosen	10.000 thn		Cascadian
		Pleistosen	2	2	
	Tersier	Pliosen	3	5	
		Miosen	19	24	
		Oligosen	13	37	
		Eosen	21	68	
Paleosen	8	66			
MESO-ZOIKUM	Kretasius		78	144	Laramian
	Jurasik		64	208	Nevadian
	Triasik		37	245	
PALEOZOIKUM	Permian		41	286	Applacian (Hercynian)
		Karbon	Pennsylvanian	34	320
		Mississippian	40	360	
	Devon		48	408	Acadian
	Silur		30	438	Caledonian
	Ordo		67	505	Taconian
PRE KAMBRIUM	Kambrium		65	570	
	Pre-Kambrium Akhir		0.3 - 0.4	0.9 - 1.0	Grenville
	Pre-Kambrium Tengah		0.6 - 0.8	1.6 - 1.7	Hudsonian
	Pre-Kambrium Awal		0.7 - 0.9	2.4 - 2.5	Kenoran
			0.9 - 1.0		
			0.6 - 0.8		
			0.7 - 0.9		
			0.9 - 1.0		
			Umur Batuan Tertua	3.6 - 3.8	*
			Earth Accretion Completed	4.6 - 4.7	*
			Age of Universe	17 - 18	*

Sumber: KLHS RTRW Kab. Banggai Kepulauan 2022-2042

Kabupaten Banggai Kepulauan, terdapat 4 (empat) klasifikasi tanah tingkat ordo berdasarkan *Soil Taxonomy* (PPT Bogor, 1998), yaitu: *Entisols*, *Inceptisols*, *Ultisols*, dan *Mollisols*, yang dapat dirinci seperti pada tabel 1.3

Tabel 1.3

Klasifikasi Tanah (Soil Taxonomy PPT, 1998)
Kabupaten Banggai Kepulauan



Ordo	Grup	Karakteristik	Satuan Ekoregion
Entisols Aluvial	Fluvaquents	<ul style="list-style-type: none"> Stratigrafi lapisan dari bahan-bahan yang berbeda, warna coklat gelap kekelabuan (10YR 4/2), tekstur bervariasi bergantung endapan. pH agak masam hingga netral, BO sedang hingga tinggi, P dan K total rendah hingga sangat tinggi, KTK rendah hingga tinggi, kejenuhan basa sangat tinggi. 	Perbukitan atau Pegunungan (F1)
	Endoaquents	<ul style="list-style-type: none"> Gleisasi sempurna dari bawah sampai atas. Warna kelabu (5YR 5/1) dengan/tanpa karatan di lapisan atas, tekstur lempung hingga lempung berpasir. Tanah agak alkalis pada daerah genangan, kadar P total sangat tinggi hingga sangat rendah, K total sangat tinggi, KTK dan kejenuhan basa tinggi hingga sangat tinggi. 	Dataran Aluvial Rawa Lembah antar (F2)
	Psammaquents	<ul style="list-style-type: none"> Warna kelabu agak gelap hingga gelap (5YR 3/1). Struktur berbutir lepas, tekstur kasar (pasir berlempung hingga lebih kasar). Tanah sangat asam, BO rendah hingga sedang, P total rendah hingga sangat rendah, K total sedang hingga rendah, KTK rendah hingga sangat rendah, kejenuhan basa sangat tinggi. 	Dataran Aluvial Pesisir (Fm)
	Quartzipsammentes	<ul style="list-style-type: none"> Tekstur kasar (pasir dengan sedikit kandungan pasir kuarsa), warna coklat gelap (7,5YR 4/3), drainase cepat. Tanah agak masam hingga netral, BO sgt rendah, P dan K total sangat rendah, KTK dan kejenuhan 	Wilayah Pesisir Bergisik (M)
Ultisols Podsolik	Kandiudults	<ul style="list-style-type: none"> Horison kandik dengan penurunan lempung <20 persen hingga kedalaman 150 cm, drainase baik. Lapisan atas berwarna coklat gelap (10YR 4/3) sampai coklat gelap kekuningan (10YR 4/6), lapisan bawah coklat kekuningan (10YR 5/6) sampai merah kekuningan (5YR 5/6). Tekstur halus hingga sedang, struktur kersai hingga gumpal agak membulat, konsistensi sangat gembur hingga gembur (lembab) agak lekat sampai lekat (basah). Tanah masam, BO rendah, P dan K total sangat rendah hingga rendah, KTK dan kejenuhan basa rendah hingga sangat rendah, Al sangat tinggi. 	Perbukitan Intrusif Vulkanik Tua (V) Perbukitan Satruktural Patahan Batuan Gunungapi Tua (S1)
Inceptisols Kambisol	Dystrudepts	<ul style="list-style-type: none"> Solum sedang hingga dalam, warna coklat (7,5YR 4/6) sampai coklat kekuningan (10YR 5/8). Tekstur halus, struktur gumpal, konsistensi agak teguh hingga teguh, bahan induk batu gamping, batu lempung, dan batu pasir. Tanah masam hingga netral, BO umumnya rendah, K total sangat rendah hingga sedang, P total rendah hingga sangat rendah, KTK rendah, basa rendah, Al tinggi hingga sangat tinggi. 	Perbukitan dan Pegunungan Struktural Patahan Batuan Malihan dan Batugamping Napal (S2) (dominan) Perbukitan dan Pegunungan Karst Batugamping Terumbu (K)
Oxisols Latosol	Kandiudoxs	<ul style="list-style-type: none"> Horison kandik, drainase baik, warna homogen coklat hingga coklat kemerahan dan merah kotor (10YR 3/3-3/4 sampai 2,5YR 3/3-3/4) untuk lapisan, coklat kekuningan hingga coklat tua merah kekuningan (10YR 4/6-5/6 sampai 5YR 4/6-6/6) untuk lapisan bawah. 	Perbukitan dan Pegunungan Karst Batugamping Terumbu (K) (dominan) Perbukitan dan Pegunungan Struktural



Ordo	Grup	Karakteristik	Satuan Ekoregion
		<ul style="list-style-type: none">▪ Tekstur lempung berdebu hingga lempung, struktur agak gumpal hingga kersai, konsistensi sangat gembur (lembab) dan lekat hingga plastis (basah).▪ Tanah netral hingga agak basa, BO rendah hingga sedang (atas) dan sangat rendah (bawah), P dan K total sangat rendah, KTK rendah, dan kejenuhan basa tinggi.	Patahan (S2)

Sumber: BP3, Departemen Pertanian RI (2006) dan Hasil Survei Lapangan (Mei-Juni, 2012) dalam KLHS Kabupaten Banggai Kepulauan (2012)

Berdasarkan laporan penelitian dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Geoteknologi Bandung Tahun 2003, secara umum ketersediaan air di Kabupaten Banggai Kepulauan yang dianalisis menggunakan metode Thornwaite, diperoleh hasil bahwa terjadi surplus air pada bulan-bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, dan Agustus; Di lain pihak, defisit air terjadi pada bulan-bulan Januari, September, Oktober, November, dan Desember. Selanjutnya, jika digunakan koefisien runoff sebesar 0,5 atau 50 persen, maka menurut neraca meteorologis, jumlah volume air di Pulau Peling mencapai 1.498.816.834 m³/tahun (LIPI-Geotek, 2003 dalam KLHS Kabupaten Banggai Kepulauan, 2012).

3. Hidrologi

Jika ditinjau dari ketersediaan air permukaan, di Kabupaten Banggai Kepulauan terdapat beberapa sungai, yang jika ditinjau berdasarkan sifat pengalirannya dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu: (a) sungai perennial, sungai yang mengalir sepanjang tahun, yang biasanya bersumber dari mata air berdebit besar dan permanen sepanjang tahun, dan (b) sungai intermitten, sungai yang mengalir ketika musim hujan saja. Wilayah Sungai di Kabupaten Banggai Kepulauan di sajikan pada tabel berikut:

Tabel 1.4
Panjang wilayah sungai di
Kabupaten Banggai Kepulauan

No	Nama Sungai	Panjang (m)
1	Paisu Tatakalai	± 8.400
2	Paisu Tembang	± 11.700
3	Paisu Puso Palam	± 2.200
4	Paisu Babasal Kombutokan	± 2.500
5	Paisu Moi Abason	± 5.500
6	Paisu Mosoni	± 10.200
7	Paisu Bulito Tobungin	± 7.000
8	Paisu Nipa Mansamat	± 10.400
9	Paisu Manggalai	± 6.200
10	Paisu Momulusan	± 4.300
11	Paisu Patukuki	± 3.200
12	Paisu Malangong	± 4.200



No	Nama Sungai	Panjang (m)
13	Paisu Lalengan	± 5.300
14	Paisu Mata	± 3.900
15	Paisu Talas-talas dan	± 5.000
16	Paisu Kambani	± 2.000

Sumber : Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2016 Tentang RTRW Kab.Bangkep (2016-2036)

Selain sungai-sungai tersebut, terdapat pula potensi air permukaan berupa danau yang airnya dapat pula dimanfaatkan dan dikembangkan. Danau di Kabupaten Banggai Kepulauan antara lain Danau Alani, Danau Tendetung, Danau Luk Panenteng, Danau Lemelu, Danau Ndukukan, Danau Kuakon, Danau Emeluk, Danau Paisu Lamasono dan Danau Lano.

Tabel 1.5

Distribusi sungai dan danau berdasarkan satuan ekoregion
Kabupaten Banggai Kepulauan

No	Nama Danau dan Sungai	Satuan Ekoregion
1	Danau Alani, Buko Selatan	Perbukitan dan Pegunungan Struktural Patahan Kelompok Batuan Malihan Sekis, Gneis, dan Batunapal
2	Danau Tendetung, Totikum Selatan	Perbukitan dan Pegunungan Karst Batugamping Terumbu
3	Sungai Patukuki, Peling Tengah	Perbukitan dan Pegunungan Struktural Patahan Kelompok Batuan Malihan Sekis, Gneis, dan Batunapal
4	Sungai Malanggong, Buko	Perbukitan dan Pegunungan Struktural Patahan Kelompok Batuan Malihan Sekis, Gneis, dan Batunapal
5	Sungai Kambani, Bulagi Selatan	Perbukitan dan Pegunungan Struktural Patahan Kelompok Batuan Malihan Sekis, Gneis, dan Batunapal
6	Sungai Manggalai, Tinangkung	Lembah antar Perbukitan atau Pegunungan material Aluvium
7	Sungai Tatakalai, Tinangkung Utara	Dataran Aluvial Pesisir material Aluvium
8	Sungai Babasal Kombutokan, Totikum	Dataran Aluvial Pesisir material Aluvium

Sumber : Geotek LIPI (2003) dalam KLHS Kabupaten Banggai Kepulauan (2012)

4. Klimatologi

Kondisi iklim di Kabupaten Banggai Kepulauan dipengaruhi oleh dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Musim hujan ini dapat digolongkan menjadi tiga jenis berdasarkan frekuensi curah hujan, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan April sekitar 180,8 mm³ dan curah hujan terendah pada bulan Oktober 2,80 mm³, Sepanjang tahun 2023, suhu udara rata – rata terendah yaitu 27°C terjadi pada bulan september dan tertinggi sebesar 29,1°C pada bulan november dan desember.



Tabel 1.6

Pengamatan Unsur Iklim Menurut Bulan di Stasion Meteorologi Syukuran Aminuddin Amir Luwuk, 2023
Observation of Climate Elements By Months at Syukuran Aminuddin Amir Luwuk Meteorological Station, 2023

Bulan Month	Jumlah Curah Hujan (mm/tahun) Number of Precipitation (mm/year)	Jumlah Hari Hujan (hari) Number of Rainy Days (day)	Penyinaran Matahari (jam) Duration of Sunshine (hour)	Suhu/Temperature (°C)		
				Minimum	Rata- rata Average	Maksimum
Januari/January	65,9	20	6,46	23,8	28,2	33,3
Februari/February	76,6	14	5,6	24,3	28,4	33,4
Maret/March	89,4	18	5,03	24	28,2	32,9
April/April	180,8	23	4,14	23,6	28,1	33,4
Mei/May	77,3	22	5,22	23,3	27,7	32,6
Juni/June	78	14	5,77	23,8	27,4	31,7
Juli/July	79,2	22	4,53	22,7	27	31,5
Agustus/August	66,5	21	4,09	22,6	26,6	31,9
September/September	25,4	10	2,93	22,1	27	31,8
Oktober/October	2,8	3	4,21	22,7	28,4	32,1
November/November	23,6	10	6,09	25	29,1	33,6
Desember/December	46,3	16	9,27	23,5	29,1	34,6

Sumber: *Banggai Kepulauan Dalam Angka, 2024*

Sementara untuk kecepatan angin di Kabupaten Banggai Kepulauan tertinggi terjadi pada bulan September sebesar 8,8 knot sedangkan terendah terjadi bulan Januari Februari sebesar 4,1 knot. Untuk tekanan udara selama tahun 2023 tertinggi terjadi pada bulan September sebesar 109,6% dan terendah 107,2% pada bulan Desember.

Tabel 1.7

Kecepatan Angin dan Tekanan Udara
di stasiun Meteorologi Aminudin Amir Luwuk,

Bulan Month	Kecepatan Angin (knot) Wind Velocity (knot)			Tekanan Udara/Atmospheric Pressure (mbar)		
	Minimum	Rata- Rata Average	Maximum	Minimum	Rata-Rata Average	Maximum
Januari/January	0	4,1	14	1001,1	1005,9	1012,1
Februari/February	0	4,1	17	1001,9	1005,9	1010
Maret/March	0	4,2	15	1003,1	1007,5	1011,8
April/April	0	4,6	16	1002,5	1006,7	1011,6
Mei/May	0	5,7	15	1001,6	1008,5	1012,8
Juni/June	0	6	17	1004,6	1008,4	1011,9



Juli/July	0	7,2	18	1005,2	1009,2	1012,3
Agustus/August	0	8,4	19	1006,6	1010,4	1014,5
September/September	0	8,8	17	1006,2	1009,6	1013,3
Oktober/October	0	7,6	19	1005,2	1009,5	1012,6
November/November	0	4,4	13	1002,9	1007,4	1011
Desember/December	0	4,3	12	1002,6	1007,2	1011,7

Sumber: *Banggai Kepulauan Dalam Angka, 2023*

c. Jumlah Penduduk

Tabel dibawah menunjukkan bahwa kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar di wilayah Ibukota Kabupaten Banggai Kepulauan yaitu di Kecamatan Tinangkung dengan jumlah penduduk sebesar 18.534 jiwa di tahun 2023 dengan laju pertumbuhan penduduk 2,59, sedangkan penduduk dengan jumlah paling sedikit berada di Kecamatan Tinangkung Selatan sebesar 8.220 di tahun 2023 dengan laju pertumbuhan penduduk 1,01.

Tabel 1.8

Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kecamatan di Kab. Banggai Kepulauan Tahun 2022

Kecamatan	Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2020-2024 (%)
-1	-2	-3
Totikum	10.638	0,58
Totikum Selatan	8.625	0,54
Tinangkung	18.534	2,59
Tinangkung Selatan	8.220	1,01
Tinangkung Utara	9.002	1,22
Liang	9.736	0,8
Peling Tengah	10.741	1,14
Bulagi	9.478	-0,04
Bulagi Selatan	9.698	0
Bulagi Utara	9.854	0,79
Buko	10.022	0,53
Buko Selatan	8.872	0,9
Banggai Kepulauan	123.420	0,98

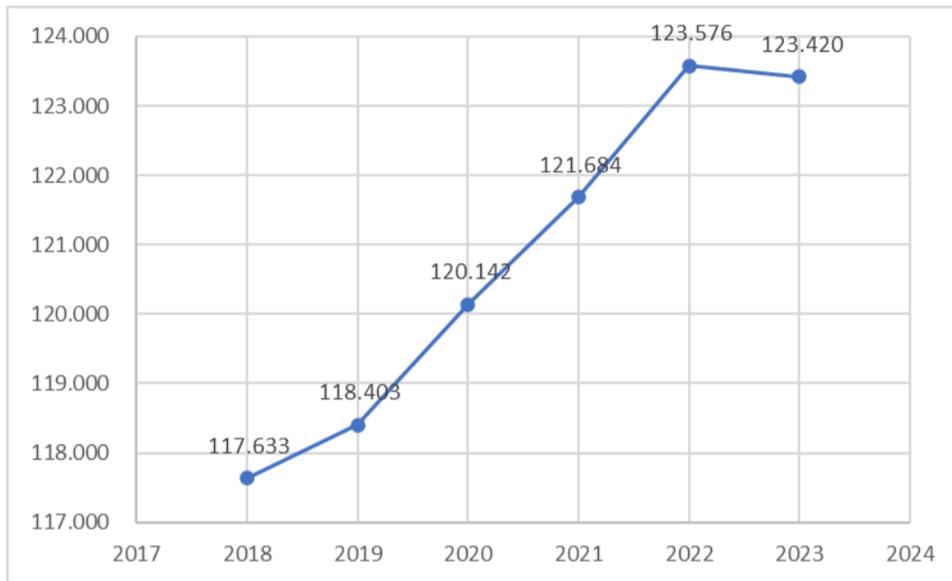
Sumber: *Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024*

Jumlah penduduk di Kabupaten Banggai Kepulauan di tahun 2022 sebesar 123.576 jiwa yang tersebar di 12 kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk 48,27 jiwa/km² dan pada tahun 2023 jumlah penduduk menurun berjumlah 123.420 dengan tingkat kepadatan



penduduk 49,59 jiwa/km². Meskipun pertumbuhan penduduk secara umum dilihat masih cukup rendah tetapi ini tetap menjadi bahan analisis yang akan mempengaruhi berbagai aspek seperti pendidikan, kesehatan dan juga ketenagakerjaan.

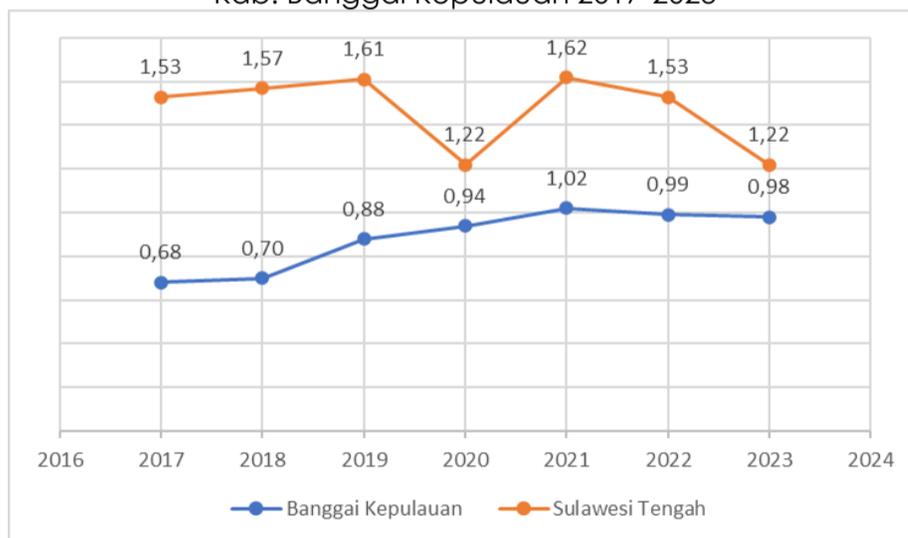
Grafik 1.1
Perkembangan Jumlah penduduk Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 – 2023



Sumber: BPS Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024

Adapun gambaran perkembangan laju pertumbuhan penduduk dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Grafik 1.2
Laju Pertumbuhan Penduduk Prov. Sulawesi Tengah dan Kab. Banggai Kepulauan 2017-2023



Sumber: BPS Kab. Bangkep, 2024



Gambar di atas menunjukkan perkembangan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Banggai Kepulauan dan Provinsi Sulawesi Tengah. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Banggai Kepulauan tidak mengalami perubahan yang cukup signifikan. Laju pertumbuhan penduduk meningkat dari 0,68 persen di Tahun 2017 menjadi 0,98 persen pada Tahun 2023.

Secara umum jumlah penduduk Kabupaten Banggai Kepulauan terus mengalami peningkatan sejak tahun 2018 hingga tahun 2022 dan 2023 menurun. Data perbandingan jumlah penduduk Kabupaten Banggai Kepulauan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2018-2022, sebagai berikut.

Tabel 1.9
Perbandingan Jumlah Penduduk Kabupaten Banggai Kepulauan
dengan Kab/Kota di Prov. Sulteng Tahun 2018-2023

No	Kabupaten/Kota	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Banggai Kepulauan	117.633	118.401	120.142	121.684	123.576	123.420
2	Banggai	371.322	376.808	362.275	366.224	370.971	373.693
3	Morowali	119.292	121.296	161.727	167.910	176.244	170.450
4	Poso	251.185	256.393	244.875	248.345	252.650	251.654
5	Donggala	301.591	304.110	300.436	302.965	305.890	308.301
6	Toli-Toli	233.409	235.800	225.154	226.796	228.641	231.711
7	Buol	158.790	162.179	145.254	146.628	148.246	150.524
8	Parigi Moutong	482.794	490.915	440.015	443.170	446.712	454.697
9	Tojo Una-una	152.476	153.991	163.829	166.339	169.478	169.002
10	Sigi	237.011	239.421	257.585	261.676	266.812	266.650
11	Banggai Laut	73.697	75.003	70.435	70.872	71.345	73.100
12	Morowali Utara	125.624	128.323	120.789	122.240	124.006	126.049
13	Palu	385.619	391.383	373.218	377.030	381.572	387.493
Sulawesi Tengah		3.010.443	3.054.023	2.985.734	3.021.879	3.066.143	3.086.750

Sumber: BPS Kab. Bangkep, 2024

Secara umum pertumbuhan penduduk menurut Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah terus menerus mengalami peningkatan dari tahun 2018 hingga tahun 2023. Tetapi memasuki tahun 2020, jumlah penduduk Propinsi Sulawesi Tengah mengalami penurunan jumlah. Pada tahun 2020, total penduduk Provinsi Sulawesi Tengah sebanyak 2.985.734 jiwa. Kabupaten Parigi Moutong merupakan



wilayah dengan jumlah penduduk tertinggi, yakni sebanyak 454.697 jiwa; Kota Palu dengan jumlah penduduk tertinggi kedua dengan jumlah penduduk 387.493 jiwa dan peringkat ketiga Kabupaten Banggai sebanyak 373.693 jiwa. Kabupaten Banggai Laut menjadi Kabupaten dengan jumlah penduduk terendah yakni sebanyak 73.100 jiwa. Sedangkan Kabupaten Banggai Kepulauan jumlah penduduk pada tahun 2023 sebanyak 123.420 jiwa atau terendah kedua.

1. Rasio Jenis Kelamin

Penduduk Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 lebih didominasi oleh jenis kelamin laki-laki dibandingkan perempuan. Jumlah penduduk laki-laki Kabupaten Banggai Kepulauan kurang lebih sebanyak 62.461 jiwa sementara penduduk perempuan sebanyak 60.959 jiwa. Yang berarti rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Banggai Kepulauan sebesar 102,46. Sementara persebaran rasio jenis kelamin ditingkatan kecamatan dapat dilihat pada tabel I.10 dibawah ini:

Tabel 1.10
Rasio Jenis Kelamin penduduk per Kecamatan
di Kab. Banggai Kepulauan Tahun 2023

No.	Kecamatan	Rasio Jenis Kelamin Penduduk
1	Totikum	104,38
2	Totikum Selatan	103,47
3	Tinangkung	102,82
4	Tinangkung Selatan	100,98
5	Tinangkung Utara	106,33
6	Liang	97,89
7	Peling Tengah	104,36
8	Bulagi	101,62
9	Bulagi Selatan	104,13
10	Bulagi Utara	101,47
11	Buko	99,56
12	Buko Selatan	102,42
Jumlah		102,46

Sumber: BPS Kab. Bangkep, 2024

2. Persebaran dan Kepadatan Penduduk

Persebaran penduduk Kabupaten Banggai Kepulauan cenderung merata disemua kecamatan yang ada di Kabupaten Banggai Kepulauan. Kecamatan dengan persentase jumlah penduduk tertinggi adalah Kecamatan Tinangkung 15,02% dan Kecamatan dengan persentase penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Tinangkung Selatan 6,66%.



Secara lebih detail, persebaran penduduk Kabupaten Banggai Kepulauan dapat dilihat pada grafik yang ada dibawah.

Kepadatan penduduk secara menyeluruh di Kabupaten Banggai Kepulauan sebesar 49,59 orang per km². Namun bila ditinjau berdasarkan kecamatan, wilayah yang paling padat penduduknya adalah Kecamatan Totikum Selatan dengan Kepadatan penduduk 90,61 orang per km². Meskipun sebaran jumlah penduduk paling besar di Kecamatan Tinangkung sebagai Ibu Kota Kabupaten, namun Kecamatan Totikum Selatan memiliki tingkat kepadatan penduduk paling tinggi. Hal ini dikarenakan daerah dengan luas wilayah paling kecil di Kabupaten Banggai Kepulauan tersebut yakni hanya sebesar 90,07 km² memiliki penduduk yang berjumlah 8.625 jiwa. Berikut tabel yang menunjukkan kepadatan penduduk berdasarkan kecamatan di Kabupaten Banggai Kepulauan.

Tabel 1.11
Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan
di Kab. Banggai Kepulauan Tahun 2023

No	Kecamatan	Luas		Penduduk		Kepadatan Penduduk
		Km ²	%	Orang	%	Orang/Km ²
1	Totikum	155,45	6,25	10.638	8,62	68,43
2	Totikum Selatan	95,19	3,82	8.625	6,99	90,61
3	Tinangkung	312,6	12,56	18.534	15,02	59,29
4	Tinangkung Selatan	187,89	7,55	8.220	6,66	43,75
5	Tinangkung Utara	136,65	5,49	9.002	7,29	65,88
6	Liang	176,19	7,08	9.736	7,89	55,26
7	Peling Tengah	140	5,63	10.741	8,7	76,72
8	Bulagi	275,66	11,08	9.478	7,68	34,38
9	Bulagi Selatan	319	12,82	9.698	7,86	30,4
10	Bulagi Utara	318	12,78	9.854	7,98	30,99
11	Buko	184,84	7,43	10.022	8,12	54,22
12	Buko Selatan	187,32	7,53	8.872	7,19	47,36
Banggai Kepulauan		2.488,79	100	123.420	100	49,59

Sumber: BPS Kab. Bangkep, 2024

Dari Tabel di atas dapat diketahui bahwa Kecamatan Totikum Selatan memiliki tingkat kepadatan penduduk paling tinggi yakni 90,61 orang pada setiap 1 kilometer persegi. Di lain pihak, Kecamatan Bulagi Selatan merupakan kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk yang paling rendah yakni 30,4 orang pada setiap 1 kilometer persegi. Kabupaten Banggai Kepulauan sendiri memiliki tingkat kepadatan penduduk sebesar 48,89 orang perkilometer persegi.

3. Komposisi Penduduk Menurut Umur



Perubahan dalam aspek demografi jelas terlihat dari perubahan struktur umur penduduk Kabupaten Banggai Kepulauan. Pada Tahun 2023 penduduk di bawah usia 0-14 tahun mencapai 32.868 jiwa atau sebesar 27 persen dari total penduduk Kabupaten Banggai Kepulauan yang berjumlah 123.420 jiwa. Dengan demikian Kabupaten Banggai Kepulauan mempunyai penduduk tergolong dalam penduduk Intermediate, dimana proporsi penduduk usia di bawah 15 tahun sekitar 30 persen.

Tabel 1.12
Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin,
Tahun 2023

Kelompok Umur	Jenis Kelamin/Sex		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0-4	5.256	5.073	10.329
5-9	5.726	5.536	11.262
10-14	5.681	5.596	11.277
15-19	5.532	5.460	10.992
20-24	5.438	5.123	10.561
25-29	4.920	4.680	9.600
30-34	4.438	4.443	8.881
35-39	4.550	4.495	9.045
40-44	4.471	4.382	8.853
45-49	3.981	4.008	7.989
50-54	3.427	3.398	6.825
55-59	2.952	2.840	5.792
60-64	2.335	2.279	4.614
65-69	1.652	1.648	3.300
70-74	1.109	1.048	2.157
75+	993	950	1.943
Banggai Kepulauan	62.461	60.959	123.420

Sumber: BPS Kab. Bangkep, 2023

d. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan

Kabupaten Banggai Kepulauan secara administrasi memiliki 12 kecamatan yang terbagi menjadi desa dan 3 kelurahan. Jumlah desa dan kelurahan menurut kecamatan di Kabupaten Banggai Kepulauan, diuraikan secara rinci dalam table 1.11 diketahui bahwa Kecamatan Bulagi Selatan memiliki Jumlah Desa terbanyak yakni 20 desa, disusul Kecamatan Liang dengan 16 Desa dan Kecamatan Bulagi 15 desa dan 1 kelurahan. Sementara Kecamatan Tinangkung Utara merupakan kecamatan dengan jumlah desa paling sedikit yaitu sebanyak 6 desa.

Tabel 1.13
Jumlah Desa dan Kelurahan berdasarkan Kecamatan
Di Kabupaten Banggai Kepulauan



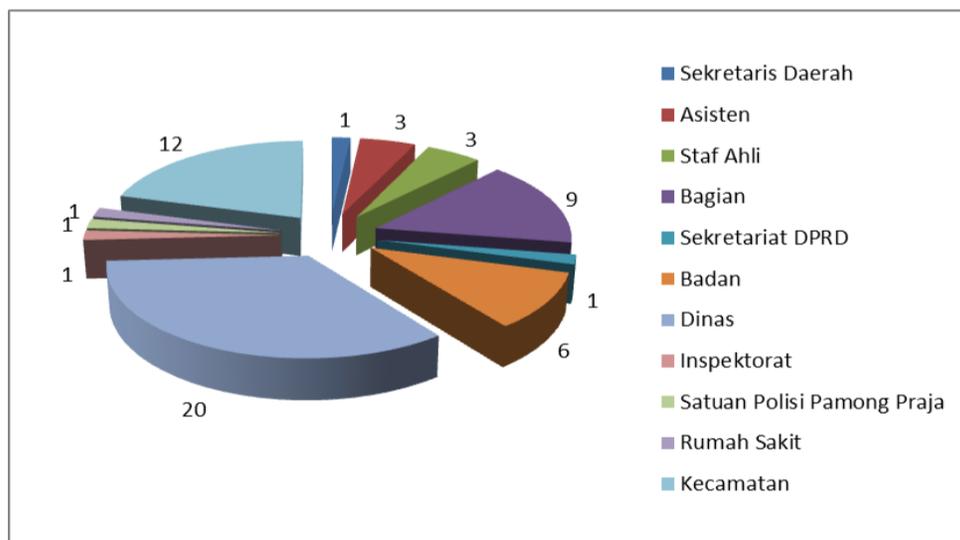
No	Kecamatan	Desa	Kelurahan
01.	Totikum	11	-
02.	Totikum Selatan	8	-
03.	Tinangkung	10	1
04.	Tinangkung Selatan	9	-
05.	Tinangkung Utara	6	-
06.	Liang	16	-
07.	Peling Tengah	11	-
08.	Bulagi	15	1
09.	Bulagi Selatan	20	-
10.	Bulagi Utara	11	1
11.	Buko	13	-
12.	Buko Selatan	11	-
Banggai Kepulauan		141	3

Sumber: Bagian Tata Pemerintahan

**e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah;
dan**

Berdasarkan Peraturan Bupati No 37 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2017 tentang kedudukan dan susunan Organisasi Sekretariat Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Staf Ahli, Inspektorat, Dinas Badan dan Kecamatan Kabupaten Banggai Kepulauan sebanyak 58 Perangkat Daerah.

Grafik 1.4
Jumlah Perangkat Daerah
Tahun 2023





Unit Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan berjumlah 25 Unit (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memiliki 12 Korwil Kecamatan Bidang Pendidikan dan Dinas Kesehatan memiliki 12 Puskesmas beserta 1 Rumah sakit bilabanggai)

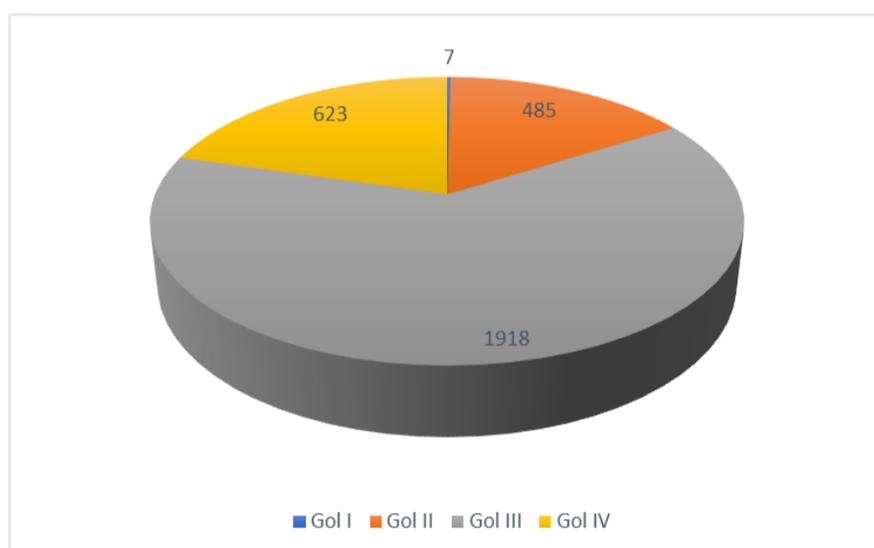
Tabel 1.14
Unit Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
Tahun 2023

Perangkat Daerah	Unit Perangkat Dearah	Jumlah
1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	- Kodinator Wilayah Bidang Pendidikan di Kecamatan	12
2. Dinas Kesehatan	- UPT Dinas Kesehatan Puskesmas	14
	- Rumah Sakit Bilabanggai Lumblumbia	1
	- Rumah Sakit Trikora Salakan	
Banggai Kepulauan		27

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sangat didukung oleh keberadaan Sumber daya manusia yang memadai. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2023 sebanyak 3.033 orang yang tersebar di seluruh instansi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Untuk komposisi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Golongan/Ruang terdiri dari Golongan I : 7 orang, Golongan II : 485 orang, Golongan III : 1.918 orang dan Golongan IV : 623 orang.

Grafik 1.5
Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Tahun 2023



Sumber : BPS Kab. Bangkep 2024



f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun 2023

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
PENDAPATAN DAERAH	860.045.753.599,00	806.441.456.157,55	93,77
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	41.060.725.094,00	30.515.769.829,55	74,32
Pajak Daerah	6.348.922.837,00	6.627.551.142,85	104,39
Retribusi Daerah	13.816.841.258,00	13.859.764.577,00	100,31
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.231.364.872,00	4.231.364.872,00	100,00
Lain-lain PAD yang Sah	16.663.596.127,00	5.797.089.237,70	34,79
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	41.060.725.094,00	30.515.769.829,55	74,32
PENDAPATAN TRANSFER	815.007.805.657,00	772.687.718.237,00	94,81
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	784.250.989.569,00	741.912.841.542,00	94,60
Dana Perimbangan	671.005.167.569,00	624.762.876.542,00	93,11
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	72.172.064.569	44.156.169.532,00	61,18
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	457.166.599.000	459.375.692.731,00	100,48
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	57.589.342.000	55.071.492.302,00	95,63
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	84.077.162.000	66.159.521.977,00	78,69
Dana Insentif Daerah (DID)	5.734.069.000,00	5.734.069.000,00	100,00
Dana Desa	107.511.753.000,00	111.415.896.000,00	103,63
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	113.245.822.000,00	117.149.965.000,00	103,45
PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA			
Pendapatan Transfer Antar Daerah	30.756.816.088,00	30.774.876.695,00	100,06
Pendapatan Bagi Hasil	29.526.816.088,00	29.544.876.695,00	100,06
Bantuan Keuangan	1.230.000.000,00	1.230.000.000,00	100,00
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	30.756.816.088,00	30.774.876.695,00	100,06
TOTAL PENDAPATAN TRANSFER	815.007.805.657,00	772.687.718.237,00	94,81
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	3.977.222.848,00	3.237.968.091,00	81,41
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	3.977.222.848,00	3.237.968.091,00	81,41
JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	3.977.222.848,00	3.237.968.091,00	81,41
JUMLAH PENDAPATAN	860.045.753.599,00	806.441.456.157,55	93,77
BELANJA DAERAH	936.937.268.812,00	800.071.458.368,00	85,39
BELANJA OPERASI	624.319.448.894,00	499.847.157.806,00	80,06
Belanja Pegawai	373.972.907.406,00	323.630.769.748,00	86,54
Belanja Barang dan Jasa	213.350.782.625,00	158.563.217.654,00	74,32
Belanja Hibah	33.016.621.863,00	13.792.897.404,00	41,78



Belanja Bantuan Sosial	3.979.137.000,00	3.860.273.000,00	97,01
JUMLAH BELANJA OPERASI	624.319.448.894,00	499.847.157.806,00	80,06
BELANJA MODAL	151.052.856.292,00	135.514.050.048,00	89,71
Belanja Modal Tanah	4.551.020.000,00	3.418.849.908,00	75,12
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.992.755.382,00	15.457.854.075,00	85,91
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	61.196.411.022,00	56.180.506.865,00	91,80
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	67.176.212.100,00	60.393.603.200,00	89,90
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	136.457.788,00	63.236.000,00	46,34
JUMLAH BELANJA MODAL	151.052.856.292,00	135.514.050.048,00	89,71
BELANJA TIDAK TERDUGA	1.191.363.962,00	1.105.880.000,00	92,82
Belanja Tidak Terduga	1.191.363.962,00	1.105.880.000,00	92,82
JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA	1.191.363.962,00	1.105.880.000,00	92,82
BELANJA TRANSFER	160.373.599.664,00	163.604.370.514,00	102,01
Belanja Bagi Hasil	3.160.953.364,00	2.487.581.214,00	78,70
Belanja Bantuan Keuangan	157.212.646.300,00	161.116.789.300,00	102,48
JUMLAH BELANJA TRANSFER	160.373.599.664,00	163.604.370.514,00	102,01
JUMLAH BELANJA	936.937.268.812,00	800.071.458.368,00	85,39
SURPLUS/DEFISIT	-76.891.515.213,00	6.369.997.789,55	(8,28)
PEMBIAYAAN DAERAH	76.891.515.213,00	77.891.515.213,49	101,30
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	80.251.515.213,00	80.251.515.213,49	100,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	80.251.515.213,00	80.251.515.213,49	100,00
Penghematan Belanja	79.761.656.730,00	79.761.656.729,57	100,00
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	80.251.515.213,00	80.251.515.213,49	100,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	3.360.000.000,00	2.360.000.000,00	70,24
Penyertaan Modal Daerah	3.360.000.000,00	2.360.000.000,00	70,24
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	3.360.000.000,00	2.360.000.000,00	70,24
PEMBIAYAAN NETTO	76.891.515.213,00	77.891.515.213,49	101,30
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	84.261.513.003,04	0,00

1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Permasalahan strategis pemerintah daerah

Berdasarkan evaluasi hasil capaian indikator kinerja Pemerintah Daerah terkait sasaran dan prioritas pembangunan tahunan dan lima tahunan serta kondisi eksisting yang terjadi di tengah masyarakat yang dijaring melalui penyampaian aspirasi masyarakat dalam setiap proses perencanaan mulai konsultasi publik, musrenbang kecamatan dan kabupaten di rumuskan dan disepakati permasalahan sebagai berikut :

1. Belum berakhirnya wabah Covid 19 masih berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Banggai Kepulauan.



2. Reformasi birokrasi belum berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini tercermin dari tidak adanya alur pelayanan publik pasti dan transparan baik teknis maupun besaran tarif layanan publik pada Perangkat Daerah khususnya pada layanan pendidikan, kesehatan, kependudukan dan catatan sipil, dan sebagainya;
3. Belum optimalnya kualitas pengelolaan sumberdaya pariwisata, perikanan dan pertanian.
4. Belum terpadunya pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama belum berorientasi pada perwilayahan komoditas. Perangkat Daerah masih menjalankan kegiatan secara parsial.
5. Iklim investasi belum kondusif;
6. Kualitas infrastruktur dan sinergitas antar 12 kecamatan dan desa belum memadai;
7. Degradasi Lingkungan Masih Berlangsung terutama di wilayah pesisir dan sekitar mata air seperti pengrusakan bakau dan terumbu karang;

b. Visi dan Misi

- **Visi RPJPD Kabupaten Banggai kepulauan**

Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2005-2025 yaitu :

” Mewujudkan Kabupaten Banggai Kepulauan yang Berdaya Saing, Sejahtera dan Merata ”

Visi ini merupakan hasil ekstraksi dari segenap pemikiran, keinginan, harapan dan cita-cita seluruh masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan untuk dapat menjadi daerah yang memiliki daya saing, baik secara regional maupun nasional, sehingga tercipta kondisi masyarakat yang adil, aman dan Makmur, untuk mewujudkan pemerataan hasil pemabngunan di seluruh wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Sebagai gambaran dan harapan yang ingin diwujudkan oleh RPJPD Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2005-2025, pada hakekatnya mengandung makna dengan Penjabaran Visi tersebut dapat uraikan sebagai berikut:

- **Misi Kabupaten Banggai Kepulauan**

Untuk mewujudkan Visi RPJPD Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2005-2025 maka Misi Kabupaten Banggai Kepulauan dijabarkan yaitu :



1. Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan Baik (Good Governance) dan Reformasi Biokrasi Daerah yang Melayani.
2. Mewujudkan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia yang daya saing daerah melalui Pendidikan dan Kesehatan yang merata.
3. Meningkatkan konektivitas dan pemerataan pembangunan melalui peningkatan infrastruktur daerah.
4. Mewujudkan perekonomian daerah inklusif dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
5. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang berkelanjutan.

c. Program pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan jangka menengah; dan

Program Prioritas beserta target yang ingin di capai di Tahun 2023 berdasarkan RKPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 1.15
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
Kabupaten Banggai Kepulauan
Tahun 2023

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2023	PEMBANGUNAN DAERAH PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6	7
1	Tersedianya Sarana dan Prasarana pelabuhan Salakan dan penataan kawasan ibukota	Tersedianya Pelabuhan Laut yang memenuhi standar	Jumlah Pelabuhan Laut	13 Buah	Program Pengelolaan pelayaran	Dinas Perhubungan
		Meningkatnya pemerataan dan kualitas pembangunan jalan dan jembatan untuk konektivitas wilayah	Persentase tingkat kemantapan jalan kabupaten	66,12 %	Program penyelenggaraan jalan	Dinas PUPR
		Meningkatnya Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah	1,48 Indeks	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas PUPR
			Persentase cakupan irigasi dalam kondisi baik dan berkualitas	27,83 %	Program Pengelolaan Sumber DAYa Air	Dinas PUPR
			Panjang kawasan yang terlindungi dari bahaya banjir dan abrasi pantai	4,2 KM	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Dinas PUPR
			Jumlah Bangunan Gedung yang ber IMB	895	Program Penataan Bangunan Gedung	Dinas PUPR
			Persentase pembangunan yang sesuai RTRW dan RDTR	90,99 %	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas PUPR
			Jumlah pelaku jasa konstruksi yang bersertifikat	95 Orang	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Dinas PUPR
			Panjang wilayah yang tidak mengalami genangan	1,8 KM	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Dinas PUPR
			Tingkat Pemenuhan atas pemeliharaan dan pengadaan fasilitas persampahan	100,00 %	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Dinas PUPR
			Jumlah kawasan	2	Program	Dinas PUPR



			strategis Kabupaten yang Terpelihara	Kawasan	Pengembangan Permukiman	
			Persentase Pembangunan yang Sesuai RTRW dan RDTR	90,00 %	Program Penataan Bangunan Gedung	Dinas PUPR
			Persentase Drainase berfungsi baik	100,00 %	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Dinas PUPR
		Meningkatnya Jumlah Rumah Layak Huni dan Berkurangnya Kawasan Kumuh	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	78,42 %	Program Pengembangan Perumahan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
			Persentase Luas Kawasan Kumuh Yang Tertangani	4,00 %	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
		Terbangunnya Jaringan Komunikasi dan Informasi	Cakupan Layanan Komunikasi	79,04 %	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	Memaksimalkan pemenuhan kebutuhan air bersih	Meningkatnya Cakupan Akses Air Minum	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	60,55 %	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas PUPR
	dan jalan untuk kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya Cakupan Rumah Tangga Memiliki Sanitasi layak	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	67,99 %	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas PUPR
3	Peingkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta Optimalisasi Percepatan Penurunan Stunting	Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Akses Pendidikan	Persentase Pemenuhan SPM Pendidikan Dasar	100	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Tingkat Partisipasi warga Usia 5-6 tahun dalam pendidikan Usia Dini	99,5	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Tingkat Partisipasi warga Negara Usia 7-12 Tahun dalam Pendidikan Dasar	99,5	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Tingkat Partisipasi warga Negara Usia 12-15 tahun dalam pendidikan Menengah Pertama	72,59	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Memiliki Ijazah Diploma (D.IV), S1 dan Sertifikat Pendidik pada Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal	85	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Capaian SPM bidang kesehatan	100	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
			Persentase Pemenuhan Sediaan Farmasi, alat Kesehatan, makanan dan minuman	100	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan makanan minuman	Dinas Kesehatan
			Persentase PSKS dan KAT yang diberdayakan dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	86	Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial
			Persentase Kepemilikan KTP Elektronik	100	Program Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	50	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



			Persentase Keluarga Sejahtera ke Keluarga Sejahtera	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
4	Optimalisasi pelayanan publik dan sektor pendukung ekonomi di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik	Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Kecamatan
				Baik	Program Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Baik	Program Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Pariwisata	Pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata	Dinas Pariwisata
					Program Pemasaran Pariwisata	Dinas Pariwisata
					Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata
			Meningkatnya Profesionalitas Pegawai	Indeks Profesionalitas Pegawai	Program Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
					Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Meningkatnya PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,75	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Pertanian
					Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Perikanan	Dinas Perikanan
		Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perindustrian	Pertumbuhan PDRB Sektor Perindustrian	2,81	Program Perencanaan dan Pengembangan Industri	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM
					Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM
		Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	76	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan
		Terwujudnya Keseimbangan Pembangunan antara Manusia dan Lingkungan Secara Berkelanjutan	Indeks Kualitas Air (IKA)	68,5 Indeks	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
			Indeks Kualitas Udara (IKU)	94,5 Indeks	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup



d. Kegiatan Pembangunan Daerah berdasarkan dokumen perencanaan tahunan

Rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2023 dijabarkan dalam 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, 15 (lima belas) urusan wajib bukan pelayanan dasar, 6 (enam) urusan pilihan dan 9 (sembilan) fungsi penunjang urusan pemerintahan.

Tabel 1.16
Rencana Program / Kegiatan
Perangkat Daerah Tahun 2023

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2023	Daerah	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Peningkatan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Direncanakan Jumlah Hasil Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen 2 Dokumen	Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta Optimalisasi percepatan penurunan Stunting	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang direncanakan	1 Laporan 1 Dokumen	Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta Optimalisasi percepatan penurunan Stunting	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang direncanakan Jumlah Hasil Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen 1 Laporan	Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta Optimalisasi percepatan penurunan Stunting	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/bula 1 Tahun	Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta Optimalisasi percepatan penurunan Stunting	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Kegiatan 1 Tahun	Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta Optimalisasi percepatan penurunan Stunting	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuanga Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan La Koordinasi Penyusunan La Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme SKPD Penyusunan Laporan Keu yang terkoordinasi	3 Laporan 2 Orang	Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta Optimalisasi percepatan penurunan Stunting	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Administrasi Umum Perangkat Daerah				
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang direncanakan	5 Jenis 65 Buah	Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta Optimalisasi percepatan penurunan Stunting	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang direncanakan	3 Paket 827 Buah	Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta Optimalisasi percepatan penurunan Stunting	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Tersedianya Bahan Logistik Kantor yang direncanakan	3 Paket 3 Kegiatan	Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta Optimalisasi percepatan penurunan Stunting	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan yang direncanakan	1 Paket 2 Jenis	Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta Optimalisasi percepatan penurunan Stunting	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang direncanakan	52 Dokumen 3 Media	Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta Optimalisasi percepatan penurunan Stunting	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang direncanakan	2 Laporan 589 OK/OH	Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta Optimalisasi percepatan penurunan Stunting	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa Surat Menyurat yang direncanakan	500 Lembar 500 Lembar	Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta Optimalisasi percepatan penurunan Stunting	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 Laporan 3 Jenis	Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta Optimalisasi percepatan penurunan Stunting	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor yang direncanakan	119 Orang 119 Orang	Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta Optimalisasi percepatan penurunan Stunting	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	10 Unit 10 Unit	Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta Optimalisasi percepatan penurunan Stunting	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Aset Tetap Lainnya yang dipelihara Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	15 Unit 15 Unit	Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta Optimalisasi percepatan penurunan Stunting	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi	3 Ruang	Peningkatan Mutu Tenaga	DINAS PENDIDIKAN



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023

	Sedang/Berat		Pendidik dan Kependidikan serta Optimalisasi percepatan penurunan Stunting	DAN KEBUDAYAAN
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Terselenggaranya Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik SD	1 Kegiatan	Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta Optimalisasi percepatan penurunan Stunting	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Terlaksananya Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	1 Kegiatan	Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta Optimalisasi percepatan penurunan Stunting	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Terlaksananya Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa Tingkat SD	1 kegiatan	Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta Optimalisasi percepatan penurunan Stunting	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Terlaksananya Bantuan Operasional Bidang Pendidikan Dasar	0 Satuan Pendidikan 1 Kegiatan	Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta Optimalisasi percepatan penurunan Stunting	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Terselenggaranya Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik SMP	1 Kegiatan	Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta Optimalisasi percepatan penurunan Stunting	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Terlaksananya Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa Tingkat SMP	2 Kegiatan	Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta Optimalisasi percepatan penurunan Stunting	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Terlaksananya Bantuan Operasional Bidang Pendidikan Menengah Pertama	1 Kegiatan	Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta Optimalisasi percepatan penurunan Stunting	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				
Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD	Jumlah Alat Rumah Tangga Yang Direncanakan	2 Lembaga	Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta Optimalisasi percepatan penurunan Stunting	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Terselenggaranya Proses Belajar PAUD	2 Kegiatan	Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta Optimalisasi percepatan penurunan Stunting	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan Dan Manajemen PAUD	4 OK/Kegiatan	Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta Optimalisasi percepatan penurunan Stunting	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM				
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar				
Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Terlaksananya Pelatihan Penyusunan Kurikulum	2 Kegiatan	Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta Optimalisasi percepatan penurunan Stunting	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN				
Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				
Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Terlaksananya Perhitungan Dan Pemetaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, Paud dan PNF	11 Kegiatan	Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta Optimalisasi percepatan penurunan Stunting	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Terlaksananya Penataan Pendistribusian Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, Paud dan PNF	7 Kegiatan	Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta Optimalisasi percepatan penurunan Stunting	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN				
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota				
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Terlaksananya Pelindungan, pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan	13 Orang	Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta Optimalisasi percepatan penurunan Stunting	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Terselenggaranya Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga dan Pranata Kebudayaan	3 Orang	Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta Optimalisasi percepatan penurunan Stunting	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota				
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Terlaksananya Pelindungan, pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan	3 Set	Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta Optimalisasi percepatan penurunan Stunting	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL				
Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota				
Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Terlaksananya Peningkatan pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	1 Kegiatan	Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta Optimalisasi percepatan penurunan Stunting	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH				
Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				
Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal	1 Kegiatan	Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta Optimalisasi percepatan penurunan Stunting	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA				
Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota				
Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Terlaksananya Registrasi cagar budaya	7 Orang	Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta Optimalisasi percepatan penurunan Stunting	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Penetapan Cagar Budaya	Terselenggaranya pencegahan, Penanggulangan Kerusakan, kehancuran ata kemusnahan Cagar Budaya	1 Kegiatan	Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta Optimalisasi percepatan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			penurunan Stunting	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		DINAS KESEHATAN
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja SKPD	4 Dokumen		DINAS KESEHATAN
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	1 Dokumen 1 Tahun		DINAS KESEHATAN
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN	1 Dokumen		DINAS KESEHATAN
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				DINAS KESEHATAN
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya simda aset	100 Persen		DINAS KESEHATAN
Administrasi Umum Perangkat Daerah				
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terperuhinya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100 Item		DINAS KESEHATAN
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor RS Pratama Bilabanggai	1 Jenis		DINAS KESEHATAN
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Bahan Logistik Kantor Tersedianya Peralatan Kebersihan Kantor RS Pratama Bilabanggai Tersedianya perlengkapan rumah tangga rumah sakit	5 Jenis 1 Jenis 15 Jenis		DINAS KESEHATAN
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor Tersedianya Bahan Logistik Kantor RS Pratama Bilabanggai Tersedianya perlengkapan rumah tangga rumah sakit	4 Jenis 3 Jenis 4 Jenis		DINAS KESEHATAN
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan RS Pratama Bilabanggai Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan RS Trikora Salakan	2 Jenis 1 Jenis 2 Jenis		DINAS KESEHATAN
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Media 6 Media		DINAS KESEHATAN
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tercapainya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD RS Pratama Bilabanggai	1 Jenis		DINAS KESEHATAN
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa Surat Menyurat RS Pratama Bilabanggai Tersedianya Jasa Surat Menyurat RSUD Trikora Salakan	2 Jenis 1 Jenis 2 Jenis		DINAS KESEHATAN
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik RS Pratama Bilabanggai Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik RSUD Trikora Salakan	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan		DINAS KESEHATAN
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor RS Pratama Bilabanggai Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor RSUD Trikora Salakan	250 orang 4 Jenis 250 Orang		DINAS KESEHATAN
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	25 Unit		DINAS KESEHATAN
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	1 Paket		DINAS KESEHATAN
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				
Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Terlaksananya Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1 Paket		DINAS KESEHATAN
Pengadaan Obat, Vaksin	Terlaksananya Pengadaan Obat, Vaksin	1 Paket		DINAS KESEHATAN
Pengadaan Bahan Habis Pakai	Terlaksananya Pengadaan Bahan Habis Pakai	1 Paket		DINAS KESEHATAN
Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Terlaksananya Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan RS Pratama Bilabanggai	2 Jenis		DINAS KESEHATAN
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1 Paket		DINAS KESEHATAN
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	20 Orang	Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta Optimalisasi percepatan penurunan Stunting	DINAS KESEHATAN
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Penurunan Angka Stunting	14 Puskesmas		DINAS KESEHATAN
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Cakupan desa/kelurahan yang sanitasi total berbasis masyarakat Terperuhinya Pengangkutan Sampah dan Limbah Rumah Sakit	100 Persen 2 Jenis		DINAS KESEHATAN
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Cakupan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	100 Persen		DINAS KESEHATAN
Operasional Pelayanan Puskesmas	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	14 Puskesmas		DINAS KESEHATAN
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				DINAS KESEHATAN
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Terlaksananya Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota Terlaksananya Akreditasi Rumah Sakit RSUD Trikora Salakan	1 Kegiatan 1 Tahun		DINAS KESEHATAN
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi				
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Tersedianya dokumen profil kesehatan	1 Dokumen		DINAS KESEHATAN
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA				
	"Persentase peningkatan kapasitas sumber daya	60 Persen		



MANUSIA KESEHATAN	manusia kesehatan ⁴			
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	1 Tahun		
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	280 Orang	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS KESEHATAN
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100 Persen		
	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja perangkat daerah yang tersusun	8 Dokumen		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Memaksimalkan pemenuhan kebutuhan air bersih dan jalan untuk kesejahteraan masyarakat	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang/bul	Memaksimalkan pemenuhan kebutuhan air bersih dan jalan untuk kesejahteraan masyarakat	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Memaksimalkan pemenuhan kebutuhan air bersih dan jalan untuk kesejahteraan masyarakat	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuanga Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan La Koordinasi Penyusunan La Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme SKPD	12 Laporan	Memaksimalkan pemenuhan kebutuhan air bersih dan jalan untuk kesejahteraan masyarakat	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang tertayani penyediaan administrasi umum perangkat daerah	94 Orang		
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	10 Orang	Memaksimalkan pemenuhan kebutuhan air bersih dan jalan untuk kesejahteraan masyarakat	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Memaksimalkan pemenuhan kebutuhan air bersih dan jalan untuk kesejahteraan masyarakat	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Memaksimalkan pemenuhan kebutuhan air bersih dan jalan untuk kesejahteraan masyarakat	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	Memaksimalkan pemenuhan kebutuhan air bersih dan jalan untuk kesejahteraan masyarakat	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	Memaksimalkan pemenuhan kebutuhan air bersih dan jalan untuk kesejahteraan masyarakat	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	72 Dokumen	Memaksimalkan pemenuhan kebutuhan air bersih dan jalan untuk kesejahteraan masyarakat	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	42 Laporan	Memaksimalkan pemenuhan kebutuhan air bersih dan jalan untuk kesejahteraan masyarakat	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit/paket pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	2 Unit		
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	Memaksimalkan pemenuhan kebutuhan air bersih dan jalan untuk kesejahteraan masyarakat	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	548 Laporan		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500 Laporan	Memaksimalkan pemenuhan kebutuhan air bersih dan jalan untuk kesejahteraan masyarakat	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	Memaksimalkan pemenuhan kebutuhan air bersih dan jalan untuk kesejahteraan masyarakat	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8 Laporan	Memaksimalkan pemenuhan kebutuhan air bersih dan jalan untuk kesejahteraan masyarakat	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	16 Unit		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	Memaksimalkan pemenuhan kebutuhan air bersih dan jalan untuk kesejahteraan masyarakat	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	Memaksimalkan pemenuhan kebutuhan air bersih dan jalan untuk kesejahteraan masyarakat	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 Unit	Memaksimalkan pemenuhan kebutuhan air bersih dan jalan untuk kesejahteraan masyarakat	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Cakupan Kawasan Infrastruktur Pengaman Pantai, Sungai dan Irigasi yang terbangun	100 Persen		
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang bangunan pengaman sungai dan pantai yang terbangun	1215 Meter		
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan, dan Pengaman Pantai yang Disusun	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan, dan Pengaman Pantai yang Disusun	1 Dokumen	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	0.1 KM	Memaksimalkan pemenuhan kebutuhan air bersih dan jalan untuk kesejahteraan masyarakat	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	0.2 KM	Memaksimalkan pemenuhan kebutuhan air bersih dan jalan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023

			untuk kesejahteraan masyarakat	PENATAAN RUANG
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Luasan daerah irigasi dalam kondisi baik	1587.5 Ha		
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	38.296 KM	Memaksimalkan pemenuhan kebutuhan air bersih dan jalan untuk kesejahteraan masyarakat	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	presentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga	87.27 Persen		
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPAM	24000 SR		
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	3 Dokumen	Memaksimalkan pemenuhan kebutuhan air bersih dan jalan untuk kesejahteraan masyarakat	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	130 SR	Memaksimalkan pemenuhan kebutuhan air bersih dan jalan untuk kesejahteraan masyarakat	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	3 Liter/Detik	Memaksimalkan pemenuhan kebutuhan air bersih dan jalan untuk kesejahteraan masyarakat	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Perdesaan atau SPAM Tematik Tertentu	34 Liter/detik	Memaksimalkan pemenuhan kebutuhan air bersih dan jalan untuk kesejahteraan masyarakat	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tinggal bersanitasi	83.12 Persen		
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tangga yang terlayani sanitasi	20479 KK		
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	2 Dokumen	Memaksimalkan pemenuhan kebutuhan air bersih dan jalan untuk kesejahteraan masyarakat	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Drainase berfungsi Baik	100 Persen		
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang saluran drainase yang terbangun	1500 Meter		
Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	1720 M	Memaksimalkan pemenuhan kebutuhan air bersih dan jalan untuk kesejahteraan masyarakat	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase jalan lingkungan/ setapak berfungsi baik kawasan permukiman	100 Persen		
Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur permukiman di kawasan strategis yang tertangani	2 Kawasan		
Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1 Sistem Jaringan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Salakan dan Penataan Kawasan Ibukota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dipelihara di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1 Sistem Jaringan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Salakan dan Penataan Kawasan Ibukota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Jumlah Bangunan Ber IMB	985 Unit		
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah bangunan gedung daerah dan strategis daerah yang tertangani	7 Unit		
Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Salakan dan Penataan Kawasan Ibukota Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Salakan dan Penataan Kawasan Ibukota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Cakupan jaringan Jalan Kabupaten dalam kondisi baik	66.12 Persen		
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan dan Jembatan Kabupaten dalam kondisi baik	592 Km		
Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	1 Dokumen	Memaksimalkan pemenuhan kebutuhan air bersih dan jalan untuk kesejahteraan masyarakat	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	7.051 KM	Memaksimalkan pemenuhan kebutuhan air bersih dan jalan untuk kesejahteraan masyarakat Memaksimalkan pemenuhan kebutuhan air bersih dan jalan untuk kesejahteraan masyarakat	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Target 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	340.85 KM	Memaksimalkan pemenuhan kebutuhan air bersih dan jalan untuk kesejahteraan masyarakat	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun	40 M	Memaksimalkan pemenuhan kebutuhan air bersih dan jalan untuk kesejahteraan masyarakat	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	12 Dokumen	Memaksimalkan pemenuhan kebutuhan air bersih dan jalan untuk kesejahteraan masyarakat	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Cakupan tenaga operator/teknisi/ analis yang memiliki sertifikat kompetensi	50 Orang		
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi yang dilaksanakan	1 Kegiatan		
Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi	3 Orang	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023

Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah administrator dan layanan jasa konstruksi yang tersedia	4 Orang		
Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi	1 Laporan	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	Jumlah Orang yang Mengikuti Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	4 Orang	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	1 Dokumen	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	90,99 Persen		
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang untuk Investasi dan Pembangunan daerah yang tersedia	6 Dokumen		
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	1 Dokumen	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Salakan dan Penataan Kawasan Ibukota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100 Persen		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Dan Pelaporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Salakan dan Penataan Kawasan Ibukota	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Salakan dan Penataan Kawasan Ibukota	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tercapainya Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/bul	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Salakan dan Penataan Kawasan Ibukota	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Salakan dan Penataan Kawasan Ibukota	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan La Koordinasi Penyusunan La Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme SKPD	1 Laporan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Salakan dan Penataan Kawasan Ibukota	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Salakan dan Penataan Kawasan Ibukota	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Salakan dan Penataan Kawasan Ibukota	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Salakan dan Penataan Kawasan Ibukota	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Salakan dan Penataan Kawasan Ibukota	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Salakan dan Penataan Kawasan Ibukota	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Salakan dan Penataan Kawasan Ibukota	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen		
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Salakan dan Penataan Kawasan Ibukota	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Salakan dan Penataan Kawasan Ibukota	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Salakan dan Penataan Kawasan Ibukota	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Salakan dan Penataan Kawasan Ibukota	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Salakan dan Penataan Kawasan Ibukota	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Salakan dan Penataan Kawasan Ibukota	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Salakan dan Penataan Kawasan Ibukota	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROGRAM	cakupan penerapan SPM Bidang Perumahan	100 Persen		



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023

PENGEMBANGAN PERUMAHAN				
Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rakyat	Presentase Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100 Persen	
Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Salakan dan Penataan Kawasan Ibukota	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	1 Dokumen	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Salakan dan Penataan Kawasan Ibukota	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				
	Persentase penyediaan perencanaan kawasan permukiman	100 Persen		
Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Presentase Dokumen Dan Pelaporan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	100 Persen		
Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	1 Dokumen	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Salakan dan Penataan Kawasan Ibukota	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Penyusunan/Review/Legalasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijak Bidang PKP yang Tersusun/Terevisi/Terleg	1 Dokumen	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Salakan dan Penataan Kawasan Ibukota	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Presentase Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	100 Persen		
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	10 Unit Rumah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Salakan dan Penataan Kawasan Ibukota	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1 Laporan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Salakan dan Penataan Kawasan Ibukota	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan				
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	0 Lokasi	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Salakan dan Penataan Kawasan Ibukota	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN				
	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen		
Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen		
Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Salakan dan Penataan Kawasan Ibukota	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH				
	"Persentase layanan penatagunaan tanah Dalam kurun waktu tertentu"	100 Persen		
Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen		
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Salakan dan Penataan Kawasan Ibukota	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/Bul	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumn	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersediaanya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1		
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Bakar yang disediakan Jumlah Makan Minum Rapat Kantor yang disediakan	5646 Liter 360 Dos	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	1		
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPD)
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	13 Laporan	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	56 Laporan	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase gangguan transtibun yang dapat diselesaikan	100 Persen		
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Keterliban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Keterliban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1		
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Keterliban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Keterliban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	100 Persen	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Keterliban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Keterliban Umum	3 Dokumen	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1		
Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1 Laporan	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dalam waktu tanggap yang ditentukan	100 Persen		
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1		
Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penganggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	2 Dokumen	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	1 Unit	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100 Persen		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Dinas Yang Dircanakan	5 Dokumen	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	waktu penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Bulan	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1		
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	3 Jenis	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	1		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 tahun	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 jenis	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah bahan Logistik Kantor Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman	8776 liter 1560 das	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah bahan cetakan dan penggandaan	14493 lembar	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Media	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	tersedianya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	20 ok	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPD)
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1		
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	12 Jenis	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1074 lembar	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Jenis	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	tersedianya jasa pelayanan umum	40 OB	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	tersedianya jasa pemeliharaan, biaya dan pajak kendaraan yang Dipelihara dinas atau kendaraan dinas jabatan	14 unit	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	terlaksananya pemeliharaan dan peralatan mesin	14 unit	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Penanganan Bencana alam tuntas	100 Persen		
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Presentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1		
Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Sah dan Legal	1 Dokumen	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Presentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1		
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	25 orang	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	1 Dokumen	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	terlaksananya penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	12 kawasan	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Dokumen Jitupasana	3 kegiatan	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	30 Orang		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	terlaksananya gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	1 Kegiatan	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Presentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1		
Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 Dokumen	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencarian pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	44 ok	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	2 paket	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS SOSIAL
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	23 Orang	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS SOSIAL
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuanga Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan La Koordinasi Penyusunan La Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme SKPD	4 Laporan	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS SOSIAL
Administrasi Umum Perangkat Daerah				
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS SOSIAL
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Jenis	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS SOSIAL
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Jenis	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS SOSIAL
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Jenis	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten	DINAS SOSIAL



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Media	Banggai Kepulauan	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS SOSIAL
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Peserta yang melaksanakan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	170 OT		Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS SOSIAL
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang Disediakan	5 Jenis		Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS SOSIAL
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Meterai yang disediakan	1350 Lembar		Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS SOSIAL
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Jenis		Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS SOSIAL
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Jenis		Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS SOSIAL
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	44 Orang		Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS SOSIAL
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS SOSIAL
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit		Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS SOSIAL
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota					
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Orang		Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS SOSIAL
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	6482 Keluarg		Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS SOSIAL
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Lembaga		Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS SOSIAL
Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Sertifikat		Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS SOSIAL
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial					
Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang		Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS SOSIAL
Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang		Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS SOSIAL
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang		Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS SOSIAL
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	3000 Orang		Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS SOSIAL
Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang mendapatkan Bantuan Sosial Layanan Kedaruratan	15 Orang		Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS SOSIAL
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Lansia yang mendapat Bantuan Sosial Tunjangan hari Tua	2250 Orang		Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS SOSIAL
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial					
Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang		Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS SOSIAL
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota					
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah DTKS yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	69141 Orang		Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS SOSIAL
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Santunan Kematian	0 Keluarga 232 Keluarga		Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS SOSIAL
PROGRAM PENANGANAN BENCANA					



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023

Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota					
Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS SOSIAL	
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota					
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Tagana yang terakomodir	28 Orang	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS SOSIAL	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100 Persen			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terciptanya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi dinas yang baik	100 Persen			
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perangkat daerah yang dibuat	3 Dokumen	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terciptanya sistem keuangan yang baik	100 Persen			
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang mendapat gaji dan tunjangan	18 Orang	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang mendapat gaji dan tunjangan	18 Orang	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen yang dibuat	4 Dokumen	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	
Administrasi Umum Perangkat Daerah					
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terciptanya pelayanan umum kantor yang baik	100 Persen			
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat listrik yang diadakan	5 Jenis	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang diadakan	45 Jenis	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah BBM yang disediakan	2000 Liter	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan / minuman yang disediakan	460 Dos	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penggandaan yang direncanakan	9800 Lembar	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah media yang diadakan	2 Media	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan yang diadakan	13 OK	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terciptanya sarana dan prasarana perkantoran yang baik	100 Persen			
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang diadakan	4 Jenis	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terciptanya pelayanan umum kantor yang baik	100 Persen			
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang diadakan	450 Lembar	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang dibayarkan	3 Jenis	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa administrasi keuangan yang dibayarkan	40 OB	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terciptanya sarana dan prasarana yang memadai	100 Persen			
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Kendaraan dinas yang diservice	1 Unit	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pajak kendaraan dinas yang dibayarkan	1 Unit	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor	6 Unit	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor	1 Unit	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	71,18 Persen			
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi	Jumlah Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	16 Orang			
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi	Jumlah kelompok yang dilatih	1 Kelompok	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Presentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten	100 Persen			
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Terciptanya pelayanan kartu pencaker yang baik	100 Persen			
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	1000 Orang	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Persentase Kasus hubungan industrial yang diselesaikan	100 Persen			
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Terciptanya peraturan tenaga kerja	1			



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023

Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota				
Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	1000 Orang	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI				
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Transmigran Yang Dibina Dan Dilatih	0 0		
Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	100 Persen		
Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	Memaksimalkan pemenuhan kebutuhan air bersih dan jalan untuk kesejahteraan masyarakat	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Jumlah Pelaporan Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang)	1 Dokumen	Memaksimalkan pemenuhan kebutuhan air bersih dan jalan untuk kesejahteraan masyarakat	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Kawasan Transmigrasi yang dikembangkan	100 Persen		
Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Terciptanya pengembangan satuan permukiman yang mandiri	1 Satuan Permukiman		
Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	1 Satuan Permukiman	Memaksimalkan pemenuhan kebutuhan air bersih dan jalan untuk kesejahteraan masyarakat	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				
Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota				
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota			Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota				
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Layanan	Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta Optimalisasi percepatan penurunan Stunting	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta Optimalisasi percepatan penurunan Stunting	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta Optimalisasi percepatan penurunan Stunting	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Layanan	Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta Optimalisasi percepatan penurunan Stunting	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta Optimalisasi percepatan penurunan Stunting Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta Optimalisasi percepatan penurunan Stunting	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta Optimalisasi percepatan penurunan Stunting	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Administrasi Umum Perangkat Daerah				
Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta Optimalisasi percepatan penurunan Stunting	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta Optimalisasi percepatan penurunan Stunting	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta Optimalisasi percepatan penurunan Stunting	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta Optimalisasi percepatan penurunan Stunting	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta Optimalisasi percepatan penurunan Stunting	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta Optimalisasi percepatan penurunan Stunting	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta Optimalisasi percepatan penurunan Stunting	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta Optimalisasi percepatan penurunan Stunting	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)				
Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	1 Laporan	Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta Optimalisasi percepatan penurunan Stunting	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				
Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	1 Laporan	Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta Optimalisasi percepatan penurunan Stunting	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga				



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPD)
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023

Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Masyarakat dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Masyarakat dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Organisasi	Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta Optimalisasi percepatan penurunan Stunting	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100 Persen		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan yang Dihasilkan	3 Dokumen		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Yang direncanakan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Dokumen 0 Dokumen	Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta Optimalisasi percepatan penurunan Stunting	DINAS KETAHANAN PANGAN
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang Menerima Gaji dan Tunjangan dan ASN yang Melaksanakan Tugas	34 Orang		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan Yang Digunakan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Pegawai 20 Orang/bul	Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta Optimalisasi percepatan penurunan Stunting	DINAS KETAHANAN PANGAN
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Tunjangan Yang Direncanakan	1 Tahun 1 Tahun	Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta Optimalisasi percepatan penurunan Stunting	DINAS KETAHANAN PANGAN
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang Mengikuti Pelatihan	3 Orang		
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Pelatihan	0 Orang 3 Orang 3 Orang	Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta Optimalisasi percepatan penurunan Stunting	DINAS KETAHANAN PANGAN
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Cetak yang dicapai Jumlah Logistik Jumlah Media yang Yang capai Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan konsultasi Jumlah Perlengkapan Peralatan kantor	2 Jenis 2512 Dos/Lite 2 media 110 OT 5 jenis		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0 Paket 2 Jenis	Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta Optimalisasi percepatan penurunan Stunting	DINAS KETAHANAN PANGAN
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah BBM Operasional yang direncanakan Jumlah Makan dan Minum Yang direncanakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2000 Liter 400 Dos 0 Paket	Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta Optimalisasi percepatan penurunan Stunting	DINAS KETAHANAN PANGAN
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Jenis	Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta Optimalisasi percepatan penurunan Stunting	DINAS KETAHANAN PANGAN
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah surat Kabar yang direncanakan	0 Dokumen 2 Media	Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta Optimalisasi percepatan penurunan Stunting	DINAS KETAHANAN PANGAN
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Peserta Perjalanan Dinas Yang di Rencanakaan	0 Laporan 169 OK	Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta Optimalisasi percepatan penurunan Stunting	DINAS KETAHANAN PANGAN
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa yang Digunakan, Jasa Pelayanan yang Dibayarkan dan Materi	e3m9b8aJrenis/Or a		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Materi yang direncanakan	0 Laporan 500 Lembar	Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta Optimalisasi percepatan penurunan Stunting	DINAS KETAHANAN PANGAN
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa komunikasi,Air dan Listrik yang direncanakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Jenis 0 Laporan	Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta Optimalisasi percepatan penurunan Stunting	DINAS KETAHANAN PANGAN
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Kegiatan Yang dibayarkan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	32 Orang 0 Laporan	Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta Optimalisasi percepatan penurunan Stunting	DINAS KETAHANAN PANGAN
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasioanl	1 Unit		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Pemeliharaan Kendaraan dinas yang direncanakan	0 Unit 2 Unit	Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta Optimalisasi percepatan penurunan Stunting	DINAS KETAHANAN PANGAN
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Penyediaan Sarana pada Daerah Rawan Pangan	263,1 Persen		
Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur Pendukung Lumbung Pangan dan Lantai Jemur	gSiaUtannit/Paket/		
Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	3 Kegiatan	Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta Optimalisasi percepatan penurunan Stunting	DINAS KETAHANAN PANGAN
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Presentase Ketersediaan Pangan	100 Persen		
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan				
Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia Jumlah Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat	0 Unit 1 Kegiatan	Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta Optimalisasi percepatan penurunan Stunting	DINAS KETAHANAN PANGAN
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah yang Disediakan	15 Ton		
Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Pasokan Yang direncanakan	0 Ton 47961 Kg	Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta Optimalisasi percepatan penurunan Stunting	DINAS KETAHANAN PANGAN
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Pangan Lokal yang Dipromosikan dan Jumlah Kelompok Penerima Manfaat Pekarangan Gizi	m1p3okegiatan/ K		



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPD)
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023

Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	13 Kegiatan	Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta Optimalisasi percepatan penurunan Stunting	DINAS KETAHANAN PANGAN
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Presentase Daerah Rentan Rawan Pangan yang ditangani	75,13 Persen		
Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah Laporan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang di Laporkan	2 Dokumen		
Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	0 Dokumen 2 Dokumen	Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta Optimalisasi percepatan penurunan Stunting	DINAS KETAHANAN PANGAN
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Cakupan Pengawasan Keamanan Pangan	75,13 Persen		
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu Keamanan Pangan dan Laporan yang Disediakan	Kegiatan/Paket		
Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta Optimalisasi percepatan penurunan Stunting	DINAS KETAHANAN PANGAN
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100 Persen		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tertindakannya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	1		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertindakannya administrasi keuangan perangkat daerah	1		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/bul	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertindakannya administrasi kepegawaian perangkat daerah	1		
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi umum perangkat daerah	1		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14 Laporan	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tertindakannya pengadaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah	1		
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	1		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	200 Laporan	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10 Laporan	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertindakannya BMD penunjang urusan pemerintah daerah	1		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten	DINAS LINGKUNGAN HIDUP



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	Banggai Kepulauan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	"Persentase Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup"	100 Persen		
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Terlaksananya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten	1		
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 Dokumen	Memaksimalkan pemenuhan kebutuhan air bersih dan jalan untuk kesejahteraan masyarakat	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	Memaksimalkan pemenuhan kebutuhan air bersih dan jalan untuk kesejahteraan masyarakat	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	1 Dokumen	Memaksimalkan pemenuhan kebutuhan air bersih dan jalan untuk kesejahteraan masyarakat	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	100 Persen		
Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan keaneekaragaman hayati kabupaten	1		
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	5.2 Ha	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Salakan dan Penataan Kawasan Ibukota	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Pengelolaan Taman Keaneekaragaman Hayati Lainnya	Luas Taman KEHATI Lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	214.91 Ha	Memaksimalkan pemenuhan kebutuhan air bersih dan jalan untuk kesejahteraan masyarakat	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LIMBAH B3) yang dikendalikan	100 Persen		
Penyimpanan sementara Limbah B3	Terlaksananya penyimpanan sementara Limbah B3	1		
Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Perseujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	1 Laporan	Memaksimalkan pemenuhan kebutuhan air bersih dan jalan untuk kesejahteraan masyarakat	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	"Persentase pemenuhan ketentuan pengelolaan lingkungan terhadap izin lingkungan dan IPLH yang diterbitkan"	100 Persen		
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha yang diawasi	1		
Facilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	15 Dokumen	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD	6 Dokumen	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase data dan informasi MHA serta jenis kearifan lokal yang diakui	100 Persen		
Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Terbentuknya Panitia Penentuan MHA	1		
Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	1 Dokumen	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	"Persentase Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat"	100 Persen		
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pendampingan dan pembimbingan terkait Sekolah Adiwiyata	1		
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	1 Lembaga	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengelolaan Sampah di wilayah Kabupaten	100 Persen		
Pengelolaan Sampah	Tersedianya prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	1		
Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Dialah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	6739 Ton	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Salakan dan Penataan Kawasan Ibukota	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan	12 Bulan	Optimalisasi Pelayanan Publik	DINAS



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/bula	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0 Dokumen 2 Dokumen	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Administrasi Umum Perangkat Daerah				
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	tersedianya komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan 12 Bulan	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	14546 Lemba	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	700 buah	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan tersedianya jasa pelayanan kantor	12 Bulan 12 Bulan	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 unit	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 jenis	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				
Pelayanan Pendaftaran Penduduk				
Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	2 Laporan	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Penataan Pendaftaran Penduduk				
Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	0 Dokumen	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk				
Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	0 Dokumen	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROGRAM PENCATATAN SIPIL				
Pelayanan Pencatatan Sipil				
Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	1 Layanan	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				
Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	0 Laporan	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	1 Dokumen	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN				
Penyusunan Profil Kependudukan				
Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	1 Dokumen	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100 Persen		



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang direncanakan	3 Dokumen	Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta Optimalisasi percepatan penurunan Stunting	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan yang direncanakan	1 Tahun		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta Optimalisasi percepatan penurunan Stunting	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Tambahan Penghasilan ASN	1 Tahun	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor	1		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang direncanakan	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang direncanakan	2 Jenis	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang direncanakan	2 Jenis	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang direncanakan	2 Jenis	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Media dan Iklan yang direncanakan	2 Media	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang direncanakan	22 OK	Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta Optimalisasi percepatan penurunan Stunting	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	1		
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta Optimalisasi percepatan penurunan Stunting	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang direncanakan	523 Lembar	Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta Optimalisasi percepatan penurunan Stunting	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang direncanakan	3 Jenis	Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta Optimalisasi percepatan penurunan Stunting	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang direncanakan	33 OB	Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta Optimalisasi percepatan penurunan Stunting	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	1		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan yang direncanakan	1 Unit	Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta Optimalisasi percepatan penurunan Stunting	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Administrasi Pemerintahan Desa yang Tertib, Transparan dan Akuntabel	100 Persen		
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Penataan Pengelolaan Pemerintah Desa yang Baik	1		
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Produk Hukum Desa yang direncanakan	4 Dokumen	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	2 Dokumen	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Peningkatan Pengelolaan Keuangan Desa yang direncanakan	141 Desa	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Orang yang mengikuti Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	423 Orang	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa yang direncanakan	1 Kegiatan	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Meningkatnya Partisipasi dan Swadaya Masyarakat dalam Membangun Desa	12 Desa	Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta Optimalisasi percepatan penurunan Stunting	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	50 Persen		
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga Kemasyarakatan Desa	1		
Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Inventarisir Desa Adat yang direncanakan	141 Desa	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang direncanakan	141 Desa	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan	Jumlah Kegiatan Pemanfaatan Teknologi Tepat	1 Kegiatan	Optimalisasi Pelayanan Publik	DINAS



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023

Teknologi Tepat Guna	Guna yang direncanakan		dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Pelaksanaan 10 Program PKK yang direncanakan	141 Desa	Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta Optimalisasi percepatan penurunan Stunting	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100 Persen		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya perencanaan penganggaran dan evaluasi perangkat Daerah	100 Dokumen		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan anggaran pendapatan dan belanja	100 Laporan		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan	28 Orang/Bul	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PERHUBUNGAN
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Tambahan Penghasilan (TPP)	1 Dokumen	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Salakan dan Penataan Kawasan Ibukota	DINAS PERHUBUNGAN
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Adminstrasi Umum perangkat daerah	100 Dokumen		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi bangunan kantor	1 Paket	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Salakan dan Penataan Kawasan Ibukota	DINAS PERHUBUNGAN
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat tulis kantor (ATK)	1 Paket	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Salakan dan Penataan Kawasan Ibukota	DINAS PERHUBUNGAN
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Salakan dan Penataan Kawasan Ibukota	DINAS PERHUBUNGAN
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Salakan dan Penataan Kawasan Ibukota	DINAS PERHUBUNGAN
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Salakan dan Penataan Kawasan Ibukota	DINAS PERHUBUNGAN
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Salakan dan Penataan Kawasan Ibukota	DINAS PERHUBUNGAN
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa penunjang urusan Pemerintah daerah	100 Laporan		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10 Laporan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Salakan dan Penataan Kawasan Ibukota	DINAS PERHUBUNGAN
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Salakan dan Penataan Kawasan Ibukota	DINAS PERHUBUNGAN
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Salakan dan Penataan Kawasan Ibukota	DINAS PERHUBUNGAN
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Salakan dan Penataan Kawasan Ibukota	DINAS PERHUBUNGAN
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah daerah	100 Unit		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Salakan dan Penataan Kawasan Ibukota	DINAS PERHUBUNGAN
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Salakan dan Penataan Kawasan Ibukota	DINAS PERHUBUNGAN
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya pemeliharaan/Rehab gedung kantor	1 Paket	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Salakan dan Penataan Kawasan Ibukota	DINAS PERHUBUNGAN
Penataan Organisasi				
Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Terlaksananya monitoring evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tata laksana	100 Laporan		
Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Salakan dan Penataan Kawasan Ibukota	DINAS PERHUBUNGAN
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Tingkat Kelancaran Keamanan dan Keselamatan bagi Pengguna Jalan	100 Persen		
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah unit penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota	100 Unit/Kwh		
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	3 Paket	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Salakan dan Penataan Kawasan Ibukota	DINAS PERHUBUNGAN
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C				
Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Jumlah SDM Pengelola Terminal Tipe C yang Ditingkatkan Kapasitasnya	100 Orang/U		
Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Jumlah SDM Pengelola Terminal Tipe C yang Ditingkatkan Kapasitasnya	47 Orang/Bul	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Salakan dan Penataan Kawasan Ibukota	DINAS PERHUBUNGAN
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Terciptanya Kelancaran, Ketertiban Keamanan dan Keselamatan Lalulintas dan Angkutan Jalan	1 Tahun		
Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2 Laporan		DINAS PERHUBUNGAN



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023

Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Pembangunan LPJU Tenaga Surya Dalam Kota	1 Paket	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Salakan dan Penataan Kawasan Ibukota	DINAS PERHUBUNGAN
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Presentase Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut yg laik fungsi	100 Persen		
Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Terlaksananya pembangunan pelabuhan pengumpan lokal	100 Paket		
Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Tersedianya Pemeliharaan Pelabuhan/Dermaga Pengumpan Lokal. Tersedianya Petugas Retribusi	3 Paket 25 Orang/Bul	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Salakan dan Penataan Kawasan Ibukota	DINAS PERHUBUNGAN
Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Pemeliharaan Pelabuhan Lokal (Dermaga Tobing)	9 Paket	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Salakan dan Penataan Kawasan Ibukota	DINAS PERHUBUNGAN
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100 Persen		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan yang dihasilkan	100 Persen		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen LAKIP, RANWAL RENJA, RANCANGAN AKHIR , RKA, DPA, RKAP, DPPA yang direncanakan	7 dokumen	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	100 Persen		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah administrasi kepegawaian yang direncanakan	100 Persen		
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Mengikuti Pendidikan & Pelatihan PIM II, III & IV yang direncanakan	1 orang	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan administrasi umum yang direncanakan	100 Persen		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan pengadaan barang milik daerah yang direncanakan	100 persen		
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan jasa penunjang urusan pemerintah yang direncanakan	100 Persen		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah yang direncanakan	100 Persen		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Presentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan kominfo	100 Persen		
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan informasi dan komunikasi publik	6 Kegiatan		
Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	1 Dokumen	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023

			Banggai Kepulauan Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	
Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	1 Dokumen	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	1 Dokumen	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	10 Layanan	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	2 Orang	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	1 Dokumen	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Presentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100 Persen		
Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tertaksananya pengelolaan nama domain	100 Persen		
Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Pengelolaan E- government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tertaksananya pengelolaan E- government	100 Persen		
Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	1 Dokumen	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	1 Dokumen	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	3 Dokumen	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100 Persen		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel	1 Tahun		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang/bul	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	27 Dokumen	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuanga Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan La Koordinasi Penyusunan La Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme SKPD	2 Laporan	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	1 Tahun		
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Tahun		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36 Paket	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5341 Paket	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Jenis	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Media	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	22 Laporan	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Kantor	1 Tahun		
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung	DINAS PERINDUSTRIAN,



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023

			Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Tahun		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	350 Laporan	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana kantor	1 Tahun		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	"Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Kabupaten"	100 Persen		
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Persentase Koperasi yang Aktif	1 Tahun		
Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	21 Unit Usaha	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	"Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten"	100 Persen		
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya SDM Pengurus dan Pengawas dalam mengelola Koperasi	1 Tahun		
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	7 Orang	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	"Persentase jumlah anggota Koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota"	100 Persen		
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Pertumbuhan Koperasi dan Usaha Mikro	1 Tahun		
Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Unit Usaha	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	100 Persen		
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Cakupan Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	1 Tahun		
Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	1 Dokumen	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	10 Unit Usaha	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	10 Orang	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	"Persentase Sarana Distribusi yang tertata dan memadai"	100 Persen		
Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Terlaksananya Tertib Administrasi Pasar Perdesaan	1 Tahun		
Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dokumen	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	100 Persen		
Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Terkendalinya Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	1 Tahun		
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	2 Laporan	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan lainnya (UTIP) bertanda tera sah yang berlaku	100 Persen		
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera	Tersedianya Alat UTIP yang sesuai Standar	1 Tahun		



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023

Ulang, dan Pengawasan	Metrologi Legal			
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	50 Unit	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Presentase Zona kawasan Industri potensial yang telah direncanakan	50 Persen		
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Cakupan Kegiatan Perencanaan dan Pembangunan Industri	1 Tahun		
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	3 Dokumen	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase izin usaha industri yang diproses sesuai SOP	100 Persen		
Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Rekomendasi Izin Usaha Industri yang dikeluarkan	1 Tahun		
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	5 Dokumen	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Presentase industri yang teridentifikasi melalui SIINAS	50 Persen		
Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Informasi Data IKM	1 Tahun		
Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	1 Dokumen	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya pembayaran gaji yang di sediakan	1 Tahun	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terpenuhinya pembayaran tunjangan yang disediakan	1 Tahun	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
Administrasi Umum Perangkat Daerah				
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023

Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	0 Dokumen	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				
Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Dokumen	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	0 Dokumen	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota				
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Izin Usaha Berbasis Elektronik	1 Dokumen	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Peningkatan Pelayanan Pengaduan yang terintegrasi	1 Kegiatan	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terlaksananya kegiatan Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	10 Pelaku Usaha	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Dialah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 Dokumen	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEMUDAAN DAN OLAHRAGA				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100 Persen		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan yang Direncanakan	1 Tahun		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	1 Tahun		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN	1 Tahun		
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya kinerja aparatur	2 Jenis		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Rapat koordinasi /konsultasi luar daerah	16 OK		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya ATK dan Bahan Kebersihan Kantor	39 Unit		
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya bahan bacaan	12 Media		
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya BBM dan Makan Minum	2 Jenis		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket		
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya ATK dan Bahan Kebersihan Kantor	39 Unit		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Jenis		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun		
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan		
	Penyediaan Peralatan yang Direncanakan	1 Unit		
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		
	Meningkatnya kinerja aparatur	3 Jenis		
	Meningkatnya kinerja aparatur sipil negara	35 OB		
	Meningkatnya pelayanan administrasi kantor	500 Lembar		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun		



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Laporan 1 Tahun	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	35 Laporan 1 Tahun	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kinerja aparatur Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor	4 Unit 11 Unit		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Unit 1 Tahun	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0 Unit 5 Unit 1 Tahun	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEMUDAAN	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	13 Orang 0 0		
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Peningkatan kepemimpinan, kepeloporan dan kesukarelawan pemuda	13 Orang		
Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	13 Orang 1 Tahun	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan yang Direncanakan	1 Kegiatan		
Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	1 Dokumen	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Sarana dan Prasarana Olah Raga yang Berstandarasi Terlaksananya Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	0 0 19 Peserta		
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Partisipasi dan keikutsertaan dalam penyelenggaraan kejuaraan Terlaksananya penyelenggaraan kejuaraan dan pekan olahraga tingkat kabupaten/kota	1 Kegiatan 3 Kegiatan		
Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	19 Orang 1 Tahun	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan yang Direncanakan	2 Kegiatan		
Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	5 Pelatda	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	4 Orang	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Kegiatan yang Direncanakan	1 Kegiatan		
Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	0 Organisasi 20 Organisasi	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Kegiatan yang Direncanakan	1 Kegiatan		
Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi Terlaksananya penyelenggaraan, pengembangan dan pemasaran festival dan olahraga rekreasi	0 Dokumen 1 Kegiatan	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Jumlah Kegiatan pramuka yang difasilitasi	100 Persen		
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Peningkatan kapasitas organisasi kepramukaan tingkat daerah	1 Tahun		
Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Adanya dana hibah untuk Kwarcab Kab. Banggai Kepulauan Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	1 Tahun 0 Organisasi	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
PERENCANAAN				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100 Persen		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya dan Mengembangnya Pengelolaan Keuangan Daerah	1		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bul	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	420 Dokumen	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1		
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	16 Orang	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Kegiatan Administrasi Perkantoran	1		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	70 Dokumen	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	165 Laporan	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	1		
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 Unit	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	14 Unit	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	208 Laporan	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	87 Laporan	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	28 Unit		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 Unit	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	"Persentase penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang tepat waktu, tepat proses dan tepat isi"	100 Persen		
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan yang ditelapkan dalam Peraturan Perundangan	17 Dokumen		
Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	1 Dokumen	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN



Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara		PENGEMBANGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	12 Usulan	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perenca Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD)	1 Dokumen	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Data dan Informasi Pembangunan Daerah yang ditindaklanjuti	3 Laporan		
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	51 Orang	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	3 Dokumen		
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	3 Laporan	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Renja PD Mitra Yang Di Susun Tepat Waktu, Tepat Proses Dan Tepat Isi	100 Persen		
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Program Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang tercapai	1		
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta Optimalisasi percepatan penurunan Stunting	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	9 Laporan	Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta Optimalisasi percepatan penurunan Stunting	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta Optimalisasi percepatan penurunan Stunting	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	11 Laporan	Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta Optimalisasi percepatan penurunan Stunting	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta Optimalisasi percepatan penurunan Stunting	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta Optimalisasi percepatan penurunan Stunting	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Program Perangkat Daerah Mitra Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam yang tercapai	1		
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	5 Laporan	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023

Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Program Perangkat Daerah Mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang tercapai	1		
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	1 Dokumen	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Salakan dan Penataan Kawasan Ibukota	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	6 Laporan	Memaksimalkan pemenuhan kebutuhan air bersih dan jalan untuk kesejahteraan masyarakat	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	Memaksimalkan pemenuhan kebutuhan air bersih dan jalan untuk kesejahteraan masyarakat	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPd/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Salakan dan Penataan Kawasan Ibukota	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	1 Dokumen	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Salakan dan Penataan Kawasan Ibukota	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	12 Laporan	Memaksimalkan pemenuhan kebutuhan air bersih dan jalan untuk kesejahteraan masyarakat	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	"Persentase Hasil kelitbang yang ditindaklanjuti/dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah"	0 0		
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang disusun	1 Laporan		
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	1 Laporan	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	1 Dokumen		
Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1 Dokumen	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	1 Dokumen	Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta Optimalisasi percepatan penurunan Stunting	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Laporan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	2 Laporan		
Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	2 Laporan	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100 Persen		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun tepat waktu dan sesuai aturan	1		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan keuangan daerah yang tersusun tepat waktu dan sesuai aturan	1		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/bul	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Tersedianya tunjangan perbaikan penghasilan ASN	11 Dokumen 28 OB	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuanga Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan La Koordinasi Penyusunan La Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme SKPD	4 Laporan	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat partisipasi perangkat daerah dalam agenda Pemerintah daerah	1 Kegiatan		
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	4 Orang	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kecukupan pelayanan perkantoran	1		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPD)
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	0 Dokumen 3 Media	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kecukupan pelayanan perkantoran	1		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	150 Laporan	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan 37 OB	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemeliharaan rutin sarana dan prasarana kantor	13 Unit		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase ketermanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	83,09 Persen		
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan layanan perpustakaan	1		
Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management) Terlaksananya Layanan Kerja Sama dan Otomasi	2 Layanan 1 Kegiatan	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	40 Perpustakaan	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	2 Perpustakaan	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	6 Orang	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	1 Layanan	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	813 Eksempla	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	1		
Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	3 Orang	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	8 Perpustakaan	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya	3 Orang	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	"tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban"	100 Persen		
Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah simpul jaringan informasi kearsipan	4 Laporan		
Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	4 Laporan	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Cakupan Pencarian Arsip Statis yang dinyatakan Hilang	1		
Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Arsip Statis Kabupaten/Kota yang dinyatakan Hilang	1		
Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Ditinjau dan Ditetapkan	2 Arsip	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023

			Banggai Kepulauan	
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen yang direncanakan	4 Dokumen	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PERIKANAN
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		DINAS PERIKANAN
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang direncanakan	1 Tahun	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PERIKANAN
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang direncanakan	1 Tahun	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PERIKANAN
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen yang direncanakan	2 Dokumen	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PERIKANAN
Administrasi Umum Perangkat Daerah				
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang direncanakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Jenis 12 Paket	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PERIKANAN
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Bakar Minyak Kantor yang direncanakan jumlah Makan Minum Kantor yang direncanakan	5655 Liter 1572 Dos	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PERIKANAN
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetak, Spanduk dan Foto Copy yang direncanakan	20045 Lemba	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PERIKANAN
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Bahan Bacaan yang direncanakan	4 Media	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PERIKANAN
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Peserta Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah yang direncanakan Jumlah Peserta Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah yang direncanakan	56 OK 16 OK	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PERIKANAN
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor yang direncanakan	3 Unit	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PERIKANAN
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai Kantor yang direncanakan	500 Lembar	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PERIKANAN
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Kantor yang direncanakan	4 Jenis	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PERIKANAN
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Alat/Bahan Kegiatan Kantor yang Disediakan Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang dibayarkan	19 item 48 Orang	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PERIKANAN
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Kantor Yang Mendapat Pemeliharaan	3 Mobil	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PERIKANAN
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Kantor yang mendapat Pemeliharaan	16 Unit	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PERIKANAN
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP				
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Pengelolaan Perikanan Tangkap	100 Persen		
Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PERIKANAN
Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sasaran Prasarana Yang Diadakan	7 Kelompok	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PERIKANAN
Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota				
Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	1124 Orang	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PERIKANAN
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				
Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Cakupan Pengelolaan Perikanan Budidaya	100 Persen		
Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	0 Kelompok	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PERIKANAN
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan				
Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PERIKANAN
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok yang mendapat bantuan Sarana Dan Prasarana Yang Direncanakan	4 Kelompok	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PERIKANAN



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023

Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PERIKANAN
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Cakupan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	100 Persen		
Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota				
Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PERIKANAN
Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Yang di Rencanakan	4 Unit	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PERIKANAN
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100 Persen		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	1		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah peserta koordinasi dan sinkronisasi yang direncanakan	20 OK	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PARIWISATA
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Perangkat Daerah	1		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan PNS yang direncanakan	12 Bulan	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PARIWISATA
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pengelola Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang direncanakan	16 Orang	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PARIWISATA
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Kegiatan	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PARIWISATA
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 Paket	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PARIWISATA
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Bahan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang direncanakan	3 Jenis	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PARIWISATA
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Kegiatan	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PARIWISATA
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Kegiatan	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PARIWISATA
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Jenis	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PARIWISATA
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	1 Kegiatan	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PARIWISATA
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Kegiatan	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PARIWISATA
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3 Unit		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PARIWISATA
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PARIWISATA
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	"Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan wisatawan Mancanegara dan Wisatawan Nusanantara"	100 Persen		
Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Daya Tarik Pariwisata	1		
Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rinlisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	1 Kegiatan	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PARIWISATA
Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Kawasan Strategis Pariwisata	1		



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023

Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PARIWISATA
Pengadaan/Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Kegiatan 0 Unit	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PARIWISATA
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dal Pengelolaan Destinasi Par Kabupaten/Kota yang dir	1 Kegiatan		
Pengadaan/Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	1 Kegiatan	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PARIWISATA
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	2 Kegiatan	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PARIWISATA
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Laporan	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PARIWISATA
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Pemasaran Produk Parawisata didalam dan Luar Negeri	100 Persen		
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	1		
Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	0 Dokumen	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PARIWISATA
Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kegiatan	4 Kegiatan	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PARIWISATA
Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Paket	1 Paket	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PARIWISATA
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Peningkatan Kualitas Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	100 Persen		
Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Prasarana (zona kreatif/ruang kreatif)	3 kegiatan		
Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia	0 Unit	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PARIWISATA
Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Terpenuhinya Ekosistem Ekonomi Kreatif	100 persen		
Fasilitasi Kekayaan Intelektual	jumlah kegiatan	1 kegiatan	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PARIWISATA
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Peningkatan Nilai Tambah Pelaku Ekonomi Kreatif	1 Dokumen		
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Kegiatan	1 Kegiatan		
Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	jumlah kegiatan	1 kegiatan	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PARIWISATA
Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	0 Laporan	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PARIWISATA
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PERTANIAN
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		DINAS PERTANIAN
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang direncanakan	1 Tahun	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PERTANIAN
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang direncanakan	1 Tahun	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PERTANIAN
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PERTANIAN
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Kegiatan Pendidikan dan pelatihan Pegawai yang direncanakan	4 Orang		
			Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PERTANIAN
Administrasi Umum Perangkat Daerah				
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PERTANIAN
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PERTANIAN
Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Optimalisasi Pelayanan Publik	DINAS PERTANIAN



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023

				dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PERTANIAN
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PERTANIAN
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PERTANIAN
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
Penyediaan Jasa Surat Menyurat				Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PERTANIAN
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PERTANIAN
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PERTANIAN
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PERTANIAN
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PERTANIAN
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PERTANIAN
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Produksi Pertanian	100 Persen			
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Benih Bibit Temak sapi Yang Direncanakan	36 Ekor			
Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Kegiatan yang direncanakan Jumlah Komoditi yang direncanakan	1 Kegiatan 3 Komoditi		Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PERTANIAN
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Prasarana Pertanian Yang Digunakan	100 Persen			
Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu yang diadakan	2 Paket			
Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B				Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PERTANIAN
Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Kegiatan yang direncanakan Sarana dan Prasarana Pertanian Yang direncanakan	1 Kegiatan 1 Paket		Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PERTANIAN
Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari tertentu yang diadakan	7 Unit/Paket			
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah Tempat Pemotongan Hewan yang direncanakan	3 Unit		Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PERTANIAN
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN					
Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota					
Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	2 Laporan		Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PERTANIAN
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Pendampingan Penyuluhan Terhadap Pelaksanaan Intervensi Kegiatan Pemberdayaan Bagi Petani	100 Persen			
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kegiatan Penyuluhan Pertanian	3 Kegiatan		Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PERTANIAN
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa				Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PERTANIAN
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa				Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PERTANIAN
Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian				Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS PERTANIAN
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					
SEKRETARIAT DAERAH					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen 1 Tahun			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan	1			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun		Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	SEKRETARIAT DAERAH
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Tahun		Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	SEKRETARIAT DAERAH
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuanga Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan La Koordinasi Penyusunan La Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme SKPD	1 Laporan		Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	SEKRETARIAT DAERAH
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatkan Disiplin Aparatur	3 Kegiatan			
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang		Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten	SEKRETARIAT DAERAH



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPD)
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023

BANGGAI KEPULAUAN				
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Umum	7 Kegiatan		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	SEKRETARIAT DAERAH
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Kegiatan	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	SEKRETARIAT DAERAH
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Kegiatan	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	SEKRETARIAT DAERAH
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	SEKRETARIAT DAERAH
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	SEKRETARIAT DAERAH
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Tahun	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	SEKRETARIAT DAERAH
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	1		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat Yang Direncanakan	1000 Lembar	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	SEKRETARIAT DAERAH
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Tahun	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	SEKRETARIAT DAERAH
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Tahun	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	SEKRETARIAT DAERAH
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	1		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Tahun	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	SEKRETARIAT DAERAH
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Tahun	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	SEKRETARIAT DAERAH
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	37 Unit	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	SEKRETARIAT DAERAH
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Paket	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	SEKRETARIAT DAERAH
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terpenuhinya dana Kebutuhan Operasional	3 Kegiatan		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1 Tahun	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	SEKRETARIAT DAERAH
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	3 Stel	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	SEKRETARIAT DAERAH
Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1 Tahun	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	SEKRETARIAT DAERAH
Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0 Orang/Bula	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	SEKRETARIAT DAERAH
Fasilitas Kerumah-tanggaan Sekretariat Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan kerumah-tanggaan Kepala Daerah	3 Kegiatan		
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	1 Tahun	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	SEKRETARIAT DAERAH
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				
SEKRETARIAT DAERAH				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Renstra, Renja, RKA dan DPA	1		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Pelayanan Administrasi Kantor yang direncanakan	6 Sub.Kegiatan		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36 Jenis	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	SEKRETARIAT DAERAH
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	SEKRETARIAT DAERAH
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	SEKRETARIAT DAERAH
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	SEKRETARIAT DAERAH
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	SEKRETARIAT DAERAH
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	13 Laporan	Optimalisasi Pelayanan Publik	SEKRETARIAT



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023

SKPD	Koordinasi dan Konsultasi SKPD		dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DAERAH
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sub.Kegiatan yang direncanakan	3 Sub.Kegiatan		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang disediakan	280 Lembar	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	SEKRETARIAT DAERAH
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	SEKRETARIAT DAERAH
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	25 OB	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	SEKRETARIAT DAERAH
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sub.Kegiatan yang direncanakan	2 Sub.Kegiatan		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	SEKRETARIAT DAERAH
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	SEKRETARIAT DAERAH
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Terlaksananya Kegiatan Kebijakan Perekonomian	1		
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah Sub.Kegiatan yang direncanakan	3 Sub.Kegiatan		
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2 Dokumen	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	SEKRETARIAT DAERAH
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	17 Laporan	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	SEKRETARIAT DAERAH
Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	12 Dokumen	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	SEKRETARIAT DAERAH
Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Terlaksananya Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi Pendistribusian BBM dan Gas	12 Kecamatan		
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air	4 Dokumen	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	SEKRETARIAT DAERAH
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				
SEKRETARIAT DAERAH				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Administrasi Umum Yang Tersedia	1 Kegiatan		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	4 Kegiatan		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	32 Paket	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	SEKRETARIAT DAERAH
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	800 Paket	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	SEKRETARIAT DAERAH
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	SEKRETARIAT DAERAH
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	3 Dokumen	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	SEKRETARIAT DAERAH
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana & Prasarana Aparatur Bagian Pengadaan barang dan jasa	2 Kegiatan		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan		SEKRETARIAT DAERAH
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	35 Laporan	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	SEKRETARIAT DAERAH
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2023	Daerah	
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Jumlah Kegiatan Program Perekonomian Dan Pembangunan Yang Direncanakan	1 Kegiatan		
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah kegiatan administrasi perkantoran	3 Kegiatan		
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dokumen	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	SEKRETARIAT DAERAH
Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1 Dokumen	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	SEKRETARIAT DAERAH
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Kegiatan	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	SEKRETARIAT DAERAH
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				
SEKRETARIAT DAERAH				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100 Persen		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan	2 Kegiatan		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	Memaksimalkan pemenuhan kebutuhan air bersih dan jalan untuk kesejahteraan masyarakat	SEKRETARIAT DAERAH
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatkan Disiplin Aparatur	3 Kegiatan		
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	Memaksimalkan pemenuhan kebutuhan air bersih dan jalan untuk kesejahteraan masyarakat	SEKRETARIAT DAERAH
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Umum	7 Kegiatan		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	19 Paket	Memaksimalkan pemenuhan kebutuhan air bersih dan jalan	SEKRETARIAT DAERAH



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPD)
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023

Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	untuk kesejahteraan masyarakat Memaksimalkan pemenuhan kebutuhan air bersih dan jalan untuk kesejahteraan masyarakat	SEKRETARIAT DAERAH
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Memaksimalkan pemenuhan kebutuhan air bersih dan jalan untuk kesejahteraan masyarakat	SEKRETARIAT DAERAH
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	Memaksimalkan pemenuhan kebutuhan air bersih dan jalan untuk kesejahteraan masyarakat	SEKRETARIAT DAERAH
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 Laporan	Memaksimalkan pemenuhan kebutuhan air bersih dan jalan untuk kesejahteraan masyarakat	SEKRETARIAT DAERAH
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	1		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	291 Lembar	Memaksimalkan pemenuhan kebutuhan air bersih dan jalan untuk kesejahteraan masyarakat	SEKRETARIAT DAERAH
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Jenis	Memaksimalkan pemenuhan kebutuhan air bersih dan jalan untuk kesejahteraan masyarakat	SEKRETARIAT DAERAH
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	20 Orang	Memaksimalkan pemenuhan kebutuhan air bersih dan jalan untuk kesejahteraan masyarakat	SEKRETARIAT DAERAH
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	1		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	1 Unit	Memaksimalkan pemenuhan kebutuhan air bersih dan jalan untuk kesejahteraan masyarakat	SEKRETARIAT DAERAH
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 Unit	Memaksimalkan pemenuhan kebutuhan air bersih dan jalan untuk kesejahteraan masyarakat	SEKRETARIAT DAERAH
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	"Persentase Fasilitas dan koordinasi peningkatan perekonomian rakyat"	100 Persen		
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Terlaksananya administrasi Pembangunan	3 Kegiatan		
Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	5 Dokumen	Memaksimalkan pemenuhan kebutuhan air bersih dan jalan untuk kesejahteraan masyarakat	SEKRETARIAT DAERAH
Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	4 Laporan	Memaksimalkan pemenuhan kebutuhan air bersih dan jalan untuk kesejahteraan masyarakat	SEKRETARIAT DAERAH
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	4 Laporan	Memaksimalkan pemenuhan kebutuhan air bersih dan jalan untuk kesejahteraan masyarakat	SEKRETARIAT DAERAH
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				
SEKRETARIAT DAERAH				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan fungsi	1 Orang 1 OK		SEKRETARIAT DAERAH
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	200 Orang 2 Kecamatan		SEKRETARIAT DAERAH
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang 5 OK		SEKRETARIAT DAERAH
Administrasi Umum Perangkat Daerah				
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 Paket 32 Jenis		SEKRETARIAT DAERAH
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Tersedianya BBM Tersedianya Makanan dan Minuman	2 Paket 2400 Liter 384 Dos	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Salakan dan Penataan Kawasan Ibukota	SEKRETARIAT DAERAH
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Tersedianya Barang Cetak Tersedianya Penggandaan	2 Paket 500 Buah 30000 Lembar	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Salakan dan Penataan Kawasan Ibukota	SEKRETARIAT DAERAH
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Peserta Perjalanan Dinas yang direncanakan	1 Laporan 8 OK		SEKRETARIAT DAERAH
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Tersedianya Mebel	2 Unit 2 Jenis		SEKRETARIAT DAERAH
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Tersedianya Peralatan dan Mesin lainnya	4 Unit 4 Jenis	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Salakan dan Penataan Kawasan Ibukota	SEKRETARIAT DAERAH
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya Penyediaan Materi	1 Laporan 1500 Lembar	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Salakan dan Penataan Kawasan Ibukota	SEKRETARIAT DAERAH
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan 3 Jenis	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Salakan dan Penataan Kawasan Ibukota	SEKRETARIAT DAERAH
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan 18 OK		SEKRETARIAT DAERAH
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau	4 Unit		SEKRETARIAT



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPD)
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023

Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4 Unit		DAERAH
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3 Unit 3 Unit	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Salakan dan Penataan Kawasan Ibukota	SEKRETARIAT DAERAH
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum				
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Daerah	3 Dokumen 3 Dokumen		SEKRETARIAT DAERAH
Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum Terlaksananya Fasilitas Bantuan Hukum	3 Kasus 3 Kasus		SEKRETARIAT DAERAH
Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	3 Dokumen 3 Dokumen		SEKRETARIAT DAERAH
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				
SEKRETARIAT DAERAH				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Administrasi Umum Perangkat Daerah				
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	SEKRETARIAT DAERAH
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	SEKRETARIAT DAERAH
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	0 Dokumen	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	SEKRETARIAT DAERAH
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	SEKRETARIAT DAERAH
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1200 Laporan	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	SEKRETARIAT DAERAH
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	SEKRETARIAT DAERAH
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	18 Laporan	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	SEKRETARIAT DAERAH
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	SEKRETARIAT DAERAH
Penataan Organisasi				
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2 Dokumen	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	SEKRETARIAT DAERAH
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 Laporan	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	SEKRETARIAT DAERAH
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	SEKRETARIAT DAERAH
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				
SEKRETARIAT DAERAH				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran Tersedianya Dokumen Perencanaan	100 Persen 2 Kegiatan		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	SEKRETARIAT DAERAH
Administrasi Umum Perangkat Daerah				
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Umum Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Kegiatan 6 jenis	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	SEKRETARIAT DAERAH
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Jenis	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	SEKRETARIAT DAERAH
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 jenis	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	SEKRETARIAT DAERAH
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	64 OK	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	SEKRETARIAT DAERAH
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 1 Unit	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung	SEKRETARIAT DAERAH



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023

			Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	1		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	300 Lembar	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	SEKRETARIAT DAERAH
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jaringan Telepon/Internet/Vaksimil	2 Jenis	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	SEKRETARIAT DAERAH
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	30 OK	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	SEKRETARIAT DAERAH
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Aset Kantor Yang di Pelihara	1 Unit		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	SEKRETARIAT DAERAH
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	SEKRETARIAT DAERAH
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama	100 Persen		
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya Kegiatan Kesejahteraan Masyarakat	15 Kegiatan		
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	15 Kegiatan	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	SEKRETARIAT DAERAH
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	4 Dokumen	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	SEKRETARIAT DAERAH
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	2 Kegiatan	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	SEKRETARIAT DAERAH
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				
SEKRETARIAT DAERAH				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	21 Jenis		SEKRETARIAT DAERAH
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	12 Jenis		SEKRETARIAT DAERAH
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Bakar Minyak Kendaraan Oproasional Kantor Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat Kantor	1500 Liter 600 Dos		SEKRETARIAT DAERAH
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Dokumen Yang digandakan Jumlah spanduk yang tersedia	22619 Lemba 3 Buah		SEKRETARIAT DAERAH
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Bagian Tata Pemerintahan	21 OK		SEKRETARIAT DAERAH
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang yang di Rencanakan	4 Unit		
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Printer yang direncanakan Jumlah Scanner yang direncanakan	2 Unit 2 Unit		SEKRETARIAT DAERAH
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat penyurat	450 Lembar		SEKRETARIAT DAERAH
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa Komunikasi, Air dan Listrik	1 Jenis		SEKRETARIAT DAERAH
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Meningkatnya Kesejahteraan Aparatur	23 Orang		SEKRETARIAT DAERAH
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Pemeliharaan/Berkala Kendaraan Dinas Jabatan Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Roda Empat dan Roda Dua	1 Unit 7 Unit		SEKRETARIAT DAERAH
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan kantor	10 Unit		SEKRETARIAT DAERAH
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Terlaksananya Administrasi Pemerintahan	1		
Administrasi Tata Pemerintahan	Tersedianya Dokumen LPPD Tersedianya Dokumen SPM Tersusunnya Dokumen LKPJ	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen		
Penataan Administrasi Pemerintahan	Terlaksananya penilaian evaluasi kinerja kecamatan	12 Kecamatan		SEKRETARIAT DAERAH
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Terlaksananya kegiatan Tapal Batas	1 Kegiatan		SEKRETARIAT DAERAH
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Tersedianya Dokumen LPPD Tersedianya Dokumen SPM OPD Tersedianya Dokumen LKPJ Kab. Bangkep	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen		SEKRETARIAT DAERAH
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				
SEKRETARIAT DAERAH				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	SEKRETARIAT DAERAH
Administrasi Umum Perangkat Daerah				
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	SEKRETARIAT DAERAH
Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Optimalisasi Pelayanan Publik	SEKRETARIAT



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023

			dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DAERAH
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	SEKRETARIAT DAERAH
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	SEKRETARIAT DAERAH
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	SEKRETARIAT DAERAH
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	SEKRETARIAT DAERAH
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	SEKRETARIAT DAERAH
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	SEKRETARIAT DAERAH
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	SEKRETARIAT DAERAH
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit		SEKRETARIAT DAERAH
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan				
Fasilitasi Keprotokolan			Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	SEKRETARIAT DAERAH
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				
SEKRETARIAT DPRD				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100 Persen		
	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	1		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	SEKRETARIAT DPRD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	SEKRETARIAT DPRD
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhuna kebutuhan keuangan perangkat daerah	1		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/bul	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	SEKRETARIAT DPRD
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	SEKRETARIAT DPRD
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	1		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	SEKRETARIAT DPRD
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	SEKRETARIAT DPRD
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	SEKRETARIAT DPRD
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	SEKRETARIAT DPRD
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	SEKRETARIAT DPRD
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	SEKRETARIAT DPRD
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	SEKRETARIAT DPRD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan perkantoran	1		
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	SEKRETARIAT DPRD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan perkantoran	1		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	SEKRETARIAT DPRD
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	SEKRETARIAT DPRD
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten	SEKRETARIAT DPRD



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan pemeliharaan peralatan penunjang urusan perkantoran	1	Banggai Kepulauan	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	9 Unit	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	SEKRETARIAT DPRD
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	SEKRETARIAT DPRD
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	SEKRETARIAT DPRD
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	SEKRETARIAT DPRD
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase pemenuhan kebutuhan keuangan dan kesejahteraan DPRD	1		
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	25 Orang/Bul	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	SEKRETARIAT DPRD
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	3 Paket	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	SEKRETARIAT DPRD
Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	25 Orang	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	SEKRETARIAT DPRD
Layanan Administrasi DPRD	Persentase pelaksanaan administrasi DPRD	1		
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	150 Laporan	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	SEKRETARIAT DPRD
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	36 Paket	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	SEKRETARIAT DPRD
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Rapat rapat Dewan yang tepat waktu, tepat tindak lanjut dan tepat sasaran	100 Persen		
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase rapat Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	1		
Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	10 Dokumen	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	SEKRETARIAT DPRD
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	10 Dokumen	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	SEKRETARIAT DPRD
Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	10 Dokumen	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	SEKRETARIAT DPRD
Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	3 Dokumen	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	SEKRETARIAT DPRD
Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase rapat pembahasan kebijakan anggaran	1		
Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	2 Dokumen	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	SEKRETARIAT DPRD
Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 Dokumen	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	SEKRETARIAT DPRD
Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	SEKRETARIAT DPRD
Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	SEKRETARIAT DPRD
Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	SEKRETARIAT DPRD
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	1		
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	12 Laporan	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	SEKRETARIAT DPRD
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	12 Laporan	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	SEKRETARIAT DPRD
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	12 Laporan	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	SEKRETARIAT DPRD
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	12 Laporan	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	SEKRETARIAT DPRD
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	12 Laporan	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	SEKRETARIAT DPRD
Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	SEKRETARIAT DPRD
Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase pelaksanaan peningkatan kapasitas	1		



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023

Pendalaman Tugas DPRD	DPRD Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	1 Dokumen	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	SEKRETARIAT DPRD
Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	12 Dokumen	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	SEKRETARIAT DPRD
Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	5 Orang	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	SEKRETARIAT DPRD
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	6 Orang	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	SEKRETARIAT DPRD
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	50 Dokumen	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	SEKRETARIAT DPRD
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase pelaksanaan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	1		
Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	12 Laporan	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	SEKRETARIAT DPRD
Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	300 Dokumen	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	SEKRETARIAT DPRD
Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	75 Dokumen	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	SEKRETARIAT DPRD
Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase pelaksanaan dan pengawasan Kode Etik DPRD	1		
Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	3 Laporan	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	SEKRETARIAT DPRD
Pembahasan Kerja Sama Daerah	Persentase fasilitasi kerjasama daerah	1		
Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	1 Dokumen	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	SEKRETARIAT DPRD
Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase pelaksanaan Fasilitasi Tugas DPRD	1		
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	38 Dokumen	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	SEKRETARIAT DPRD
Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 Laporan	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	SEKRETARIAT DPRD
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
KEUANGAN				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100 Persen		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen yang direncanakan	1		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang direncanakan	3 Dokumen	Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta Optimalisasi percepatan penurunan Stunting	BADAN PENDAPATAN DAERAH
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pembayaran gaji dan tunjangan pegawai	1		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan pegawai	1 Tahun	Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta Optimalisasi percepatan penurunan Stunting	BADAN PENDAPATAN DAERAH
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Terbayarnya gaji dan tunjangan pegawai	0 Dokumen 1 Tahun	Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta Optimalisasi percepatan penurunan Stunting	BADAN PENDAPATAN DAERAH
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuanga Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan La Koordinasi Penyusunan La Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme SKPD Tersusunnya laporan keua bulanan/semesteran SKP	0 Laporan 1 Tahun	Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta Optimalisasi percepatan penurunan Stunting	BADAN PENDAPATAN DAERAH
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan	1		
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan yang direncanakan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang 0 Orang		BADAN PENDAPATAN DAERAH
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kegiatan administrasi umum perangkat daerah	1		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/bangunan kantor yang direncanakan	32 Buah	Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta Optimalisasi percepatan penurunan Stunting	BADAN PENDAPATAN DAERAH
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta Optimalisasi percepatan penurunan Stunting	BADAN PENDAPATAN DAERAH
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan bahan logistik yang direncanakan	2 Jenis	Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta Optimalisasi percepatan penurunan Stunting	BADAN PENDAPATAN DAERAH
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah blanko pajak daerah yang direncanakan	2 Jenis	Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta Optimalisasi percepatan penurunan Stunting	BADAN PENDAPATAN DAERAH
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar majalah yang direncanakan	2 Media	Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta Optimalisasi percepatan penurunan Stunting	BADAN PENDAPATAN DAERAH
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas yang direncanakan	15 OK	Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta Optimalisasi percepatan penurunan Stunting	BADAN PENDAPATAN DAERAH
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	1		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang direncanakan	1500 Lembar	Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta Optimalisasi percepatan	BADAN PENDAPATAN DAERAH



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPD)
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang direncanakan	4 Jenis	penurunan Stunting Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta Optimalisasi percepatan penurunan Stunting	BADAN PENDAPATAN DAERAH
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa kegiatan yang direncanakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	42 Orang 0 Laporan	Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta Optimalisasi percepatan penurunan Stunting	BADAN PENDAPATAN DAERAH
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	1		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit	Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta Optimalisasi percepatan penurunan Stunting	BADAN PENDAPATAN DAERAH
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	umlah jasa pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya yang direncanakan	15 Unit	Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta Optimalisasi percepatan penurunan Stunting	BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase peningkatan pendapatan asli daerah	100 Persen		
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Daerah	1		
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	9 Dokumen	Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta Optimalisasi percepatan penurunan Stunting	BADAN PENDAPATAN DAERAH
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah sosialisasi/pelatihan yang direncanakan	144 Desa/Kel	Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta Optimalisasi percepatan penurunan Stunting	BADAN PENDAPATAN DAERAH
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah Jumlah wajib pajak yang terlayani	0 Unit 67804 Wajib Pajak	Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta Optimalisasi percepatan penurunan Stunting	BADAN PENDAPATAN DAERAH
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah Jumlah objek dan subjek PBB dan pajak daerah lainnya yang direncanakan	0 Laporan 65500 Wajib Pajak	Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta Optimalisasi percepatan penurunan Stunting	BADAN PENDAPATAN DAERAH
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah Terlaksananya penyusunan dan kebijakan tentang sistem administrasi pelayanan pajak dan retribusi daerah	0 Layanan 1 Kegiatan	Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta Optimalisasi percepatan penurunan Stunting	BADAN PENDAPATAN DAERAH
Penagihan Pajak Daerah	Jumlah wajib pajak dan retribusi daerah yang tertagih	67804 Wajib Pajak	Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta Optimalisasi percepatan penurunan Stunting	BADAN PENDAPATAN DAERAH
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah perjalanan dinas yang direncanakan	3 OK	Memaksimalkan pemenuhan kebutuhan air bersih dan jalan untuk kesejahteraan masyarakat	BADAN PENDAPATAN DAERAH
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
KEUANGAN				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersedia	3 Dokumen	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Pegawai yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/bula 36 Orang	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pegawai yang menerima Tambahan Penghasilan	36 Orang	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Laporan Tanggapan Pemeriksaan	1 Laporan	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 Laporan	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	10 OK	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	50 OK	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Administrasi Umum Perangkat Daerah				
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6 Jenis	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Unit Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 Jenis	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Unit Peralatan Rumah Tangga yang di adakan	7 Jenis	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan	5 Jenis	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	2 Jenis	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	8 Media	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pegawai yang mengikuti Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	135 OK	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang dibutuhkan	200000 Lemb	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang dibayarkan	6 Jenis	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan yang dibayarkan	94 Orang	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Unit Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	34 Unit	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	25 Unit	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah				
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen 0 Dokumen	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 Dokumen	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA OPD	54 OPD	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA OPD yang di Verifikasi	54 OPD	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Dokumen peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD	2 Dokumen	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Dokumen peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD	4 Dokumen	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan Jumlah Pegawai yang Mengikuti Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	0 Dokumen 7 OK		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah Jumlah Pegawai yang mengikuti Rapat-Rapat Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	0 Dokumen 18 Orang	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Pegawai yang mengikuti perencanaan Koordinasi anggaran Pembiayaan	7 Orang	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah				
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Jumlah Pegawai yang mengikuti Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	0 Dokumen 12 OK	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Kegiatan Penatausahaan Pembiayaan Daerah	1 Kegiatan	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemoangan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah Pegawai yang mengikuti Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	12 OK	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemoangan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Kegiatan Pemrosesan, Penerbitan dan Pendistribusian Lembar SP2D	1 Kegiatan	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah				
Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan LO dan Beban	Terlaksananya Kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan LO dan Beban	1 Kegiatan	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	Jumlah dokumen yang dihasilkan dari Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	2 Dokumen	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA	1 Laporan	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen yang dihasilkan dalam Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023

Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang mendapatkan Pembinaan Pengelolaan Keuangan	54 OPD	Banggai Kepulauan	ASET DAERAH
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Desa yang masuk dalam Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	141 Desa	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Tertindakannya Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Tahun	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Tertindakannya Kegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten Kota	141 Desa	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				
Pengelolaan Barang Milik Daerah				
Penyusunan Standar Harga	Jumlah Dokumen Standar Harga Berdasarkan Jenis dan Tipe Barang	1 Dokumen	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Kegiatan	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah	1 Kegiatan	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah Jumlah Pegawai yang mengikuti Koordinasi Hasil Penilaian Barang Milik Daerah	0 Laporan 1 Kegiatan	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Tertindakannya kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Kegiatan	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Konsolidasi Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
KEPEGAWAIAN				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	98 Persen		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 bulan	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan La Koordinasi Penyusunan La Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme SKPD	3 Laporan	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	80 Persen		
Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	1 Laporan	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	6 Laporan		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Laporan		MANUSIA
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Laporan		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit 6 Unit	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase kualitas data, layanan kepegawaian dan kinerja pegawai	100 Persen		
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Dokumen Pengadaan, Pemberhentian dan informasi Kepegawaian	20 Dokumen		
Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	1 Dokumen	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	3 Dokumen	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Pengelolaan Mutasi dan Promosi ASN	502 Dokumen		
Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	1 Dokumen	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	500 Dokumen	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Pengembangan Kompetensi ASN	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi ASN	e2n06 Orang/Dok		
Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	100 Orang	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	1 Dokumen	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	3 Dokumen	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023

Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Terlaksananya Penyelenggaraan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	e1n06 Orang/Dok		
Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	0 Orang 30 Orang	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	0 Orang 30 Orang	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	20 Laporan	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				
INSPEKTORAT DAERAH				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	0,95		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Aparatur Sipil Negara	42 Aparatur		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai yang terbayarkan gaji dan tunjangan	42 Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Salakan dan Penataan Kawasan Ibukota Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Salakan dan Penataan Kawasan Ibukota	INSPEKTORAT
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pegawai yang terbayarkan Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja PNS	42 Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Salakan dan Penataan Kawasan Ibukota	INSPEKTORAT
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan tugas pokok dan fungsi	1		
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang meningkat kompetensinya terkait JFT Terlaksananya Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional Tertentu Terlaksananya pendidikan dan pelatihan kepemimpinan bagi Pejabat Struktural Eselon II	16 Orang 6 Orang 1 Orang	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Salakan dan Penataan Kawasan Ibukota	INSPEKTORAT
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek	11 Orang	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Salakan dan Penataan Kawasan Ibukota	INSPEKTORAT
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan peralan dan perlengkapan kantor, Penyediaan peralatan rumah tangga, Penyediaan bahan logistik kantor, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan serta penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor Tersedianya kendaraan dinas roda dua	39 Jenis 1 Unit	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Salakan dan Penataan Kawasan Ibukota	INSPEKTORAT
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah alat pembersih dan bahan pembersih yang dibeli	16 Jenis	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Salakan dan Penataan Kawasan Ibukota	INSPEKTORAT
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis bahan logistik kantor yang dibeli	2 Jenis	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Salakan dan Penataan Kawasan Ibukota	INSPEKTORAT
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis bahan cetak Jumlah Materi yang digandakan	2 Jenis 47408 Lemba	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Salakan dan Penataan Kawasan Ibukota	INSPEKTORAT
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang dibeli tiap bulan	2 Jenis	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Salakan dan Penataan Kawasan Ibukota Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Salakan dan Penataan Kawasan Ibukota	INSPEKTORAT
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah yang diikuti	12 Kali	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Salakan dan Penataan Kawasan Ibukota Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Salakan dan Penataan Kawasan Ibukota	INSPEKTORAT
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah Terlaksananya Penyediaan jasa surat menyurat, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik serta penyediaan jasa pelayanan umum kantor	100 % 100 %		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia	950 Lembar	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Salakan dan Penataan Kawasan Ibukota	INSPEKTORAT
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Kwh yang terpakai Jumlah M3 air bersih yang terpakai Penggunaan langganan layanan Indehome Penggunaan langganan layanan TV Kabel	80064 Kwh 3600 M3 12 Bulan 12 Bulan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Salakan dan Penataan Kawasan Ibukota	INSPEKTORAT
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya Honorarium Pelayanan umum kantor	12 Bulan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Salakan dan Penataan Kawasan Ibukota	INSPEKTORAT
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Jasa pemeliharaan, Pajak kendaraan dinas operasional serta sarana dan prasarana gedung kantor lainnya	1		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	Bukti pembayaran pajak/SINK Kendaraan Dinas/Operasional roda empat	3 Unit 3 Unit	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Salakan	INSPEKTORAT



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPD)
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023

Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah peralatan kantor yang terpelihara		dan Penataan Kawasan Ibukota	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang terpelihar	38 Unit	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Salakan dan Penataan Kawasan Ibukota	INSPEKTORAT
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah alat listrik Terlaksana pemeliharaan gedung kantor	3 Jenis 1 Unit		INSPEKTORAT
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase temuan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	1		
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Terlaksananya Pengawasan kinerja pemerintah daerah; Pengawasan Keuangan Pemerintah daerah; Reviu Laporan kinerja; Reviu laporan keuangan; Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	1		
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah LHP Pengawasan Kinerja Pemerintah yang telah diselesaikan	6 LHP	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Salakan dan Penataan Kawasan Ibukota	INSPEKTORAT
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Sapu Bersih Pungutan Liar yang diselesaikan Pendampingan pemeriksaan BPK RI	12 Laporan 2 Kali	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Salakan dan Penataan Kawasan Ibukota	INSPEKTORAT
Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan hasil review yang terselesaikan Makanan dan minuman yang tersedia	8 Laporan 750 Dos	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Salakan dan Penataan Kawasan Ibukota	INSPEKTORAT
Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan review LKPD yang dilaksanakan Jumlah Perjalanan dinas luar daerah yang dilaksanakan Makanan dan minuman yang tersedia	1 Laporan 1 Kali 650 Dos	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Salakan dan Penataan Kawasan Ibukota	INSPEKTORAT
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Laporan Hasil Monitoring dan Tindak Lanjut temuan Makanan dan minuman yang tersedia Perjalanan dinas luar daerah yang dilaksanakan	6 Laporan 1100 Dos 4 Kali	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Salakan dan Penataan Kawasan Ibukota	INSPEKTORAT
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Terlaksananya pengawasan dengan tujuan tertentu	1		
Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	5 Laporan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Salakan dan Penataan Kawasan Ibukota	INSPEKTORAT
UNSUR KEWILAYAHAN				
KECAMATAN				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	100 Persen		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Yang Direncanakan	2 Dokumen		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Gaji dan Tunjangan Yang Direncanakan	2 OB	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	KECAMATAN
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Yang Direncanakan	12 Bulan	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	KECAMATAN
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah TPP Yang Direncanakan	1 Tahun	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	KECAMATAN
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Jasa Pengelolaan BMD yang Direncanakan	1 OB		
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Jasa Pengelolaan BMD yang Direncanakan	1 OB	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	KECAMATAN
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Barang dan Jasa Yang Direncanakan	1 Tahun		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK Yang Direncanakan Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17 Jenis 11 Unit	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	KECAMATAN
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah BBM Kantor Yang Direncanakan Jumlah Makan Minum Yang Direncanakan	2500 Liter 700 Dos	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	KECAMATAN
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penggandaan Yang Direncanakan	29100 Lembar	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	KECAMATAN
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah Yang Direncanakan Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah Yang Direncanakan	60 OK 7 OK	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	KECAMATAN
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Administrasi Perkantoran Yang Direncanakan	1 Tahun		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai Yang Direncanakan	500 Lembar	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	KECAMATAN
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Yang Direncanakan	3 Jenis	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	KECAMATAN
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Kantor Yang Direncanakan Jumlah Penanggungjawaban Pengelola Keuangan yang Direncanakan	10 OB 5 OB	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	KECAMATAN
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional yang Direncanakan	1 Unit		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional yang Direncanakan	1 Unit	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	KECAMATAN
PROGRAM MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiatan Yang Direncanakan	2 Kegiatan		
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Tersedianya Kegiatan MUSRENBANG Yang Direncanakan	1 Kegiatan	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	KECAMATAN
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan	Tersedianya Kegiatan Lomba Desa Yang	1 Kegiatan	Optimalisasi Pelayanan Publik	KECAMATAN



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023

Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Direncanakan		dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 Persen		
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Yang Direncanakan	2 Kegiatan		
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Tersedianya Kegiatan HUT RI Yang Direncanakan	1 Kegiatan	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	KECAMATAN
Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Tersedianya Kegiatan MTQ dan PESPARAWI Tkt. Kabupaten Yang Direncanakan	2 Kegiatan	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	KECAMATAN
UNSUR KEWILAYAHAN				
KECAMATAN				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100 Persen		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi keuangan perangkat Daerah	100 persen		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	terpenuhinya Gaji dan Tunjangan Yang Direncanakan	1 Tahun	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	KECAMATAN
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	terpenuhinya Gaji dan Tunjangan Yang Direncanakan	1 Tahun	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	KECAMATAN
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah Yang Direncanakan	0 OK	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	KECAMATAN
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat Daerah	100 persen		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 Paket	Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta Optimalisasi percepatan penurunan Stunting	KECAMATAN
Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	KECAMATAN
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	KECAMATAN
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	KECAMATAN
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Pers		
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	KECAMATAN
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	100 Pers		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	KECAMATAN
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	KECAMATAN
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	KECAMATAN
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0 Unit		KECAMATAN
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan	100 Persen		
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Persentase peningkatan partisipasi Dalam Kegiatan Pemberdayaan masyarakat Desa	100 persen		
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	KECAMATAN
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan penugasan kepala daerah	100 Persen		
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	100 persen		
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	KECAMATAN
Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	50 Orang	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	KECAMATAN
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100 Persen		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	100 Persen		



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Yang di Rencanakan	4 Dokumen	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Yang di Rencanakan	1 Dokumen	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Kantor Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	100 Persen		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN Yang di Rencanakan	24 Orang	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN Yang di Rencanakan	24 Orang	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Kantor Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	100 Persen		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik Kantor Yang di Rencanakan	13 Unit	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor dan Bahan Pembersih Kantor Yang diRencanakan	30 Jenis	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang di Rencanakan	2 Jenis	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan kantor Yang di Rencanakan	2 Jenis	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Media yang Direncanakan	2 Media	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Kota dan Perjalanan Dinas Biasa yang Direncanakan	60 Orang	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pengadaan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik	100 Persen		
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Yang di Rencanakan	1 Unit	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Laptop, AC Yang di Rencanakan	4 Unit	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kantor Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	100 Persen		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai Yang Direncanakan	700 Lembar	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Kantor Yang Direncanakan	4 Jenis	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Direncanakan	50 Orang	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Permerintah Daerah Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	100 Persen		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Yang Mendapat Pemeliharaan	1 Unit	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit 5 Unit	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	"Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Wawasan Kebangsaan"	100 Persen		
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pematapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Terlaksananya kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pematapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	100 Persen		
Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kegiatan Yang Direncanakan	1 Kegiatan	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pendidikan politik	100 Persen		
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pematapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Terlaksananya kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pematapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik	100 Persen		
Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kegiatan Yang Direncanakan	1 Kegiatan	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI	Persentase organisasi kebudayaan dan kemasyarakatan yang aktif	100 Persen		



KEMASYARAKATAN				
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pematapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Terlaksananya kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pematapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	100 Persen		
Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kegiatan Yang Direncanakan	1 Kegiatan	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	"Cakupan Pelaksanaan Pencegahan Penyakit Masyarakat (PEKAI)"	100 Persen		
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pematapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Terlaksananya kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pematapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	100 Persen		
Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kegiatan Yang Direncanakan	1 Kegiatan	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik	100 Persen		
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pematapan Pelaksanaan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Terlaksananya kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pematapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	100 Persen		
Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kegiatan Yang Direncanakan	1 Kegiatan	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Penyelenggaraan Pelayanan yang menyangkut masyarakat sebagai pelayanan publik tidak luput dari norma, aturan, standar dan ukuran yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan pelayanan secara akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan dan berkinerja tinggi.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, SPM tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar pelayanan Minimal Bahwa SPM adalah Ketentuan Tentang Jenis dan mutu Pelayanan dasar yang merupakan urusan Wajib Daerah yang berhak diperoleh oleh setiap warga Negara secara Minimal. Penekanan kata "Minimal" dalam istilah SPM ini mengacu pada batas minimal tingkat cakupan dan kualitas Pelayanan Dasar yang harus mampu dicapai oleh setiap Daerah.

Dalam penerapan SPM Berdasarkan Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 Daerah menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.



Dasar Hukum Penyusunan Laporan Standar Minimal adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-Undang no 9 tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
3. Peraturan Menteri Dakam Negeri RI Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar teknis Pelayanan Dasar pada Standar pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota
4. Peraturan Menteri Dakam Negeri RI Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar teknis Pelayanan Dasar pada Standar pelayanan Minimal Sub-Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar teknis Pelayanan Dasar pada Standar pelayanan Minimal Sub-Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Daerah Kabupaten/Kota
6. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar teknis Pelayanan Dasar pada Standar pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Kabupaten/Kota
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
8. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.
9. Peraturan Menteri Dakam Negeri RI Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar teknis Pelayanan Minimal Pendidikan

SPM yang telah ditetapkan Pemerintah menjadi salah satu acuan bagi Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan menyusun rencana pencapaian SPM yang memuat target Tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada batas waktu pencapaian SPM sesuai dengan Peraturan/Keputusan Menteri. Rencana pencapaian SPM dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategi Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD). Target tahunan pencapaian SPM dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA),



Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD) sesuai klasifikasi belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan melakukan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran serta target kinerja RPJMD Tahun 2023 dengan efektif dan efisien selama 5 (lima) tahun ke depan.

Oleh karena itu untuk mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan menetapkan arah kebijakan melalui rangkaian program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).



BAB II

CAPAIAN KINERJA

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Banggai Kepulauan secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional khususnya Kabupaten Banggai Kepulauan.

Capaian kinerja makro menggunakan indikator kinerja makro sebagai berikut :

2.1. Indikator Kinerja Makro

No.	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Tahun 2022	Tahun 2023	Ket
1	Laju Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	66,30	67,05	
2	Laju Penurunan Angka Kemiskinan	13,44	12,90	
3	Laju Penurunan Angka Pengangguran	1,48	1,56	
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,94	3,94	
5	Laju Pertumbuhan Pendapatan Per Kapita	37.376	39.909	
6	Penurunan Tingkat Ketimpangan Pendapatan	0,280	0,272	



LAMPIRAN

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran.

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil.

2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan.



2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis instansi pemerintah yang setidaknya memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program serta Ukuran Keberhasilan dalam pelaksanaannya. Dalam sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah, perencanaan Strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan Strategik lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, melalui pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kerjanya.

a. Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator yang akan memberikan informasi sejauh mana instansi pemerintah telah berhasil mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Penetapan Indikator Pemerintah Daerah Tahun 2023 sesuai Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah. Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja, sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan tahun 2022. Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2023 ini bertujuan untuk memperoleh kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik sehingga memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan sebagai perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Indikator Kinerja Utama 2023 disusun berdasarkan Rencana Pemerintah Daerah 2023 – 2026.

Penetapan Indikator Pemerintah Daerah Tahun 2023 mengacu pada IKU Tahun 2023 – 2026, RPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 – 2026, Renstra OPD dan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023. Penetapan Target Indikator Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja
Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1	2	3	4	5



1.	Terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (Good governance & clean Government)	1. Tindak lanjut Hasil Temuan Pengawasan BPK 2. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan APIP 3. Opini BPK	% %	 WTP
2.	Terwujudnya peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah daerah dalam melayani masyarakat	1. ASN yang telah Mengikuti Pendidikan dan pelatihan struktural	%	31
3.	Terwujudnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil bagi masyarakat	1. Persentase Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) 2. Persentase Penerbitan Akte Kelahiran	% %	100 46,7
4.	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	1. IPM	%	67,39
5.	Terwujudnya peningkatan mutu tenaga pendidik dan anak didik	1. Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV 2. Persentase Angka Kelulusan - SD/MI - SMP/MTs	% % %	 100 100
6.	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan	1. Angka partisipasi Murni (APM) - APM SD/MI/Paket A - APM SMP/MTs/Paket B 2. Angka partisipasi Kasar (APK) - APK SD/MI/Paket A - APK SMP/MTs/Paket B	% % % %	99,5 72,59 110 79.82
7.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1. Angka Usia Harapan Angka Hidup 2. Angka Kelangsungan Hidup Bayi 3. Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup 4. Prevalensi balita gizi kurang	Usia Hari KH %	67,31 99,93 107,5/10 0.000 16.04
8.	Terwujudnya kerukunan kehidupan beragama	1. Cakupan Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama	Kegiatan	
9.	Terwujudnya pembangunan dan peningkatan prasarana obyek wisata	1. Pertumbuhan PDRB sektor Pariwisata	PDRB	2.718.99 2.647
10.	Terwujudnya penyediaan sarana produksi pertanian	1. Kontribusi Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB	%	49,01



11.	Terwujudnya penyediaan sarana produksi perikanan	1. Produksi Perikanan	Ton	14,702,40
12.	Terwujudnya penyediaan rumah layak huni bagi warga miskin	1. Persentase Cakupan ketersediaan Rumah Layak Huni 2. Presentase luas Kawasan kumuh yang tertangani	% %	4
13.	Meningkatnya cakupan rumah tangga memiliki sanitasi layak	1. Persentase Rumah tinggal beranitasi	%	70,59
14.	Terwujudnya pemberian tunjangan hari tua bagi warga miskin	1. Penerima Tunjangan Hari tua bagi warga miskin	Orang	20

b. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja.

Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Sasaran melalui media formulir Pengukuran Kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Adapun rincian pengukuran capaian kinerja dengan target perjanjian berdasarkan sasaran strategis yang ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran	IKU	Satuan	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Persentase Capaian 2023 (%)
1	2	3	4	8	9	10
1.	Terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (Good governance & clean Government)	1. Persentase Tindak lanjut Hasil Temuan Pengawasan BPK 2. Presentase Tindak Lanjut Hasil Temuan APIP 3. Opini BPK	% % Opini		WTP	
Rata-rata Capaian Sasaran Pertama						
2.	Terwujudnya pengembangan potensi dan	1. Persentase ASN yang telah Mengikuti	%	31	3	10



	peningkatan kemampuan aparaturnya pemerintah daerah, sehingga dihasilkan peningkatan efektifitas dan efisiensi kerja	Pendidikan dan pelatihan struktural				
Rata-rata Capaian Sasaran Kedua						10
3.	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi Masyarakat	1. Persentase Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) 2. Persentase Penerbitan Akte Kelahiran	% %	100 46,7		
Rata-rata Capaian Sasaran Ketiga						
4.	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	1. Persentase Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	%	67,39	68.07	101
Rata-rata Capaian Sasaran Keempat						101
5.	Terwujudnya peningkatan mutu tenaga pendidik dan anak didik	1. Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4 2. Persentase Angka Kelulusan - SD/MI - SMP/MTs	% % % %	 100 100	 100 100	 100 100
Rata-rata Capaian Sasaran Kelima						
6.	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan	1. Persentase Angka partisipasi Murni (APM) - APM SD/MI/Paket A - APM SMP/MTs/Paket B 2. Persentase Angka partisipasi Kasar (APK) - APK SD/MI/Paket A - APK SMP/MTs/Paket B	% % % % %	 99,5 72,59 110,3 79,82	 99,75 74,37 110,41 79,86	 101 102 100 100
Rata-rata Capaian Sasaran Keenam						100,75



7.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1. Angka usia harapan hidup 2. Angka Kelangsungan Hidup Bayi 3. Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup 4. Persentase Prevalensi balita gizi kurang	Tahun Persen KH %	67,31 99,93 107,5/100.000 16.04	66,87 99,98 73/100.000 13.7	99 100 67 85
Rata-rata Capaian Sasaran Ketujuh						87,75
8.	Terwujudnya kerukunan kehidupan beragama	1. Cakupan kegiatan pelaksanaan peningkatan pelayanan kehidupan beragama				
Rata-rata capaian Sasaran Kedelapan						
9.	Meningkatkan pertumbuhan sektor Pariwisata terhadap perekonomian	Pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata	Persen	Rp 2.718.992.647	Rp 2.565.913.783	94,44%
Rata-rata capaian Sasaran Kesembilan						94,44%
10.	Terwujudnya penyediaan sarana produksi pertanian	1. Persentase Kontribusi Pertanian/ Perkebunan terhadap PDRB	%	49,01		
Rata-rata capaian Sasaran Kesepuluh						
11.	Terwujudnya pemanfaatan Teknologi untuk meningkatkan produksi perikanan	1. Produksi Perikanan	Ton/Tahun	14,702,40	588,343,100	400
Rata-rata capaian sasaran Kesebelas						400
12.	Meningkatnya Jumlah rumah layak huni dan berkurangnya kawasan kumuh	1. Persentase Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni 2. Presentase luas kawasan kumuh yang tertangani	% %	- 4	- 0,67	- 16,84
Rata-rata capaian sasaran Kedua belas						16,84



13.	Meningkatnya cakupan rumah tangga memiliki sanitasi layak	1. Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	70,59	11,76	16,66
Rata-rata capaian sasaran Ketiga belas						16,66
14.	Terwujudnya pemberian tunjangan hari tua bagi warga miskin	1. Penerima Tunjangan Hari Tua bagi warga miskin	%	20		
Rata-rata capaian sasara Keempat belas						

c. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya

Adapun rincian pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya berdasarkan sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya 2022-2023

No	Sasaran	IKU	Satuan	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023
1	2	3	4	6	7
1.	Terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (Good governance & clean Government)	1. Persentase Tindak lanjut Hasil Temuan Pengawasan 2. Presentase Tindak Lanjut Hasil Temuan APIP 2. Opini BPK	%	70 70 WDP	WTP
Rata-rata Capaian Sasaran Kesatu				70	
2.	Terwujudnya pengembangan potensi dan peningkatan kemampuan aparatur pemerintah daerah, sehingga dihasilkan peningkatan efektifitas dan efisiensi kerja	1. Persentase ASN yang telah Mengikuti Pendidikan dan pelatihan struktural	%	17,2	3
Rata-rata Capaian Sasaran Kedua				17,2	3
3.	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi Masyarakat	1. Persentase Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) 2. Persentase Penerbitan Akte Kelahiran	% %	98 77,2	
Rata-rata Capaian Sasaran Ketiga				87,66	



4.	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	2. Persentase Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	%	100	68.07
Rata-rata Capaian Sasaran Keempat				100	68.07
5.	Terwujudnya peningkatan mutu tenaga pendidik dan anak didik	1. Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4 2. Persentase Angka Kelulusan - SD/MI - SMP/MTs	% % %	100 100 100,	 100 100,
Rata-rata Capaian Sasaran Kelima				100	100
6.	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan	1. Persentase Angka partisipasi Murni (APM) - APM SD/MI/Paket A - APM SMP/MTs/Paket B 2. Persentase Angka partisipasi Kasar (APK) - APK SD/MI/Paket A - APK SMP/MTs/Paket B	 % % % %	 88.84 74.32 104 85.75	 99,75 74,37 110,41 79,86
Rata-rata Capaian Sasaran Keenam				88.75	91.09
7.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1. Angka usia harapan hidup 2. Angka Kelangsungan Hidup Bayi 3. Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup 4. Persentase Prevalensi balita gizi kurang	Orang Orang Orang %	100 99 122 104	66,87 99,98 73 13,7
Rata-rata Capaian Sasaran Ketujuh				106	63.38
8.	Terwujudnya kerukunan kehidupan beragama	1. Cakupan kegiatan pelaksanaan peningkatan pelayanan kehidupan beragama		10	
Rata-rata Capaian Sasaran Kedelapan				10	10
9.	Meningkatkan pertumbuhan sektor Pariwisata terhadap perekonomian	Pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata			2.565.913.783
Rata-rata Capaian Sasaran Kesembilan					
10.	Terwujudnya	1. Persentase	%	210,72	



	penyediaan sarana produksi pertanian	Kontribusi Pertanian/ Perkebunan terhadap PDRB			
Rata-rata Capaian Sasaran Kesepuluh				210,72	
11.	Terwujudnya penyediaan sarana produksi perikanan	1. Produksi Perikanan	Ton	164	588,343,100
Rata-rata Capaian Sasaran Kesebelas				164	588,343,100
12.	Meningkatnya jumlah rumah layak huni dan berkurangnya kawasan kumuh	1. Persentase Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni 2. Presentase luas kawasan kumuh yang tertangani	% %	71,68	0,67
Rata-rata Capaian Sasaran Kedubelas					
13.	Meningkatnya cakupan rumah tangga memiliki sanitasi layak	1. Persentase rumah tangga bersanitasi	%		11,79
Rata-rata Capaian Sasaran Ketiga Belas					
14.	Terwujudnya pemberian tunjangan hari tua bagi warga miskin	1. Penerima Tunjangan Hari Tua bagi warga miskin	Orang	50,3	20
Rata-rata Capaian Sasaran Ketigabelas				50,3	20

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini, maka secara umum rata-rata capaian kinerja pada semua sasaran strategis ini mengalami peningkatan pada beberapa indikator namun juga mengalami penurunan pada indikator yang lain. Namun secara umum rata – rata capaian kinerja tahun 2023 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun lalu.

d. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target dalam Pembangunan Jangka Menengah

Adapun rincian pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan Target dalam RPD adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target RPD 2023-2026 Kabupaten Banggai Kepulauan

No	Sasaran	IKU	Satuan	Kondisi RPD 2023-2026	Realisasi Tahun 2023	Persentase Capaian 2023 (%)
1	2	3	4	8	9	10



	an pendidikan	SD/MI/Paket A				
		- APM	%	72,59	74,37	102
		SMP/MTs/Paket B				
		2. Persentase Angka partisipasi Kasar (APK)				
		- APK	%	110,3	110,41	100
		SD/MI/Paket A				
		- APK	%	79,82	79,86	100
		SMP/MTs/Paket B				
Rata-rata Capaian Sasaran Keenam						100,75
7.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1. Angka usia harapan hidup	Tahun	67,31	66,87	99
		2. Angka Kelangsungan Hidup Bayi	Persen	99,93	99,98	100
		3. Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	KH	107,5/100.000	73/100.000	67
		4. Persentase Prevalensi balita gizi kurang	%	16.04	13.7	85
Rata-rata Capaian Sasaran Ketujuh						87,75
8.	Terwujudnya kerukunan kehidupan beragama	Cakupan kegiatan pelaksanaan peningkatan pelayanan kehidupan beragama				
Rata-rata capaian Sasaran Kedelapan						
9.	Meningkatkan pertumbuhan sektor Pariwisata terhadap perekonomian	Pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata	Persen	Rp 2.718.992.647	Rp 2.565.913.783	94,44%
Rata-rata capaian Sasaran Kesembilan						94,44%
10.	Terwujudnya penyediaan sarana produksi pertanian	1. Persentase Kontribusi Pertanian/ Perkebunan terhadap PDRB	%	49,01		
Rata-rata capaian Sasaran Kesepuluh						
11.	Terwujudnya	1. Produksi Perikanan	Ton/Tahu	14,702,40	588,343,	400



	pemanfaatan Teknologi untuk meningkatkan produksi perikanan		n		100	
Rata-rata capaian sasaran Kesebelas						400
12.	Meningkatnya Jumlah rumah layak huni dan berkurangnya kawasan kumuh	1. Persentase Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	%	-	-	-
		2. Presentase luas kawasan kumuh yang tertangani	%	4	0,67	16,84
Rata-rata capaian sasaran Kedua belas						16,84
13.	Meningkatnya cakupan rumah tangga memiliki sanitasi layak	1. Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	70,59	11,76	16,66
Rata-rata capaian sasaran Ketiga belas						16,66
14.	Terwujudnya pemberian tunjangan hari tua bagi warga miskin	1. Penerima Tunjangan Hari Tua bagi warga miskin	%	20		
Rata-rata capaian sasara Keempat belas						

Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2023 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam RPD Tahun 2023-2026, maka secara umum belum ada indikator yang telah mencapai target dalam RPD. Meskipun terdapat indikator yang pencapaiannya sudah 100%, namun belum dapat dikatakan telah mencapai target RPD, dikarenakan indikator tersebut setiap tahunnya target realisasinya memang sudah 100%. Untuk itu semua indikator diharapkan dapat mencapai 100% pada tahun terakhir periode RPD Kabupaten Banggai Kepulauan.

e. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Persentase efisiensi Biaya} = 100\% - \left[\frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \right] \times 100\%$$



Pada tahun 2023 realisasi biaya untuk semua program adalah Rp. 237.689.191.792,-, sementara target biaya untuk semua program yaitu Rp. 332.600.761.267,-. Dengan rumus efisiensi diatas, diperoleh persentase efisiensi biaya pada level program adalah 77,47%. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah mampu menekan efisiensi,yakni tercapainya target yang telah ditetapkan dengan menyisahkan anggaran.

f. Analisis Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja Program /kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian semua sasaran strategis ini adalah sebanyak 18 program. Adapun pencapaiandari setiap program dan kegiatan tersebut diuraikan dibawah in :

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan.

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 3.141.251.000 - dan realisasi keuangan mencapai Rp. 3.140.639.990.- dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 99,98%, yang diarahkan untuk pelaksanaan pengawasan internal secara berkala, penanganan kasus pengaduan dilingkungan pemerintah daerah, tindak lanjut hasil temuan pengawasan,dan monitoring/evaluasi.

2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah.

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 164.035.931.126.- dan realisasi keuangan mencapai Rp. 162.991.233.044.- dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 99,36%, realisasi kinerja kegiatan sudah sesuai dengan kebutuhan riel yang ada.

3. Program Kepegawaian Daerah,

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 2.903.414.000.- dan realisasi keuangan mencapai Rp. 2.805.656.507.- dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 96,63%, yang diarahkan untuk kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah, Hasil yang dicapai adalah : realisasi kinerja kegiatan sudah sesuai dengan kebutuhan riel yang ada.

4. Program Pendaftaran Penduduk

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 581.571.159.- dan realisasi keuangan mencapai Rp. 576.571.000.- realisasi keuangan 99,14%, yang diarahkan untuk kegiatan Implementasi Sistem



Administrasi Kependudukan, Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan, Pengelolaan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan, Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan, Peningkatan Kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil, Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang Pencatatan sipil, Dukungan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Hasil yang dicapai adalah : realisasi kinerja kegiatan sudah sesuai dengan kebutuhan riil yang ada.

5. Program pengelolaan pendidikan

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 79.084.157.978,-. dan realisasi keuangan mencapai Rp. 29.972.797.196 - realisasi keuangan 37,89 %, yang diarahkan untuk kegiatan :

- Pengelolaan pendidikan PAUD.
- Pengelolaan Pendidikan Non formal/kesetaraan.
- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar.
- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah.

Hasil yang dicapai adalah : realisasi kinerja kegiatan sudah sesuai dengan kebutuhan riil yang ada

6. Program Pendidikan dan tenaga kependidikan

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 5.085.541.160.- dan realisasi keuangan mencapai Rp. 5.007.170.760 - realisasi keuangan 98,45 %, yang diarahkan untuk kegiatan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan, Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan, Hasil yang dicapai adalah : realisasi kinerja kegiatan sudah sesuai dengan kebutuhan riil yang ada

7. Program Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan dan upaya Kesehatan masyarakat.

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 60.416.564.829.- dan realisasi keuangan mencapai Rp. 37.701.831.419,- realisasi keuangan 62,40%, Hasil yang dicapai adalah : realisasi kinerja kegiatan sudah sesuai dengan kebutuhan riil yang ada

8. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 3.057.303.700 - dan realisasi keuangan mencapai Rp. 3.034.098.018,- dengan realisasi keuangan 99,24%, yang diarahkan untuk kegiatan Fasilitas



Pengelolaan Bina Mental Spiritual, Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial adalah : realisasi kinerja kegiatan sudah sesuai dengan kebutuhan riil yang ada.

9. Program Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 12.044.400.- dan realisasi keuangan mencapai Rp. 12.044.400 .,- dengan realisasi keuangan 100 %, yang diarahkan untuk kegiatan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota. Hasil yang dicapai adalah : realisasi kinerja kegiatan sudah sesuai dengan kebutuhan riil yang ada.

10. Program Pengembangan sarana Pertanian

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 2.194.387.550.- dan realisasi keuangan mencapai Rp. 1.797.582.186,- dengan realisasi keuangan 81,91%, yang diarahkan untuk kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya. Hasil yang dicapai adalah : realisasi kinerja kegiatan sudah sesuai dengan kebutuhan riil yang ada.

11. Program Pembangunan Prasarana Pertanian

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 338.592.750.- dan realisasi keuangan mencapai Rp. 269.025.250,- dengan realisasi keuangan 87,89%, yang diarahkan untuk kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian, Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani, Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya. Hasil yang dicapai adalah : realisasi kinerja kegiatan sudah sesuai dengan kebutuhan riil yang ada.

12. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 2.614.582.400.- dan realisasi keuangan mencapai Rp. 2.297.993.620,- dengan realisasi keuangan 85.55%, yang diarahkan untuk kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap, Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap. Hasil yang dicapai adalah : realisasi kinerja kegiatan sudah sesuai dengan kebutuhan riil yang ada.

13. Pemberdayaan Perikanan Budi daya

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 3.867.672.600.- dan realisasi keuangan mencapai Rp. 3.397.692.771,- dengan realisasi keuangan 87,84%, yang diarahkan untuk kegiatan Pemberian



Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan. Hasil yang dicapai adalah : realisasi kinerja kegiatan sudah sesuai dengan kebutuhan riil yang ada.

14. Program Pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.532.940.000.- dan realisasi keuangan mencapai Rp. 1.040.726.000 ,- dengan realisasi keuangan 67,89%, yang diarahkan untuk kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota. Hasil yang dicapai adalah : realisasi kinerja kegiatan sudah sesuai dengan kebutuhan riil yang ada.

15. Program kawasan pemukiman

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 834.081.615.- dan realisasi keuangan mencapai Rp. 791.415.647,- dengan realisasi keuangan 94,88 %, yang diarahkan untuk kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu dan Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan Permukiman. Hasil yang dicapai adalah : realisasi kinerja kegiatan sudah sesuai dengan kebutuhan riil yang ada.

16. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 2.900.725.000.- dan realisasi keuangan mencapai Rp. 2.852.713.984,- dengan realisasi keuangan 98,34 %.

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran.

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci		Rumusan/Persamaan	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan		
1.	Urusan Pendidikan	Output	1	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta)	Sudah Cukup Jelas	26	Dinas Pendidikan		
			2	Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Sudah Cukup Jelas	231	Dinas Pendidikan		
			3	Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Sudah Cukup Jelas	4488	Dinas Pendidikan		
			4	Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD (Negeri dan Swasta)	Sudah Cukup Jelas	3	Dinas Pendidikan		
			5	Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta)	Sudah Cukup Jelas	37	Dinas Pendidikan		
			6	Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	Sudah Cukup Jelas	37	Dinas Pendidikan		
			7	Jumlah kepala sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pemerintah	Sudah Cukup Jelas	17	Dinas Pendidikan		
		Output	2	1	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	Sudah Cukup Jelas	223	Dinas Pendidikan	SMP 61, SD 162
				2	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Sudah Cukup Jelas	0	Dinas Pendidikan	

			3	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Sudah Cukup Jelas	0	Dinas Pendidikan	
			4	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Sudah Cukup Jelas	0	Dinas Pendidikan	
			5	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Sudah Cukup Jelas	0	Dinas Pendidikan	
			6	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	Sudah Cukup Jelas	268	Dinas Pendidikan	
			7	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	Sudah Cukup Jelas	143	Dinas Pendidikan	
			8	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	Sudah Cukup Jelas	931	Dinas Pendidikan	
			9	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	Sudah Cukup Jelas	547	Dinas Pendidikan	
			10	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	Sudah Cukup Jelas	1	Dinas Pendidikan	
			11	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	Sudah Cukup Jelas	2	Dinas Pendidikan	
			12	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	Sudah Cukup Jelas	181	Dinas Pendidikan	

			13	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	Sudah Cukup Jelas	83	Dinas Pendidikan	
			14	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	Sudah Cukup Jelas	931	Dinas Pendidikan	
			15	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	Sudah Cukup Jelas	547	Dinas Pendidikan	
			16	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Sudah Cukup Jelas	161	Dinas Pendidikan	
			17	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Sudah Cukup Jelas	53	Dinas Pendidikan	
			18	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	Sudah Cukup Jelas	7	Dinas Pendidikan	
			19	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	Sudah Cukup Jelas	23	Dinas Pendidikan	
	Output	3	1	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	Sudah Cukup Jelas	223	Dinas Pendidikan	SMP 61, SD 162

			2	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Sudah Cukup Jelas	0	Dinas Pendidikan	
			3	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Sudah Cukup Jelas	0	Dinas Pendidikan	
			4	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Sudah Cukup Jelas	0	Dinas Pendidikan	
			5	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Sudah Cukup Jelas	0	Dinas Pendidikan	
			6	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar	Sudah Cukup Jelas	268	Dinas Pendidikan	
			7	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	Sudah Cukup Jelas	143	Dinas Pendidikan	
			8	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	Sudah Cukup Jelas	931	Dinas Pendidikan	
			9	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	Sudah Cukup Jelas	547	Dinas Pendidikan	
			10	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	Sudah Cukup Jelas	1	Dinas Pendidikan	
			11	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	Sudah Cukup Jelas	2	Dinas Pendidikan	
			12	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	Sudah Cukup Jelas	181	Dinas Pendidikan	

			13	Jumlah tenaga pendidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	Sudah Cukup Jelas	83	Dinas Pendidikan		
			14	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat Pendidik	Sudah Cukup Jelas	931	Dinas Pendidikan		
			15	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	Sudah Cukup Jelas	547	Dinas Pendidikan		
			16	Jumlah kepala sekolah ada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Sudah Cukup Jelas	161	Dinas Pendidikan		
			17	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Sudah Cukup Jelas	53	Dinas Pendidikan		
			18	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	Sudah Cukup Jelas	7	Dinas Pendidikan		
			19	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	Sudah Cukup Jelas	23	Dinas Pendidikan		
		Output	4	1	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta)	Sudah Cukup Jelas	2	Dinas Pendidikan	
				2	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Sudah Cukup Jelas	0	Dinas Pendidikan	

			3	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Sudah Cukup Jelas	94	Dinas Pendidikan		
			4	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	Sudah Cukup Jelas	6	Dinas Pendidikan		
			5	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	Sudah Cukup Jelas	1	Dinas Pendidikan		
			6	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	Sudah Cukup Jelas	1	Dinas Pendidikan		
			7	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Sudah Cukup Jelas	5	Dinas Pendidikan		
			8	Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1	Sudah Cukup Jelas	5	Dinas Pendidikan		
2	Urusan Kesehatan	Output	1	1	Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	Sudah Cukup Jelas	6	Dinkes	
			2	1	Jumlah RS dibina dan persiapkan akreditasinya	Sudah Cukup Jelas	6		
			3	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Sudah Cukup Jelas	1977	Dinkes	
				2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	Sudah Cukup Jelas	363	Dinkes	
			4	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Sudah Cukup Jelas	5.184	Dinkes	

			2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	Sudah Cukup Jelas	363	Dinkes	
		5	1)	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Sudah Cukup Jelas	8.002	Dinkes	
			2)	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	Sudah Cukup Jelas	363	Dinkes	
		6	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Sudah Cukup Jelas	94.966	Dinkes	
			2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Sudah Cukup Jelas	363	Dinkes	
		7	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Sudah Cukup Jelas	10.305	Dinkes	
			2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	Sudah Cukup Jelas	363	Dinkes	
		8	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Sudah Cukup Jelas	148.065	Dinkes	
			2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Sudah Cukup Jelas	445	Dinkes	
		9	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Sudah Cukup Jelas	21.699	Dinkes	
			2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Sudah Cukup Jelas	445	Dinkes	
		10	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Sudah Cukup Jelas	361.800	Dinkes	
			2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Sudah Cukup Jelas	439	Dinkes	
		11	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Sudah Cukup Jelas	63.666	Dinkes	
			2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Sudah Cukup Jelas	439	Dinkes	

			12	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Sudah Cukup Jelas	60.335	Dinkes	
				2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Sudah Cukup Jelas	430	Dinkes	
			13	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Sudah Cukup Jelas	4878	Dinkes	
				2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Sudah Cukup Jelas	50	Dinkes	
			14	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Sudah Cukup Jelas	11.024	Dinkes	
				2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Sudah Cukup Jelas	50	Dinkes	
3	Urusan Pekerjaan Umum	Output	1	1	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	Sudah Cukup Jelas	99.778	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
				2	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	Sudah Cukup Jelas	14.254	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
				3	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	Sudah Cukup Jelas	208.047	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
				4	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	Sudah Cukup Jelas	29.721	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
				5	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kota	Ada/tidak	Tidak	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Berdasarkan surat keterangan kepala dinas pekerjaan umum no 600/66.9/S.KET/PUPR/2024 menerangkan tidak
				6	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	Ada/tidak	tidak	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Berdasarkan surat keterangan kepala dinas pekerjaan umum no 600/66.9/S.KET/PUPR/2024 menerangkan tidak

			7	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota	Jumlah	29.967	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang		
	Output	2	1	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	Sudah Cukup Jelas	208047	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang		
			2	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	Sudah Cukup Jelas	14.254	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang		
			3	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	Sudah Cukup Jelas	208.047	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang		
			4	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	Sudah Cukup Jelas	29.721	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang		
			5	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kota	Ada/tidak	tidak	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Berdasarkan surat keterangan kepala dinas pekerjaan umum no 600/66.9/S.KET/PUPR/2024 menerangkan tidak	
			6	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	Ada/tidak	tidak	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Berdasarkan surat keterangan kepala dinas pekerjaan umum no 600/66.9/S.KET/PUPR/2024 menerangkan tidak	
			7	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota	Jumlah	29967	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang		
			3	1	Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	$\frac{\text{Panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik (m) } 4.201,8 \text{ Ha}}{\text{Panjang jaringan irigasi primer (m) } 5.042,2 \text{ Ha}} \times 100\%$	83,00%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	

			2	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	Panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik (m) 20.413 m Panjang jaringan irigasi sekunder (m) 24.497 m	99,66%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
			3	Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	Panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik (m) 6.575,91 -----x 100% Panjang jaringan irigasi tersier (m) 24.030	27,37%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
	Output	4	1	Pemenuhan dokumen RISPAM kabupaten/kota	Ada/tidak	Ada	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Berdasarkan surat keterangan kepala dinas pekerjaan umum no 600/66.9/S.KET/PUPR/2024 menerangkan tidak ada huruf D.1
			2	Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota	Ada/tidak	Tidak	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Berdasarkan surat keterangan kepala dinas pekerjaan umum no 600/66.9/S.KET/PUPR/2024 menerangkan tidak ada huruf D.2
			3	Jumlah BUMD dan atau UPTD Kab/Kota penyelenggaraan SPAM	Sudah Cukup Jelas	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Berdasarkan surat keterangan kepala dinas pekerjaan umum no 600/66.9/S.KET/PUPR/2024 menerangkan tidak ada huruf D.3
			4	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	Sudah Cukup Jelas	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Berdasarkan surat keterangan kepala dinas pekerjaan umum no 600/66.9/S.KET/PUPR/2024 menerangkan tidak ada huruf D.4
			5	Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain.	Sudah Cukup Jelas	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	

	Output	5	1	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	Sudah Cukup Jelas	28.713	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
			2	Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	Sudah Cukup Jelas	1278	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
			3	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	Sudah Cukup Jelas	29.991	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
			4	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	Sudah Cukup Jelas	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Berdasarkan surat keterangan kepala dinas pekerjaan umum no 600/66.9/S.KET/PUPR/2024 menerangkan tidak ada E.4
			5	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	Sudah Cukup Jelas	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Berdasarkan surat keterangan kepala dinas pekerjaan umum no 600/66.9/S.KET/PUPR/2024 menerangkan tidak ada E.5
			6	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	Sudah Cukup Jelas	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Berdasarkan surat keterangan kepala dinas pekerjaan umum no 600/66.9/S.KET/PUPR/2024 menerangkan tidak ada E.6
			7	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	$\frac{\sum \text{rumah yang memiliki akses pengelolaan berupa cubluk atau tanki septik}}{\sum \text{rumah di wilayah pengembangan SPALD dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun}} \times 100\%$ <p>0</p>	0%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Berdasarkan surat keterangan kepala dinas pekerjaan umum no 600/66.9/S.KET/PUPR/2024 menerangkan tidak ada E.7
					$\sum \text{rumah yang memiliki akses pengelolaan berupa cubluk atau tanki septik} = 0$ <p>-----x 100%</p> $\sum \text{rumah di wilayah pengembangan SPALD dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun} < 25 \text{ jiwa /ha}$			

			8	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	$\frac{\sum \text{rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di IPLT } 0}{\dots} \times 100\%$ $\sum \text{rumah di wilayah pengembangan SPALDS dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun} > 25 \text{ jiwa/ha } 0$	0%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Berdasarkan surat keterangan kepala dinas pekerjaan umum no 600/66.9/S.KET/PUPR/2024 menerangkan tidak ada E.8
			9	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	$\frac{\sum \text{rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD } 0}{\dots} \times 100\%$ $\sum \text{rumah di wilayah pengembangan SPALDT } 0$	0%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Berdasarkan surat keterangan kepala dinas pekerjaan umum no 600/66.9/S.KET/PUPR/2024 menerangkan tidak ada E.9
			10	Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	$\frac{\sum \text{rumah yang memiliki akses unit pengelolaan setempat } 0}{\dots} \times 100\%$ $\sum \text{jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPALD-S } 0$	0%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Berdasarkan surat keterangan kepala dinas pekerjaan umum no 600/66.9/S.KET/PUPR/2024 menerangkan tidak ada E.10
			11	Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	$\frac{\sum \text{jumlah sarana pengangkutan yang tersedia } 0}{\dots} \times 100\%$ $\sum \text{jumlah sarana pengangkutan yang dibutuhkan kab/kota } 0$	0%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Berdasarkan surat keterangan kepala dinas pekerjaan umum no 600/66.9/S.KET/PUPR/2024
			12	Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	$\frac{\sum \text{jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang tersedia } 0}{\dots} \times 100\%$ $\sum \text{jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang dibutuhkan kab/kota } 0$	0%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Berdasarkan surat keterangan kepala dinas pekerjaan umum no 600/66.9/S.KET/PUPR/2024
			13	Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	$\frac{\sum \text{jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah yang tersambung dengan IPALD } 0}{\dots} \times 100\%$	0%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Berdasarkan surat keterangan kepala dinas pekerjaan umum no 600/66.9/S.KET/PUPR/2024 menerangkan tidak
					$\sum \text{jumlah rumah yang terlayani dengan SPALD-T pada kab/kota } 0$			

		14	Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	$\frac{\sum \text{jumlah rumah yang tangki septiknya sudah disedot } 0}{\text{-----}} \times 100\%$ $\sum \text{jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPADLD-S } 0$	0%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Berdasarkan surat keterangan kepala dinas pekerjaan umum no 600/66.9/S.KET/PUPR/2024 menerangkan tidak ada E.14	
	Output	6	1	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	$\frac{\sum \text{Jumlah bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi yang berlaku } 0}{\text{-----}} \times 100\%$ $\sum \text{jumlah bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) } 0$	0%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Berdasarkan surat keterangan kepala dinas pekerjaan umum no 600/66.9/S.KET/PUPR/2024 menerangkan tidak ada F.1
			2	Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting		542	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
			3	Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung	Ada/Tidak	Ada	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Berdasarkan surat keterangan kepala dinas pekerjaan umum no 600/66.9/S.KET/PUPR/2024 menerangkan tidak ada F.3
			4	Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung	Ada/Tidak	Ada	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Berdasarkan surat keterangan kepala dinas pekerjaan umum no 600/66.9/S.KET/PUPR/2024 menerangkan tidak ada F.4
			5	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	Sudah Cukup Jelas	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Berdasarkan surat keterangan kepala dinas pekerjaan umum no 600/66.9/S.KET/PUPR/2024 menerangkan tidak ada F.5
			6	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah kabupaten	Sudah Cukup Jelas	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Berdasarkan surat keterangan kepala dinas pekerjaan umum no 600/66.9/S.KET/PUPR/2024 menerangkan tidak ada F.6

			7	Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota	Sudah Cukup Jelas	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Berdasarkan surat keterangan kepala dinas pekerjaan umum no 600/66.9/S.KET/PUPR/2024 menerangkan tidak ada F.7
			8	Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat	Sudah Cukup Jelas	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Berdasarkan surat keterangan kepala dinas pekerjaan umum no 600/66.9/S.KET/PUPR/2024 menerangkan tidak ada F.8
	Output	7	1	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan Kab/Kota	Sudah Cukup Jelas	951.375	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
			2	Panjang jalan yang dibangun	Sudah Cukup Jelas	905 Meter	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
			3	Panjang jembatan yg dibangun	Sudah Cukup Jelas	14,6 Meter	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
			4	Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	Sudah Cukup Jelas	22.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
			5	Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	Sudah Cukup Jelas	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Berdasarkan surat keterangan kepala dinas pekerjaan umum no 600/66.9/S.KET/PUPR/2024 menerangkan tidak ada G.5
			6	Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi	Sudah Cukup Jelas	9.755	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
			7	Panjang jembatan yang direhabilitasi	Sudah Cukup Jelas	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Berdasarkan surat keterangan kepala dinas pekerjaan umum no 600/66.9/S.KET/PUPR/2024 menerangkan tidak ada G.7
			8	Panjang jalan yang dipelihara	Sudah Cukup Jelas	1601	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	

		9	Panjang jembatan yang dipelihara	Sudah Cukup Jelas	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Berdasarkan surat keterangan kepala dinas pekerjaan umum no 600/66.9/S.KET/PUPR/2024 menerangkan tidak ada F.2	
	Output	8	1	Jumlah Pelatihan Tenaga operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota	Sudah Cukup Jelas	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Berdasarkan surat keterangan kepala dinas pekerjaan umum no 600/66.9/S.KET/PUPR/2024 menerangkan tidak ada F.1
			2	Jumlah tenaga kerja operator/teknisi/analisis yang terlatih di wilayah kabupaten/kota	Sudah Cukup Jelas	50	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Berdasarkan surat keterangan kepala dinas pekerjaan umum no 600/66.9/S.KET/PUPR/2024 menerangkan tidak ada F.2
			3	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota	Sudah Cukup Jelas	50	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Berdasarkan surat keterangan kepala dinas pekerjaan umum no 600/66.9/S.KET/PUPR/2024 menerangkan tidak ada F.3
			4	Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir	Ada/tidak	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Berdasarkan surat keterangan kepala dinas pekerjaan umum no 600/66.9/S.KET/PUPR/2024 menerangkan tidak ada F.4
			5	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota	Sudah Cukup Jelas	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Berdasarkan surat keterangan kepala dinas pekerjaan umum no 600/66.9/S.KET/PUPR/2024 menerangkan tidak ada F.5
			6	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	Sudah Cukup Jelas	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Berdasarkan surat keterangan kepala dinas pekerjaan umum no 600/66.9/S.KET/PUPR/2024 menerangkan tidak ada F.6

			7	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	Sudah Cukup Jelas	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Berdasarkan surat keterangan kepala dinas pekerjaan umum no 600/66.9/S.KET/PUPR/2024 menerangkan tidak ada F.7
			8	Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	Sudah Cukup Jelas	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Berdasarkan surat keterangan kepala dinas pekerjaan umum no 600/66.9/S.KET/PUPR/2024 menerangkan tidak ada F.8
			9	Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten /kota	Sudah Cukup Jelas	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Berdasarkan surat keterangan kepala dinas pekerjaan umum no 600/66.9/S.KET/PUPR/2024 menerangkan tidak ada F.9
			10	Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi /analisis konstruksi di wilayah kabuapten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.	Sudah Cukup Jelas	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Berdasarkan surat keterangan kepala dinas pekerjaan umum no 600/66.9/S.KET/PUPR/2024 menerangkan tidak ada F.10
			11	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis	Sudah Cukup Jelas	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Berdasarkan surat keterangan kepala dinas pekerjaan umum no 600/66.9/S.KET/PUPR/2024 menerangkan tidak ada F.11
			12	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/ teknisi/analisis di wilayah kab/kota	Sudah Cukup Jelas	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Berdasarkan surat keterangan kepala dinas pekerjaan umum no 600/66.9/S.KET/PUPR/2024 menerangkan tidak ada F.12

			13	Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota	Sudah Cukup Jelas	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Berdasarkan surat keterangan kepala dinas pekerjaan umum no 600/66.9/S.KET/PUPR/2024 menerangkan tidak ada F.13
			14	Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	Sudah Cukup Jelas	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Berdasarkan surat keterangan kepala dinas pekerjaan umum no 600/66.9/S.KET/PUPR/2024 menerangkan tidak ada F.14
			15	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Sudah Cukup Jelas	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Berdasarkan surat keterangan kepala dinas pekerjaan umum no 600/66.9/S.KET/PUPR/2024 menerangkan tidak ada F.15
			16	Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Sudah Cukup Jelas	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Berdasarkan surat keterangan kepala dinas pekerjaan umum no 600/66.9/S.KET/PUPR/2024 menerangkan tidak ada F.16
			17	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Sudah Cukup Jelas	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Berdasarkan surat keterangan kepala dinas pekerjaan umum no 600/66.9/S.KET/PUPR/2024 menerangkan tidak ada F.17
			18	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota	Sudah Cukup Jelas	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Berdasarkan surat keterangan kepala dinas pekerjaan umum no 600/66.9/S.KET/PUPR/2024 menerangkan tidak ada F.18
			19	Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota	Sudah Cukup Jelas	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Berdasarkan surat keterangan kepala dinas pekerjaan umum no 600/66.9/S.KET/PUPR/2024 menerangkan tidak ada F.19

			20	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota	Sudah Cukup Jelas	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Berdasarkan surat keterangan kepala dinas pekerjaan umum no 600/66.9/S.KET/PUPR/2024 menerangkan tidak ada F.20
			21	Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota	Sudah Cukup Jelas	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Berdasarkan surat keterangan kepala dinas pekerjaan umum no 600/66.9/S.KET/PUPR/2024 menerangkan tidak ada F.21
			22	Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	Sudah Cukup Jelas	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Berdasarkan surat keterangan kepala dinas pekerjaan umum no 600/66.9/S.KET/PUPR/2024 menerangkan tidak ada F.22
			23	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Sudah Cukup Jelas	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Berdasarkan surat keterangan kepala dinas pekerjaan umum no 600/66.9/S.KET/PUPR/2024 menerangkan tidak ada F.23
			24	Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Sudah Cukup Jelas	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Berdasarkan surat keterangan kepala dinas pekerjaan umum no 600/66.9/S.KET/PUPR/2024 menerangkan tidak ada F.24
			25	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Sudah Cukup Jelas	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Berdasarkan surat keterangan kepala dinas pekerjaan umum no 600/66.9/S.KET/PUPR/2024 menerangkan tidak ada F.25
4	Urusan Perumahan Rakyat	Output	1	1) Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	Sudah Cukup Jelas	0	Dinas Perumahan, Pemukiman	
				2) Jumlah rumah yang terkena bencana alam	Sudah Cukup Jelas	0	Dinas Perumahan, Pemukiman	

			3)	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	Sudah Cukup Jelas	0	Dinas Perumahan, Pemukiman	
			4)	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	Sudah Cukup Jelas	0	Dinas Perumahan, Pemukiman	
			5)	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	Sudah Cukup Jelas	0	Dinas Perumahan, Pemukiman	
			6)	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	Sudah Cukup Jelas	0	Dinas Perumahan, Pemukiman	
			7)	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	Sudah Cukup Jelas	0	Dinas Perumahan, Pemukiman	
			8)	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	Sudah Cukup Jelas	0	Dinas Perumahan, Pemukiman	
			9)	Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	Sudah Cukup Jelas	0	Dinas Perumahan, Pemukiman	
	Output	2	1)	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Sudah Cukup Jelas	0	Dinas Perumahan, Pemukiman	
			2)	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Sudah Cukup Jelas	0	Dinas Perumahan, Pemukiman	
			3)	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Sudah Cukup Jelas	0	Dinas Perumahan, Pemukiman	
			4)	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Sudah Cukup Jelas	0	Dinas Perumahan, Pemukiman	

			5)	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Sudah Cukup Jelas	0	Dinas Perumahan, Pemukiman		
		Output	6)	Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	Sudah Cukup Jelas	0	Dinas Perumahan, Pemukiman		
			1)	Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	Sudah Cukup Jelas	93	Dinas Perumahan, Pemukiman		
			2)	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	Sudah Cukup Jelas	0	Dinas Perumahan, Pemukiman		
		Output	3)	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	Sudah Cukup Jelas	0	Dinas Perumahan, Pemukiman		
			4)	1) Jumlah rumah di kab/kota	Sudah Cukup Jelas	31.664	Dinas Perumahan, Pemukiman		
				2) Jumlah unit Peningkatan Kualitas RTLH	Sudah Cukup Jelas	0	Dinas Perumahan, Pemukiman		
				3) Jumlah rumah tidak layak huni	Sudah Cukup Jelas	13.183	Dinas Perumahan, Pemukiman		
				4) Jumlah rumah yang tidak dihuni	Sudah Cukup Jelas	0	Dinas Perumahan, Pemukiman		
				5) Rasio rumah dan KK	Jumlah KK 42.416 ----- Jumlah total unit rumah 31.664	134%	Dinas Perumahan, Pemukiman		
				6) Jumlah rumah pembangunan baru	Sudah Cukup Jelas	0	Dinas Perumahan, Pemukiman		
			Output	5)	1) Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	Sudah Cukup Jelas	164	Dinas Perumahan, Pemukiman	
				2)	Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	Sudah Cukup Jelas	23.382	Dinas Perumahan, Pemukiman	
				3)	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	Sudah Cukup Jelas	25.667	Dinas Perumahan, Pemukiman	
			4)	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)	Sudah Cukup Jelas	20.356	Dinas Perumahan, Pemukiman		
			5)	Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	Sudah Cukup Jelas	0	Dinas Perumahan, Pemukiman		
			6)	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	Sudah Cukup Jelas	17450	Dinas Perumahan, Pemukiman		
			7)	Jumlah pengembang yang tersertifikasi	Sudah Cukup Jelas	0	Dinas Perumahan, Pemukiman		

			8)	Jumlah pengembang yang teregistrasi	Sudah Cukup Jelas	0	Dinas Perumahan, Pemukiman	
			9)	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	Sudah Cukup Jelas	0	Dinas Perumahan, Pemukiman	
5	Urusan Ketentaraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Output	1	1	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	Sudah Cukup Jelas	8	PoL- PP
				2	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	Sudah Cukup Jelas	381	PoL- PP
				3	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	Sudah Cukup Jelas	8	PoL- PP
				4	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	Sudah Cukup Jelas	4	PoL- PP
				5	Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	Ada/tidak	Ada	PoL- PP
				6	Tersedianya sarana prasarana minimal	Sudah Cukup Jelas	40	PoL- PP
		Output	2	1				
		Output	3	1	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun 0 -----x 100% Jumlah satu dokumen KRB yang lengkap dan sudah disahkan 0	100%	BPBD
				2	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana 125.461 -----x 100% Seluruh penduduk di kawasan rawan rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana 125.461	100%	BPBD
		Output	4	1	Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun 0 -----x100% Jumlah satu dokumen RPB yang lengkap dan sudah disahkan 0	0%	BPBD

			2	Persentase penyelesaian dokumen Rencana Kontinjensi dan Mendisiminasikan (renkon) sampai dinyatakan sah/legal	Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun 0 -----x100% Jumlah satu dokumen rekon yang lengkap dan sudah disahkan 0	0%	BPBD		
			3	Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	Jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan 55 -----x100% Jumlah aparatur dengan warga negara di kawasan rawan bencana 55	100%	BPBD		
			4	Persentase warga negara yang ikut pelatihan	Jumlah warga negara yang ikut pelatihan 55 -----x100% Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana 55	100%	BPBD		
			5	Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanaaulanaan bencana	Jumlah warga negara yang dapat layanan pusdalops 2.614 -----x100% Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana 2.614	100%	BPBD		
			6	Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	Jumlah warga negara yang mendapat layanan peralatan perlindungan 4.608 -----x100% Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana 4.608	100%	BPBD		
		Output	5	1	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	Jumlah kecepatan repon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan KLB 2 -----x100% Jumlah seluruh penetapan status KLB 2	100%	BPBD & POL PP	
				2	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	Jumlah kecepatan repon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan darurat bencana 2 -----x100% Jumlah seluruh penetapan status darurat bencana 2	100%	BPBD & POL PP	

			3	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	Jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana 32 -----x100% Jumlah keseluruhan petugas dalam penanganan darurat bencana 32	100%	BPBD & POL PP		
			4	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	Jumlah korban yang berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi 4.810 ----- x100% Perkiraan jumlah korban keseluruhan dari bencana 4.810	100%	BPBD & DAMKAR		
		Output	6	1)	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota	Sudah Cukup Jelas	17	DAMKAR	
				2)	Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	Ada/tidak	tidak	DAMKAR	
				3)	Tersedianya aparaturnya selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	Ada/tidak	tidak	DAMKAR	
				4)	Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa	Dibuat dalam bentuk daftar	1	DAMKAR	
				5)	Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	Dibuat dalam bentuk daftar	73	DAMKAR	
				6)	Jumlah aparaturnya pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	Sudah Cukup Jelas	5	DAMKAR	

			7)	Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dimas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	Sudah Cukup Jelas	0	DAMKAR	
			8)	Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	Sudah Cukup Jelas	34	DAMKAR	
		Output	7	1)				
6	Urusan Sosial	Output	1	1.	Jumlah layanan data dan pengaudan yang dimiliki	Sudah Cukup Jelas	0	Dinas Sosial
				2)	Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM	Sudah Cukup Jelas	830	Dinas Sosial
				3)	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	Sudah Cukup Jelas	0	Dinas Sosial
				4)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	Sudah Cukup Jelas	803	Dinas Sosial
				5)	Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	Sudah Cukup Jelas	1 Unit	Dinas Sosial
				6)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	Sudah Cukup Jelas	125	Dinas Sosial
				7)	Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	Sudah Cukup Jelas	0	Dinas Sosial
				8)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	Sudah Cukup Jelas	130	Dinas Sosial
				9)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	Sudah Cukup Jelas	5	Dinas Sosial

			10)	Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/ shelter	Sudah Cukup Jelas	0	Dinas Sosial	
			11)	Jumlah paket perbekalan Kesehatan yang tersedia	Sudah Cukup Jelas	0	Dinas Sosial	
			12)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	Sudah Cukup Jelas	0	Dinas Sosial	
			13)	Jumlah tenaga Kesehatan yang disediakan di rumah singgah	Sudah Cukup Jelas	0	Dinas Sosial	
			14)	Jumlah pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	Sudah Cukup Jelas	28	Dinas Sosial	
			15)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	Sudah Cukup Jelas	40	Dinas Sosial	
			16)	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	Sudah Cukup Jelas	120	Dinas Sosial	
			17)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	Sudah Cukup Jelas	0	Dinas Sosial	
			18)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan Kesehatan dasar	Sudah Cukup Jelas	83	Dinas Sosial	

			19)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	Sudah Cukup Jelas	0	Dinas Sosial		
			20)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	Sudah Cukup Jelas	0	Dinas Sosial		
			21)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	Sudah Cukup Jelas	0	Dinas Sosial		
		Output	2	1)	Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan	Sudah Cukup Jelas	135	Dinas Sosial	
				2)	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	Sudah Cukup Jelas	135	Dinas Sosial	
				3)	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	Sudah Cukup Jelas	0	Dinas Sosial	
				4)	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	Sudah Cukup Jelas	0	Dinas Sosial	
				5)	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	Ada/tidak	Tidak	Dinas Sosial	
				6)	Jumlah pekerja sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	Sudah Cukup Jelas	28	Dinas Sosial	
7	Urusan Ketenagakerjaan	Output	1	1	Dokumen Perencanaan tenaga kerja Kabupaten/kota	Mengidentifikasi/membandingkan kesesuaian dokumen RTK yang telah tersusun dengan peraturan perundangan yang berlaku	ada	Disnaker	

			2	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja	Menghitung selisih 6 (enam) indikator ketenaga kerjaan dengan cara angka realisasi dikurangi dengan angka target dibagi dengan angka realisasi dikali 100% $\frac{\text{Realisasi indikator} - \text{target indikator}}{\text{target indikator}} \times 100\%$ Realisasi 3	67%	Disnaker	
			3	Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota	Jumlah seluruh perusahaan yang melaporkan penyusunan RTK pada tahun pelaporan	0	Disnaker	
	Output	2	1	Persentase penerapan program PBK dengan kualifikasi klaster	Jumlah penerapan program PBK kualifikasi KKNi atau okupasi pada tahun n 10 $\frac{\text{Jumlah penerapan program PBK}}{\text{Target}} \times 100\%$ Keseluruhan program pelatihan baik kualifikasi kompetensi maupun klaster pada tahun n 10	100%	Disnaker	
			2	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	Jumlah instruktur bersertifikat kompetensi pada tahun n 2 $\frac{\text{Jumlah instruktur bersertifikat}}{\text{Target}} \times 100\%$ Jumlah instruktur seluruhnya pada tahun n 2	100%	Disnaker	
			3	Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	Jumlah instruktur pada tahun n 2 $\frac{\text{Jumlah instruktur}}{\text{Jumlah peserta pelatihan}} \times 100\%$ Jumlah peserta pelatihan pada tahun n 2	100%	Disnaker	
			4	Persentase LPK yang terakreditasi	Jumlah LPK yang terakreditasi pada tahun n 0 $\frac{\text{Jumlah LPK terakreditasi}}{\text{Jumlah Seluruh LPK}} \times 100\%$ Jumlah Seluruh LPK pada tahun n 3	0%	Disnaker	
			5	Persentase LPK yang memiliki perizinan	Jumlah LPK yang memiliki perizinan pada tahun n 3 $\frac{\text{Jumlah LPK berizin}}{\text{Jumlah LPK terdata}} \times 100\%$ Jumlah LPK yang terdata pada tahun n 3	100%	Disnaker	

			6	Jumlah pengangguran yang dilatih	Sudah Cukup Jelas	74	Disnaker		
			7	Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	Jumlah lulusan pelatihan bersertifikat pelatihan pada tahun n 74 ----- x 100 % Jumlah orang yang dilatih pada tahun n 74	100%	Disnaker		
			8	Persentase penyerapan lulusan	Jumlah lulusan yang bekerja pada tahun n 74 ----- x 100 % Jumlah lulusan pada tahun n 74	100%	Disnaker		
			9	Lulusan bersertifikat kompetensi	Jumlah lulusan pelatihan bersertifikat kompetensi pada tahun n 74 ----- x 100 % Jumlah lulusan bersertifikat pelatihan pada tahun n 74	100%	Disnaker		
			10	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan	Σ CPMI dilatih 0 ----- x 100 % Σ CPMI terdaftar 0	0%	Disnaker		
			11	Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	Sudah Cukup Jelas	0	Disnaker		
		Output	3	1	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	Jumlah perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas pada tahun n 0 ----- x 100 % Jumlah perusahaan pada tahun n 156	0%	Disnaker	
			2		Data tingkat produktivitas total	Pertumbuhan ekonomi - (Pertumbuhan modal + Pertumbuhan tenaga kerja)	2,07	Disnaker	Pertumbuhan Ekonomi 3,94, Pertumbuhan Tenaga Kerja 1,87 (74,63-72,76)
		Output	4	1	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	Jumlah perusahaan yang telah memiliki PP pada tahun n 0 ----- x 100 % Jumlah perusahaan yang memiliki tenaga kerja 10 orang atau lebih pada tahun n 0	0%	Disnaker	

			2	Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	Jumlah perusahaan yang telah memiliki PKB pada tahun n 0 ----- x 100 % Jumlah perusahaan yang memiliki SP/SB 0	0%	Disnaker	
			3	Rekapitulasi tahunan jumlah SP/SB yang tercatat federasi SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	Sudah Cukup Jelas	0	Disnaker	
			4	Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah	Jumlah perusahaan yang sudah menyusun struktur dan skala upah 0 ----- x 100 % Jumlah perusahaan yang telah mengatur syarat kerja (yang diatur dalam PP atau PKB) 0	0%	Disnaker	
			5	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS ketenaga Ketenaga kerjaan	Jumlah perusahaan yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS ketenaga kerjaan 0 ----- x 100 % Jumlah perusahaan berdasarkan perusahaan wajib lapor 0	0%	Disnaker	
			6	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	Jumlah perusahaan yang berselisih 0 ----- x 100 % Jumlah perusahaan pada tahun n 156	0%	Disnaker	
			7	Jumlah mogok kerja	Sudah Cukup Jelas	0	Disnaker	
			8	Jumlah penutupan perusahaan	Sudah Cukup Jelas	0	Disnaker	
			9	Jumlah perselisihan kepentingan	Sudah Cukup Jelas	0	Disnaker	
			10	jumlah perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	Sudah Cukup Jelas	0	Disnaker	
			11	Jumlah perselisihan PHK	Sudah Cukup Jelas	0	Disnaker	
			12	Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	Sudah Cukup Jelas	0	Disnaker	
			13	Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	Sudah Cukup Jelas	0	Disnaker	

		14	Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartite kabupaten/kota	Ada/Tidak	tidak	Disnaker	
		15	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui perjanjian bersama oleh mediator hubungan industrial	Jumlah perjanjian bersama 0 ----- x 100 % Jumlah kasus perselisihan 0	0%	Disnaker	
	Output	5	1	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota	Sudah Cukup Jelas	96	Disnaker
			2	Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota	Sudah Cukup Jelas	364	Disnaker
			3	Jumlah bursa kerja khusus (BKK) wilayah kab/kota	Sudah Cukup Jelas	9	Disnaker
			4	Jumlah tenaga kerja khusus terdaftar dalam satu kab/kota	Sudah Cukup Jelas	0	Disnaker
			5	Jumlah pejabat Fungsional pengantar kerja	Sudah Cukup Jelas	1	Disnaker
			6	Jumlah lembaga penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota	Sudah Cukup Jelas	0	Disnaker
			7	jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenaga kerjaan kab/kota	Sudah Cukup Jelas	0	Disnaker
			8	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) online (SISNAKER)	Sudah Cukup Jelas	1	Disnaker
			9	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	\sum CPMI/CTKI yang mendapatkan sosialisasi 0 ----- x 100 % \sum CPMI/CTKI 3	0%	Disnaker
			10	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang yang terdata	Sudah Cukup Jelas	3	Disnaker
			11	Jumlah pekerja migran indonesia (PMI)/tenaga kerja indonesia (TKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan	\sum Fasilitas PMI yang dipulangkan 0 ----- x 100 % \sum PMI yang pulang 0	0%	Disnaker

				12	Jumlah pekerja migran indonesia (PMI)/tenaga kerja indonesia (TKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	$\frac{\sum \text{PMI/TKI yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja } 0}{\sum \text{PMI/TKI } 0} \times 100 \%$	0%	Disnaker	
				13	Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI purna dan keluarganya	$\frac{\sum \text{PMI atau TKI purna dan keluarganya yang diberdayakan } 0}{\sum \text{PMI/TKI purna dan keluarganya } 0} \times 100 \%$	0%	Disnaker	
				14	Jumlah layanan Terpadu Satu Atap (L TSA) yang dibentuk	$\frac{\sum \text{L TSA yang terbentuk } 0}{\sum \text{jumlah daerah kantong PMI/TKI } 0} \times 100 \%$	0%	Disnaker	
8	Urusan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak	Output	1	1)	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	Sudah Cukup Jelas	0	DP3AP2KB	
				2)	Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	Sudah Cukup Jelas	0	DP3AP2KB	
		Output	2	1)	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	Sudah Cukup Jelas	0	DP3AP2KB	
				2)	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	Sudah Cukup Jelas	0	DP3AP2KB	
				3)	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	$\frac{\text{Jumlah korban kekerasan anak yang dilayani } 17}{\text{Jumlah korban kekerasan anak di tingkat kabupaten } 17} \times 100 \%$	100%	DP3AP2KB	
				4)	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	Sudah Cukup Jelas	0	DP3AP2KB	
				5)	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)	Sudah Cukup Jelas	0	DP3AP2KB	

		Output	3	1)	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	Sudah Cukup Jelas	0	DP3AP2KB	
				2)	Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih	Sudah Cukup Jelas	0	DP3AP2KB	
				3)	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	Sudah Cukup Jelas	0	DP3AP2KB	
				4)	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	Sudah Cukup Jelas	0	DP3AP2KB	
				5)	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	Sudah Cukup Jelas	0	DP3AP2KB	
				6)	Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yang telah distandardisasi	Sudah Cukup Jelas	0	DP3AP2KB	
				7)	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	Jumlah korban kekerasan perempuan yang mendapatkan layanan 6 ----- x 100 % Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan 6	100%	DP3AP2KB DP3AP2KB	
9	Urusan Pangan	Output	1	1)	Tersedianya infrastruktur perundangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	Ada/tidak infrastruktur pergudangan	Ada	Dinas Ketahan Pangan	
				2)	Tersalurkan pangan pokok dan pangan lainnya	Ada/tidak penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya	Ada	Dinas Ketahan Pangan	
				3)	tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	Ada/tidak regulasi harga minimum daerah	Tidak	Dinas Ketahan Pangan	
				4)	terlakananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	Ada/tidak kegiatan pemberdayaan masyarakat	Ada	Dinas Ketahan Pangan	

			5)	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	Ada/tidak peta ketahanan dan kerentanan pangan	Ada	Dinas Ketahan Pangan	
			6)	Tertanganinya kerawanan pangan	Ada/tidak penanganan daerah rentan rawan pangan	Ada	Dinas Ketahan Pangan	
			7)	Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	Ada/tidak penyaluran cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	Ada	Dinas Ketahan Pangan	
			8)	Tertindakannya pengawasan keamanan pangan segar	Ada/tidak kegiatan pengawasan keamanan pangan segar	Tidak	Dinas Ketahan Pangan	
10	Urusan Pertanahan	Output	1	1) SK izin lokasi yang diterbitkan oleh Bupati	Jumlah izin lokasi yang diterbitkan + jumlah surat penolakan permohonan izin lokasi setelah melalui proses (ditolak seluruhnya) 0 ----- x 100% Jumlah permohonan izin lokasi dalam 1 tahun 0	0%	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan	
				2) SK Bupati tentang penetapan Tanah Objek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee dan daftar Subyek	Jumlah penerbitan SK penetapan tanah objek landreform yang bersumber dari tanah kelebihan maksimum absentee 0 -----x 100% Jumlah permohonan yang diusulkan panitia pertimbangan landreform 0	0%	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	
				3) SK Bupati tentang penetapan basarannya ganti rugi kepada bekas pemilik tanah kelebihan maksimum/absentee	Jumlah luas tanah yang dibayarkan ganti rugi kepada bekas pemilik tanah kelebihan maksimum/absentee 0 -----x 100% Jumlah luas tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah objek landerform yang berasal dari tanah kelebihan maksimum absentee dan daftar subjek 0	0%	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	
				4) Dokumen izin membuka tanah	Jumlah dokumen izin membuka tanah yang disetujui + jumlah izin membuka tanah yang ditolak 0 -----x 100% Jumlah dokumen izin membuka tanah yang dimohon dalam 1 tahun 0	0%	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	

				5)	Dokumen Perencanaan penggunaan tanah Kabupaten	Jumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik 0 -----x 100%	0%	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	
						Jumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik yang direncanakan dalam 1 tahun 0			
11	Urusan Lingkungan Hidup	Output	1	1)	Hasil perhitungan kabupaten terhadap :			Dinas Lingkungan Hidup	
					a. Indeks kualitas air (IKA) Indeks Kualitas Udara (IKU) b. Indeks tutupan hutan (ITH) c. Indeks Tutupan Hutan (ITH)	Indeks Kualitas Air (IKA) Rumus Metode IP : $Nilai\ relatif = \frac{C_i}{L_{ij}}$ $IP = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})^2_{Rata-rata} + (C_i/L_{ij})^2_{Maksimum}}{2}}$ $0 \leq P_{ij} \leq 1,0 \rightarrow$ baik (memenuhi baku mutu) $1,0 < P_{ij} \leq 5,0 \rightarrow$ cemar ringan $5,0 < P_{ij} \leq 10,0 \rightarrow$ cemar sedang $P_{ij} > 10,0 \rightarrow$ cemar berat $IKTL = 100 - ((84,3 - (TH \times 100)) \times \frac{50}{54,3})$ $IKU = 100 - [50/0.9 \times (I_{eu} - 0.1)]$ dimana: IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan TH = Tutupan Hutan	IKA = 70.00 IKU = 93.15 ITH = 45.67		
		Output	2	1)	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota	1.Tersedianya informasi terkait rasio angkutan pengelolaan sampah terhadap volume timbulan sampah 2.Tersedianya informasi terkait kapasitas TPA terhadap volume timbulan sampah 3.Tersedianya informasi terkait jumlah TPST dibagi jumlah sampah pada masing - masing lingkungan	Tersedia	Dinas Lingkungan Hidup	
		Output	3	1)	Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota 29 ----- x 100 %	100%	Dinas Lingkungan Hidup	

				Jumlah usulan permohonan yang teregistrasi 29			
		2)	Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	Jumlah PPLHD yang ada 3 ----- x 100 %	10%	Dinas Lingkungan Hidup	
				Jumlah kegiatan dan atau usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kab/kota 29			
		3)	Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/ kota	Jumlah MHA yang diakui 0 ----- x 100 % Jumlah usulan MHA 0 Masyarakat Hukum Adat adalah WNI yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun	0%	Dinas Lingkungan Hidup	
		4)	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	Jumlah MHA yang mendapatkan pelatihan 0 ----- x 100 % Jumlah MHA yang ada 0	0%	Dinas Lingkungan Hidup	
		5)	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat/rencana 22 ----- x 100 % target lembaga kemasyarakatan yang akan diberikan diklat 22	100%	Dinas Lingkungan Hidup	

				6)	Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota yang ditangani	Pengaduan masyarakat yang ditangani 3 ----- x 100 % total jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi 3	100%	Dinas Lingkungan Hidup	
12	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Output	1	1	Penerbitan akta perkawinan	Jumlah akta perkawinan yang diterbitkan 260 ----- x 100 % Peristiwa perkawinan yang dilaporkan 260	100%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
				2	Penerbitan akta perceraian	Jumlah akta perceraian yang diterbitkan 4 ----- x 100 % Peristiwa perceraian yang dilaporkan 4	100%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
				3	Penerbitan akta kematian	Jumlah akta kematian yang diterbitkan 367 ----- x 100 % Peristiwa kematian yang dilaporkan 367	100%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
				4	Penyajian data kependudukan	Jumlah penyajian kependudukan skala kabupaten kota dalam satu tahun 2 ----- x 100 % 2 Tahun 4	50%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
13	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Output	1	1)	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	Sudah Cukup Jelas	37	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
				2)	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	Sudah Cukup Jelas	37	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	

			3)	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	Sudah Cukup Jelas	37	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
			4)	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	Sudah Cukup Jelas	37	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		Output	2	1)	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	Sudah Cukup Jelas	37	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				2)	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	Sudah Cukup Jelas	37	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				3)	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	Sudah Cukup Jelas	37	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				4)	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	Sudah Cukup Jelas	37	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
14	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Output		1	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di Perdakan	Ada/tidak	Tidak	berdasarkan surat keterangan nomor: 400.13..51.1/200/DP3AP2 KB

			2	Media Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	Median Usia Kawin Pertama Wanita Usia 25-49 tahun didefinisikan sebagai usia dimana 50% dari semua perempuan dalam kelompok umur sudah melakukan perkawinan. Trend usia kawin pertama penting untuk menentukan pola fertilitas di Indonesia.	21	DP3AP2KB		
			3	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	$ASFR_i = \frac{b_i}{P_i} \times k$ ASFR adalah angka kelahiran di kelompok usia 15-19 tahun	48%	DP3AP2KB		
			4	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	Jumlah masyarakat yang terpapar isi pesan program KK BPK (advokasi dan KIE) 26.688 ----- x 100 % Jumlah sasaran masyarakat program KKBPK (advokasi dan KIE 45.622	58%	DP3AP2KB		
			5	Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	1	DP3AP2KB	DP3AP2KB	
		Output	2	1	Persentase Fasilitasi kesehatan (faskes) yang siap melayani KB MKJP	Jumlah faskes yang siap melayani KB MKJP 16 ----- x 100 % Jumlah Faskes 16	100%	DP3AP2KB	
				2	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah peserta KB aktif 2.520 ----- x 100 % Jumlah PUS 17.241	14,62%	DP3AP2KB	
				3	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	Jumlah kelompok kerja KKBPK yang efektif	129	DP3AP2KB	

				4	Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	Jumlah peserta KB pasca persalinan menurut metode kontrasepsi cara modern 1.127 ----- x 100 % Jumlah sasaran peserta KB pasca persalinan = 1.627 KB pasca persalinan adalah pelayanan KB yang diberikan setelah persalinan sampai dengan kurun waktu 42 hari	69%	DP3AP2KB DP3AP2KB	
		Output	3	1	Persentase kesertaan KB di kabupaten dengan kesertaan rendah	Daftar Desa/Kelurahan yang memiliki persentase kesertaan KB paling rendah dalam satu Kabupaten/Kota. Data/informasi yang diambil adalah 50% dari total seluruh Desa/Kelurahan dengan persentase kesertaan KB paling rendah	22%	DP3AP2KB	
				2	Persentase kesertaan KB keluarga penerima bantuan iuran (PBI)	Jumlah peserta KB pada keluarga penerima PBI 5.294 ----- x 100 % Jumlah keluarga PBI 12.707 Penerima bantuan iuran (PBI) adalah peserta yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu yang iuran jaminan kesehatan dibayarkan oleh pemerintah	42%	DP3AP2KB	
15	Urusan Perhubungan	Output	1	1	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C	Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C yang tersedia 0 ----- x 100 % Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan sesuai dengan standar pelayanan penyelenggaraan terminal angkutan jalan 0	0%	Dinas Perhubungan	
				2)	Terlaksananya pelayanan uji berkala	Jumlah kendaraan yang diuji per tahun 0 ----- x 100 %	0%	Dinas Perhubungan	

					Jumlah kendaraan wajib uji 1.820			
			3)	Penetapan angkutan orang antar kota dalam kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	Jumlah penerapan tarif lintas penyebrangan 5 ----- x 100 %	100%	Dinas Perhubungan	
					Jumlah lintas penyebrangan dalam kabupaten atau kota 5			
			4)	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten atau kota	Jumlah pemasangan perlengkapan jalan kabupaten/kota 118 ----- x 100 %	1,25%	Dinas Perhubungan	
					Target kebutuhan perlengkapan jalan Kabupaten/kota 9.430			
		Output	2	1)	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten atau kota	Jumlah pemasangan perlengkapan jalan kabupaten atau kota 118 ----- x 100 %	1,25%	Dinas Perhubungan
					Target kebutuhan perlengkapan jalan Kabupaten/kota 9.430			
16	Urusan Komunikasi dan Informatika	Output	1	1)	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di jaringan intra pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah perangkat daerah yang saling terkoneksi di jaringan intra pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh dinas Kominfo 41 ----- x 100 %	80,39%	Dinas Kominfo
					jumlah perangkat daerah 51			
				2)	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas koinfo	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan dinas Kominfo 35 ----- x 100 %	68,63%	Dinas Kominfo
					Jumlah perangkat daerah 51			

					Akses internet berkualitas : - Tingkat realibilitas (SLA) 97-98% - Tingkat ketersediaan (semua perangkat daerah sampai ke desa sudah tersedia) - Besaran bandwidth yang memadai (min. 2 mbps)			
			3)	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	Sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan dinas kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah (Ya atau Tidak)	Ya 53	Dinas Kominfo	
		2	1)	Persentase kegiatan (Event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada pemerintah daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain sub domain instansi penyelenggaraan negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015	Jumlah kegiatan (Event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada pemerintah daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain sub domain instansi penyelenggaraan negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015 53 ----- x 100 % jumlah kegiatan (event) perangkat daerah dan pelayanan publik pada pemerintah daerah 53	100%	Dinas Kominfo	
			2)	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	Jumlah perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar 16 ----- x 100 % jumlah perangkat daerah 51	31%	Dinas Kominfo	
			3)	Persentase perangkat daerah yang mengimplemenrasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang - undangan	Jumlah perangkat daerah yang mengimplemenrasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang - undangan 5 ----- x 100 % jumlah perangkat daerah 51	9,80%	Dinas Kominfo	

			4)	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintah) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	Layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintah) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik 0 ----- x 100 % jumlah perangkat daerah 51	0%	Dinas Kominfo	
			5)	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintah) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	Jumlah layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintah) yang memanfaatkan sertifikat elektronik 1 ----- x 100 % Jumlah layanan 1	100%	Dinas Kominfo	
			6)	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan perundang-undangan	Jumlah sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan perundang-undangan 12 ----- x 100 % jumlah sistem elektronik 16	75%	Dinas Kominfo	
			7)	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	Jumlah layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah 0 ----- x 100 % jumlah layanan publik dan layanan administrasi 0	0%	Dinas Kominfo	
			8)	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah 0 ----- x 100 % jumlah perangkat daerah 51	0%	Dinas Kominfo	
			9)	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	Jumlah perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah 0 ----- x 100 % jumlah perangkat daerah 51	0%	Dinas Kominfo	
			10)	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	Jumlah perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data 0 ----- x 100 % jumlah perangkat daerah 51	100%	Dinas Kominfo	

			11)	Persentase data yang dapat berbagi pakai	Jumlah data yang dapat berbagi pakai 12 ----- x 100 %	100%	Dinas Kominfo	
					jumlah data yang dimiliki pemerintah daerah 12			
			12)	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city 7 ----- x 100 %	13,73%	Dinas Kominfo	
					jumlah perangkat daerah 51			
			13)	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan dinas kominfo	Jumlah ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan dinas kominfo 0 ----- x 100 %	0,00%	Dinas Kominfo	
					jumlah ASN pengelola TIK 0			
			14)	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	(Ada atau Tidak ada): 1. Dokumen Master Plan - Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran - Penganggaran - Strategi - Peta Jalan - Arah Kebijakan - Cetak biru teknis/Peta rencana strategi	Ada	Dinas Kominfo	
					2. Perda/Perkada tentang pengelolaan TIK di daerah paling sedikit memuat tentang GCIO (Government Chief of Information Officer): - Penugasan pejabat - kewenangan - Tugas dan tanggung jawab			
	Output	3	1)	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kabupaten yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten	∑ komunikasi masyarakat atau mitra strategis pemerintah daerah kabupaten yang telah menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah 12 ----- x 100 % ∑ komunitas masyarakat atau mitra komunikasi pemerintah daerah kabupaten 12	100%	Dinas Kominfo	

					Komunitas masyarakat/mitra strategis termasuk di antaranya : KIM, FK Metra, JRKI, PWI, Blogger Daerah, Satgas Medsos				
			2)	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	$\frac{\sum \text{konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) 205 konten}}{\text{-----}} \times 100 \%$ $\frac{\sum \text{konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah Kabupaten 205}}{\text{-----}} \times 100 \%$	100%	Dinas Kominfo		
			3)	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	$\frac{\sum \text{diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP Konten 0}}{\text{-----}} \times 100 \%$ $\frac{\sum \text{Diseminasi dan layanan informasi publik 0}}{\text{-----}} \times 100 \%$	0%	Dinas Kominfo		
17	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Output	1	1	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah penerbitan izin usaha simpan pinjam koperasi pada tahun yang dilaporkan 0}}{\text{-----}} \times 100 \%$ Jumlah usaha simpan pinjam koperasi yang belum mempunyai izin usaha simpan pinjam 0	0%	Dinas Koperasi, perindustrian, perdagangan dan UMKM	
				2	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan 0}}{\text{-----}} \times 100 \%$ Jumlah permohonan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan 0	0%	Dinas Koperasi, perindustrian, perdagangan dan UMKM	

			3	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang diperiksa 4 ----- x 100 % Jumlah koperasi yang ada 101	3,96%	Dinas Koperasi, perindustrian, perdagangan dan UMKM	
			4	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah uaha impan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya 4 ----- x 100 % Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang ada 101	3,96%	Dinas Koperasi, perindustrian, perdagangan dan UMKM	
			5	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan 0 ----- x 100 % Jumlah koperasi yang ada 101	0%	Dinas Koperasi, perindustrian, perdagangan dan UMKM	
			6	Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah anggota koperasi yang mengikuti pelatihan perkoperasian 0 ----- x 100 % Jumlah anggota koperasi yang ada 8.739	0,00%	Dinas Koperasi, perindustrian, perdagangan dan UMKM	
			7	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan 0 ----- x 100 % Jumlah koperasi yang ada 101	0%	Dinas Koperasi, perindustrian, perdagangan dan UMKM	
			8	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	Sudah Cukup Jelas	0%	Dinas Koperasi, perindustrian, perdagangan dan UMKM	
			9	Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang telah diterbitkan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) 0 ----- x 100 % Jumlah koperasi yang ada 101	0%	Dinas Koperasi, perindustrian, perdagangan dan UMKM	

			10	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pembiayaan 0 ----- x 100 %	0%	Dinas Koperasi, perindustrian, perdagangan dan UMKM		
					Jumlah koperasi yang ada 101				
			11	Persentase yang yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pemasaran 0 ----- x 100 %	0%	Dinas Koperasi, perindustrian, perdagangan dan UMKM		
					Jumlah koperasi yang ada 101				
			12	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pendampingan kelembagaan dan usaha 0 ----- x 100 %	0%	Dinas Koperasi, perindustrian, perdagangan dan UMKM		
					Jumlah koperasi yang ada 101				
			13	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas kemitraan 69 ----- x 100 %	2%	Dinas Koperasi, perindustrian, perdagangan dan UMKM		
					Jumlah koperasi yang ada 3.420				
		Output	2	1	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	Jumlah pertumbuhan wirausaha baru 69 ----- x 100 %	2%	Dinas Koperasi, perindustrian, perdagangan dan UMKM	Tahun 2022 .3.351 tahun 2023 3.420 meningkat 69
					Jumlah wirausaha yang ada 3.420				
				2	Persentase Jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	Jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS) 0 ----- x 100 %	0%	Dinas Koperasi, perindustrian, perdagangan dan UMKM	
					Jumlah usaha mikro yang ada 3.420				
				3	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	Jumlah usaha mikro yang bermitra 0 ----- x 100 %	0%	Dinas Koperasi, perindustrian, perdagangan dan UMKM	
					Jumlah usaha mikro yang ada 3.420				

			4	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi 0 ----- x 100 %	0%	Dinas Koperasi, perindustrian,perdagangan dan UMKM	
					Jumlah usaha mikro yang belum memiliki standar dan sertifikasi produk 0			
			5	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran 0 ----- x 100 % Jumlah usaha mikro yang belum mendapatkan dukungan pemasaran 0	0%	Dinas Koperasi, perindustrian,perdagangan dan UMKM	
			6	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan 30 ----- x 100 % Jumlah usaha mikro yang ada 3.420	0,88%	Dinas Koperasi, perindustrian,perdagangan dan UMKM	
			7	Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendamping	Jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan kelambagaan dan usaha 100 ----- x 100 % Jumlah usaha mikro yang ada 3.420	2,92%	Dinas Koperasi, perindustrian,perdagangan dan UMKM	
18	Urusan Penanaman Modal	Output	1	1) PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Jumlah fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang bisa diberikan kepada investor	9	Dinas PTSP	
				2) Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	Tersedianya dokumen SOP pelaksanaan Pemberian fasilitas/Insentif penanaman modal	0	Dinas PTSP	
				3) Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan Pemberian fasilitas/Insentif penanaman modal pertahun	0	Dinas PTSP	
				4) Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	Jumlah kegiatan seminar bisnis/business forum, one on one meeting	20	Dinas PTSP	

			5)	Kegiatan pameran penanaman modal	Jumlah kegiatan pameran penanaman modal	1	Dinas PTSP		
			6)	Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	Jumlah kegiatan penerimaan misi penanaman modal	7	Dinas PTSP		
			7)	Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	Jumlah konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	2.399	Dinas PTSP		
			8)	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	Jumlah penerbitan perizinan dan non perizinan	2399	Dinas PTSP		
			9)	Laporan realisasi penanaman modal	Jumlah nilai realisasi penanaman modal yang terpantau di tingkat Kabupaten/Kota	2.666.200.000	Dinas PTSP		
			10)	Pembinaan aparaturnya penanaman modal tingkat kabupaten/kota	Jumlah aparaturnya dan penanam modal yang memahami ketentuan pelaksanaan kegiatan penanaman modal	4	Dinas PTSP		
			11)	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	Jumlah perusahaan yang mendapatkan pengawasan dan pelaksanaan penanaman modal	14	Dinas PTSP		
			12)	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan provinsi/ kabupaten/kota	Jumlah permintaan data dan informasi yang terpenuhi/ Jumlah permintaan data dan informasi yang diterima	2399	Dinas PTSP		
19	Urusan Kepemudaan dan Olahraga	Output	1	1)	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	0	Dinas Pemuda dan Olahraga	
				2)	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	0	Dinas Pemuda dan Olahraga	
		Output	2	1)	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawan dan kepeloporan pemuda	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawan dan kepeloporan pemuda	0	Dinas Pemuda dan Olahraga	
				2)	Jumlah pengelolaan organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	Jumlah pengelolaan organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	0	Dinas Pemuda dan Olahraga	
		Output	3	1)	Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	21	Dinas Pemuda dan Olahraga	

					Yang dimaksud sebagai satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Pelatih olahraga yang memiliki kompetensi adalah pelatih yang memiliki sertifikasi sebagai pelatih olahraga			
				2)	Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	0	Dinas Pemuda dan Olahraga
20	Urusan Statistik	Output	1	1)	Tersedianya buku profil daerah	Ada/Tidak	Tidak	Diskomininfo
				2)	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	Jumlah Survei Statistik Sektoral yang dilakukan	0	Diskomininfo
				3)	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	0	Diskomininfo
				4)	Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	Jumlah Survei Statistik Sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	0	Diskomininfo
				5)	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	0	Diskomininfo
				6)	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral 0 ----- x 100 % Jumlah kegiatan statistik sektoral 0	0%	Diskomininfo
				7)	Persentase kelengkapan metadata variabel sektoral	Jumlah metadata indikator statistik sektoral 0 ----- x 100 % Jumlah indikator 0	0%	Diskomininfo
21	Urusan Persandian	Output	1	1)	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	Jumlah kegiatan strategis teramankan 0 ----- x 100 %	0%	Dinas Komunikasi dan Informatika

				<p>Jumlah kegiatan strategis yang ada 0 kegiatan strategis adalah kegiatan yang melibatkan kepala daerah maupun unsur strategis pemerintah guna membahas hal hal strategi atau kebijakan penting pada pemerintah daerah yang membutuhkan pembatasan sinyal/akses komunikasi selama berlangsungnya kegiatan guna mendukung tercapainya tujuan kegiatan, misalnya rapat paripurna, musrembang, rapat pimpinan daerah, rapat pleno, pelantikan, upacara penting dan lain-lain Kegiatan pengamanan sinyal adalah kegiatan pembatasan sinyal/akses komunikasi pada suatu area tertentu selama berlangsungnya kegiatan strategis</p> <p>Jumlah kegiatan strategis yang akan diamankan ditentukan dengan memperhatikan frekuensi kegiatan strategis pada tahun sebelumnya dan proyeksi kebutuhan kegiatan pengamanan sinyal yang dituangkan dalam dokumen perencanaan.</p>				
			2.	<p>Presentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah</p>	<p>Jumlah SE yang menerapkan SMKI dan diamankan sertifikat elektronik atau aplikasi penyandian 0 ----- x 100 %</p> <p>Jumlah SE yang ada 0</p>	0%	Dinas Komunikasi dan Informatika	

				<p>Sistem Elektronik (SE) adalah rangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengelola, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan /atau menyebarkan informasi elektronik. yang termasuk dalam sistem elektronik adalah sistem informasi, website, mail server, e-office, e-perizinan, e-procurement, e-persuratan, simda dll</p> <p>Aplikasi keamanan elektronik/kriptografi adalah aplikasi yang menyediakan salah satu dari layanankeutuhan, otentifikasi, kerahasiaan nir penyangkalan maupun gabungan dari layanan keamanan</p> <p>Sistem informasi manajemen keamanan informasi adalah bagian dari sistem secara keseluruhan berdasarkan pendekatan resiko bisnis untuk mendapatkan, menerapkan, mengoperasikan, memantau, mengkaji, meningkatkan dan memelihara keamanan informasi. SMKI mencakup struktur kebijakan, kegiatan perencanaan, tanggung jawab, praktek, prosedur, proses dan sumber daya organisasi.</p>			
				diterapkan SMKI pada suatu organisasi dapat dicerminkan dengan adanya instruktur keamanan informasi yang telah memadai			
			3)	<p>Persentase sistem elektronik/aset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah</p> <p>Jumlah SE atau aset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah 0 ----- x 100 %</p> <p>Jumlah SE yang ada 0</p>	0%	Dinas Komunikasi dan Informatika	

					Nilai resiko diukur dengan menilai resiko pada sistem elektronik dan kegiatan kontra penginderaan yang dilakukan kepada aset informasi fisik untuk mendeteksi ada tidaknya kerawanan				
				4)	Persentase titik yang diamankan dibandingkan dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang ditetapkan	<p>Jumlah teramankan 0 ----- x 100 %</p> <p>Jumlah titik pada PHKS 0</p> <p>Pola hubungan komunikasi sandi (PHKS) adalah ketentuan yang memuat metode, kriteria, peran antara titik-titik dalam suatu sistem komunikasi pada suatu ruang lingkup tertentu dengan tujuan mengenkripsi informasi melalui metode persandian. Pola hubungan komunikasi sandi perlu ditetapkan dalam suatu keputusan kepala daerah agar ketentuan di dalam dipatuhi</p> <p>PHKS pemda memuat jaring komunikasi sandi (JKS) apa saja yang digelar dalam ruang lingkup pemda sehingga dalam satu pemda dimungkinkan tergelar beberapa JKS.</p> <p>JKS adalah keterhubungan antar pengguna persandian melalui jaringan telekomunikasi</p> <p>Titik adalah komponen JKS yang dapat menerima, membuat, menyimpan atau mengirim data/informasi</p>	0%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
22	Urusan Kebudayaan	Output	1	1)	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	Jumlah objek PK yang (diinventaris + diamankan + dipelihara + diselamatkan + dipublikasikan)	43	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				2)	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	Jumlah objek PK (disebarluaskan + dikaji + dikayakan keberagamannya)	43	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

			3)	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	Jumlah objek dimanfaatkan	43	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
			4)	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	Jumlah sdm ditingkatkan kompetensi + Jumlah sdm disertifikasi + Jumlah lembaga distandarisasi + Jumlah lembaga ditingkatkan kapasitas tata kelola + Jumlah pranata ditingkatkan kapasitas tata kelola	2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
			5)	Register cagar budaya (pendaftaran, pengisian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	Jumlah CB ditetapkan – Jumlah CB dihapuskan	3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
			6)	Perlindungan cagar budaya kabupaten/kota (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	Jumlah CB (diselamatkan + diamankan + dizonasi + dipelihara + dipugar	43	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
			7)	Layanan perijinan membawa cagar budaya kabupaten ke luar provinsi dengan dukungan data	Jumlah CB diberikan izin ke luar Kabupaten/Kota	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
			8)	Pengembangan cagar budaya Kabupaten (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	Jumlah CB (diteliti + direvitalisasi + diadaptasi)	3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
			9)	Pemanfaatan cagar budaya Kabupaten (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	Jumlah CB dimanfaatkan	3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
			10)	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	Jumlah koleksi museum (dikelola + diamankan + dikembangkan + dimanfaatkan)	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
			11)	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum	Jumlah pengunjung museum	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum.	Jumlah berpartisipasi dalam pengelolaan museum	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

				12) Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	Sudah Cukup Jelas	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				13) Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	Jumlah tim pendaftaran CB yang dibentuk	2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				14) Pembentukan tim ahli cagar budaya Kabupaten	Jumlah pembentukan tim ahli CB	2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				15) Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	Jumlah ahli CB yang disertifikasi	2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				16) Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	Jumlah sdm CB + jumlah sdm Museum	2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				17) Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman	Jumlah sdm yang ditingkatkan kompetensinya (CB + Museum)	2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				18) Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	Jumlah sarana dan prasarana (CB + Museum)	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				19) Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	Jumlah kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
23	Urusan Perpustakaan	Output	1	1) Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	Koleksi perpustakaan yang tersedia di berbagai perpustakaan di wilayahnya (dalam eksemplar) 24.177 eksemplar ----- x 100 % Jumlah penduduk di wilayahnya (dalam jiwa) 96.105	25%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
				2) Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	Jumlah kunjungan pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan baik secara online maupun onsite 9.994 ----- x 100 % Jumlah penduduk di wilayahnya 96.105	10%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
				3) Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	ketersediaan tenaga perpustakaan di berbagai perpustakaan di wilayahnya 152 ----- x 100 % Jumlah penduduk di wilayahnya (dalam jiwa) 96.105	0,16%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dukcapil

			4)	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Jumlah perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan 10 ----- x 100 % Jumlah perpustakaan dari berbagai jenis yang terdapat di wilayahnya 229 Perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan dibuktikan dengan sertifikat oleh perpustakaan nasional. Kriteria standar nasional perpustakaan merujuk pada peraturan perundangan yang berlaku.	4,37%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
			5)	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat		704	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
		Output	2	1)	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada diwilayahnya	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
				2)	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan alih bahasa	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
				3)	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang adad di wilayahnya (item)	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang adad di wilayahnya (item) yang dimaksud dengan koleksi budaya etnis nusantara adalah semua bahan perpustakaan yang membahas tentang etnis baik yang mutakhir maupun retropektif yang membuat informasi tentang 7 (tujuh) unsur kebudayaan sesuai dengan peraturan perundangan	598	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
24	Urusan Kearsipan	Output	1	1)	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	Jumlah arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip 32.921 ----- x 100 % Jumlah seluruh arsip aktif 32.921	100%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	

				<p>Jumlah seluruh arsip aktif diperoleh dengan cara menghitung jumlah naskah dinas (item arsip) yang tercatat pada buku agenda pencatatan surat masuk dan keluar instansi serta buku pencatatan pembuatan/pengiriman naskah dinas internal instansi. penentuan status aktif atau inaktif mengacu pada jadwal retensi arsip. apabila belum memiliki JRA atau arsipnya belum tertata, maka penentuan status dilakukan berdasarkan lokasi penyimpanan.</p> <p>apabila masih tersimpan diruangan unit kerja/pengelola maka dianggap status inaktif. Ketentuan daftar arsip aktif dan inaktif mengacu pasal 42 dan 44 PP 28/2012</p>			
		2)	Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	<p>Jumlah arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip 0 ----- x 100 % Jumlah seluruh arsip inaktif 0</p>	0%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
				Jumlah seluruh arsip inaktif diperoleh dengan cara mengukur volume arsip dalam satuan meter liner. Untuk arsip yang medianya selain kertas dilakukan konversi ke ukuran meter linier.			
				<p>penentuan status aktif atau inaktif mengacu pada jadwal retensi arsip. Apabila belum memiliki JRA atau arsipnya belum tertata, maka penentuan status dilakukan berdasarkan lokasi penyimpanan</p> <p>apabila masih tersimpan di ruangan unit kerja/pengelola maka dianggap berstatus aktif. Apabila disimpan di unit kearsipan maka dianggap status inaktif</p>			

				ketentuan daftar arsip aktif dan inaktif mengacu pada pasal 42 dan 44 PP 28/2012			
		3)	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	Jumlah arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik 0 ----- x 100 % Jumlah seluruh arsip statis 0	0%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
				Jumlah arsip statis diperoleh dengan cara menghitung jumlah arsip yang terdapat dalam arsip yang diakuisisi oleh lembaga kearsipan sesuai Pasal 93 PP 28/2012 Ketentuan sarana bantu temu baik arsip statis mengacu pada Pasal 97 PP 28/2012			
		4)	Perentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	Jumlah arsip yang telah dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN 0 ----- x 100 % Jumlah seluruh arsip dinamis dan arsip statis pemerintah kabupaten 0 Jumlah arsip yang telah dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN diperoleh dengan cara menghitung jumlah arsip yang dikelola oleh pemerintah daerah yang telah dapat diakses datanya di aplikasi SIKN/JIKN	0%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		2	1)	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	NSPK pemusnahan arsip merujuk pada peraturan kepala ANRI 25/2012 tentang pedoman pemusnahan arsip	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			2)	Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	NSPK perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 23/2015 tentang Perlindungan dan Penyelamatan Arsip dari Bencana	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Output					

				3) Penyelamatan arsip perangkat daerah Kabupaten/Kota yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kecamatan/kelurahan yang sesuai NSPK di Kabupaten	NSPK penyelamatan arsip penggabungan/pembubaran perangkat daerah merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 46/2015 tentang Penyelamatan Arsip Penggabungan atau Pembubaran Lembaga Negara dan Perangkat Daerah	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
				4) Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten/kota yang sesuai NSPK	NSPK autentikasi arsip merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 20/2011 tentang Pedoman Autentikasi Arsip Elektronik	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
				5) Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	NSPK pencarian arsip statis merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 18/2012 tentang Pedoman Pembuatan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
				6) Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah Kabupaten/Kota yang sesuai NSPK	NSPK perizinan penggunaan arsip tertutup merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 28/2011 tentang Pedoman Akses dan Layanan Arsip Statis	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
25	Urusan Perikanan	Output	1	1) Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	4.887	Dinas Perikanan	
				2) Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	$\frac{\text{Jumlah TPI yang operasional}}{\text{Jumlah seluruh TPI yang adad di wilayah kabupaten/kota 2}} \times 100 \%$	100%	Dinas Perikanan	
				3) Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan	Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan	0	Dinas Perikanan	

				4)	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan per tahun	999	Dinas Perikanan	
				5)	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang diproduksi per tahun	0	Dinas Perikanan	
26	Urusan Pariwisata	Output	1	1)	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	Jumlah entitas pengelolaan destinasi Yang dimaksud dengan destinasi wisata adalah kawasan geografis yang berada satu atau lebih wilayah administrative yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas dan serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan Yang dimaksud sebagai entitas pengelolaan destinasi adalah pengelola destinasi pariwisata, baik negeri maupun swasta	27	Dinas Pariwisata	
				2)	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	38	Dinas Pariwisata	

				<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktivitas kehidupan keseharian • Fasilitas pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata 			
		3)	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota	<p>Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di Kabupaten/Kota</p> <p>o Yang dimaksud dengan usaha pariwisata meliputi bidang usaha :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Daya Tarik usaha • Kawasan pariwisata • Jasa transportasi wisata • Jasa perjalanan wisata • Jasa makanan dan minuman • Penyediaan akomodasi • Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi • Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran • Jasa informasi pariwisata • Jasa konsultan pariwisata • Jasa pramuwisata • Wisata tirta • Spa 	43	Dinas Pariwisata	
		4)	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	263	Dinas Pariwisata	
		5)	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri ,Bisa sebagai peserta atau penyelenggara	4	Dinas Pariwisata	

			6)	Jumlah event luar negeri yang diikuti kabupaten/kota	Jumlah event luar negeri yang diikuti Kabupaten/Kota	0	Dinas Pariwisata	
			7)	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada event promosi pariwisata di dalam negeri Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.	14	Dinas Pariwisata	
			8)	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	Jumlah tenaga kerja pariwisata tersertifikasi 9 ----- x 100 % Jumlah tenaga kerja pariwisata 35 Tenaga kerja di bidang kepariwisataan memiliki standar kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Lembaga sertifikasi profesi Tenaga kerja di bidang kepariwisataan yang wajib memiliki sertifikat kompetensi adalah : <input type="checkbox"/> Sub sektor biro perjalanan wisata <input type="checkbox"/> Sub sektor hotel dan restoran <input type="checkbox"/> Sub sektor spa <input type="checkbox"/> Sub sektor restoran, bar dan jasa boga	26%	Dinas Pariwisata	

					<input type="checkbox"/> Bidang jasa pramuwisata dan pemimpin perjalanan wisata (tour leader) <input type="checkbox"/> Bidang kependuan wisata selam <input type="checkbox"/> Bidang kependuan wisata <input type="checkbox"/> Bidang kependuan ekowisata <input type="checkbox"/> Bidang arung jeram <input type="checkbox"/> Bidang kependuan wisata agro <input type="checkbox"/> Bidang jasa boga <input type="checkbox"/> Bidang kependuan wisata goa <input type="checkbox"/> Bidang manajerial spa <input type="checkbox"/> Bidang MICE			
			9)	Persentase SDm peserta pembekalan sektor kepariwisataan	Jumlah peserta pembekalan sektor kepariwisataan 928 ----- x 100 % Jumlah sasaran pembekalan sektor kepariwisataan 928	100%	Dinas Pariwisata	
			10)	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	25	Dinas Pariwisata	
27	Urusan Pertanian	Output	1	1) Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan	Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan	97	Dinas Pertanian	
				2) Prasarana pertanian yang digunakan	Jumlah prasarana pertanian yang digunakan	97	Dinas Pertanian	
				3) Penerbitan izin usaha pertanian	Jumlah fasilitasi penerbitan izin usaha pertanian	0	Dinas Pertanian	
				4) Persentase prasarana yang digunakan	Jumlah prasarana yang aktif digunakan 0 ----- x 100 % Jumlah prasarana yang dibangun 0	0%	Dinas Pertanian	
				5) Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian kab/kota	Jumlah usulan yang difasilitasi 0 ----- x 100 % Jumlah usulan usaha pertanian 0	0%	Dinas Pertanian	
		Output	2	1) Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	Jumlah area yang dapat ditanggulangi 0 ----- x 100 %	0%	Dinas Pertanian	

					Luas area terkena bencana 0 bencana yang dimaksud adalah bencana pertanian dan bencana penyakit hewan menular		Dinas Pertanian	
28	Urusan Kehutanan	Output	1	tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura	Dokumen rencana pengelolaan Tahura yang disahkan	0	Propinsi	
			2	Pemberdayaan Masyarakat di daerah penyangga	jumlah kelompok masyarakat desa binaan yang terbentuk dan didampingi	0	Propinsi	
			3	Pemulihan ekosistem pada Tahura	Luas areal yang telah dipulihkan baik dengan mekanisme alam, rehabilitasi maupun restorasi	0	Propinsi	
			4	Menurunnya gangguan kawasan Tahura	Rekapitulasi kejadian TIPIHUT secara periodik per tahun	0	Propinsi	
29	Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral	Output	1.	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/kota	Jumlah Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/kota	0	Propinsi	
30	Urusan Perdagangan	Output	1)	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin : a. Pusat perbelanjaan, b. Toko swalayan	Jumlah izin pusat perbelanjaan yang diterbitkan ≤ 5 hari kerja 0 ----- x 100 % Jumlah permohonan izin pusat 0 perbelanjaan yang dokumennya sudah lengkap dan benar	0%	Dinas Koperindak /PTSP	
					Jumlah izin toko swalayan yang diterbitkan ≤ 5 hari kerja 3 ----- x 100 % Jumlah permohonan izin toko swalayan yang dokumennya sudah lengkap dan benar 3	100%	Dinas Koperindak /PTSP	
			2)	Persentase penerbitan TDG	Jumlah penerbitan TDG ≤ 5 hari kerja 0 ----- x 100 % Jumlah permohonan penerbitan TDG 0	0%	Dinas Koperindak /PTSP	
			3)	Persentase gudang yang tidak mempunyai TDG	Jumlah penerbitan TDG 0 ----- x 100 % Jumlah gudang yang ada di kab/kota 0	0%	Dinas Koperindak	
			4)	Persentase Penerbitan STPW yang tepat waktu untuk :	Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri :			

			a) Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri	Jumlah STPW untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri yang terbit ≤2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar 0 ----- x 100 % Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri 0	0%	Dinas Koperindak	
			b) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri	Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri :		Dinas Koperindak	
				Jumlah STPW untuk penerima lanjutan waralaba dari waralaba dalam negeri yang terbit ≤2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar 0 ----- x 100 % Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri 0	0%		
			c) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri	Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri :		Dinas Koperindak	
				Jumlah STPW untuk penerima lanjutan waralaba dari waralaba luar negeri yang terbit ≤2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar 0 ----- x 100 % Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri 0	0%		
		5)	Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah kab/kota	Jumlah pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/kota 0 ----- x 100 % Jumlah permohonan SIUP bahan berbahaya bagi pengecer 0	0%	Dinas Koperindak	

			6)	Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	Jumlah SKA yang terbit ≤1 hari kerja (1x24 jam) 0 ----- x 100 % Jumlah permohonan penerbitan SKA yang dokumennya telah diterima dengan lengkap dan benar 0	0%	PTSP	
			7)	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	$K=(a+b) \times 100\%$ K= Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayahnya kerjanya. a= pembangunan sarana distribusi perdagangan telah dilakukan sesuai target waktunya (nilai 0.5). b= sarana distribusi perdagangan telah dimanfaatkan sesuai peruntukannya (nilai 0.5).	0%	Dinas Koperindak	berdasarkan surat keterangan nomor 800/58/disperindakopuk m/2024
			8)	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	Persentase koefisien variasi harga antar waktu per komoditas bahan pokok.	11,72%	Dinas Koperindak	
	Output	2	1)	Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	$X = \frac{a}{b \times c} \times 100\%$ X = Persentase jumlah pupuk yang disalurkan a = Jumlah pupuk yang disalurkan 53.450 b = Target komisi pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di Tingkat Provinsi sebesar (90% dari RDKK) 55.696 c = RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) 61.885	0,00155%	Dinas Pertanian	
	Output	3	1)	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	Jumlah total UTTP yang ditera dan ditera ulang pada tahun berjalan 1 ----- x 100 % Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan ditera ulang di wilayah kab/kota 1.492	0,067%	Dinas Koperindak	

				2)	Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	Jumlah sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan sesuai ketentuan yang berlaku 0 ----- x 100 % Jumlah sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan 0	0%	Dinas Koperindak	sudah di ambil alih provinsi
31	Urusan Perindustrian	Output	1	1)	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota	Jumlah realisasi izin yang diterbitkan 0 ----- x 100 % Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk 0	0%	Dinas Koperindak	
		Output	2	1)	Persentase terselesainya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA	Capaian target tahapan penyelesaian RPIK Tahapan: a) Tersusun naskah akademik (30%). b. Tersusun draf Raperda RPIK (20%). c. Draf Raperda RPIK yang disetujui DPRD dan mendapat rekomendasi dinas yang membidangi (25%). d. Persetujuan draft raperda RPOK oleh Gubernur Provinsi (15%). e. Penetapan Perda RPIK (10%) Keterangan : Penilaian bersifat akumulatif terhadap penyelesaian RPIK	100%	Dinas Koperindak	
		Output	3	1)	Persentase jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan (IUI menengah yang diterbitkan	Jumlah realisasi izin yang diterbitkan 0 ----- x 100 % Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk 0	0%	Dinas Koperindak	
		Output	4	1)	Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri kecil dan menengah yang diterbitkan	Jumlah realisasi izin yang diterbitkan 0 ----- x 100 % Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk 0	0%	Dinas Koperindak	
		Output	5	1)					

		Output	6	1)	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kabupaten/kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kabupaten/kota	Jumlah data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab di SIINas 12 ----- x 100 % Total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kab/kota 12	100%	Dinas Koperindak	
32	Urusan Transmigrasi	Output	1	1.	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	Kawasan Transmigrasi adalah kawasan budidaya yang memiliki fungsi sebagai pemukiman dan tempat usaha masyarakat dalam satu sistem pengembangan berupa wilayah pengembangan transmigrasi atau lokasi pemukiman transmigrasi	1 Kawasan	Dinas Ketenagakerjaan dan transmigrasi	berdasarkan keputusan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi nomor 115 tahun 2018 ditetapkan 1 kawasan meliputi 3 kecamatan(Kec. Liang, Kec. Peling Tengah, Kec. Tinangkupat)
				2	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	Satuan pemukiman berupa satu kesatuan pemukiman atau beberapa pemukiman sebagai satu kesatuan dengan daya tampung 300-500 keluarga	70	Dinas Ketenagakerjaan dan transmigrasi	
				3	jumlah satuan pemukiman yang dibina	Sudah Cukup Jelas	70	Dinas Ketenagakerjaan dan transmigrasi	

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil.

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci			Rumusan/Persamaan	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
1	Urusan Pendidikan	Outcome	1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD 4.488 ----- x 100 % Jumlah anak usia 5-6 tahun pada Kabupaten yang bersangkutan 4.527	99%	Dinas Pendidikan Dukcapil		
		Outcome	2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7 - 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar 11.507 ----- x 100 % Jumlah anak usia 7-12 tahun pada Kabupaten yang bersangkutan 13.663	84,22%	Dinas Pendidikan		
		Outcome	3	1	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama 4.156 ----- x 100 % Jumlah anak usia 13-15 tahun pada kabupaten yang bersangkutan 7.102	59%	Dinas Pendidikan	
		Outcome	4	1	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan 94 ----- x 100 % Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada Kabupaten yang bersangkutan 236	40%	Dinas Pendidikan	
2	Urusan Kesehatan	Outcome	1	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan 101 ----- x 100 % Jumlah Penduduk di Kabupaten 127.834	0,08%	Dinkes Dukcapil		

		Outcome	2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi 6 ----- x 100 % Jumlah RS di Kabupaten 13	46%	Dinkes	5 puskesmas rawat inap yang sudah akreditasi (Puskesmas Totikum, Tinangkung Utara, Saleafi, Sabang, Tataba dan 1 RSUD trikora salakan total berjumlah 6 11 puskesmas rawat inap dan 1 RSUD Trikora dan 1 Rumah Sakit Prata Bilabanggai berjumlah 13
		Outcome	3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan 1.977 ----- x 100 % Jumlah ibu hamil di Kabupaten 1.977	100%	Dinkes	
		Outcome	4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan 1.712 ----- x 100 % Jumlah ibu bersalin di Kabupaten 1.805	95%	Dinkes	Persalinan ditolong Nakes 1.712 dan Persalinan di non Nakes 93 = total ibu bersalin 1.805
		Outcome	5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar 1.728 ----- x 100 % Jumlah bayi baru lahir di Kabupaten 1.728	100%	Dinkes	
		Outcome	6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar 6.057 ----- x 100 % Jumlah balita di Kabupaten 6.057	100%	Dinkes	
		Outcome	7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar 2.005 ----- x 100 % Jumlah anak usia pendidikan dasar di Kabupaten 2.005	100%	Dinkes	
		Outcome	8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar 32.596 ----- x 100 % Jumlah orang usia 15-59 tahun di Kabupaten 32.596	100%	Dinkes	

		Outcome	9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah warga negara usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar 4.185 ----- x 100 % Jumlah orang warga negara usia 60 tahun di Kabupaten 4.185	100%	Dinkes	
		Outcome	10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 15.663 ----- x 100 % Jumlah penderita hipertensi di Kabupaten 15.663	100%	Dinkes	
		Outcome	11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 1.908 ----- x 100 % Jumlah penderita DM di Kabupaten 1.908	100%	Dinkes	
		Outcome	12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 248 ----- x 100 % Jumlah penderita ODGJ di Kabupaten 248	100%	Dinkes	
		Outcome	13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 288 ----- x 100 % Jumlah penderita TBC di Kabupaten 288	100%	Dinkes	
		Outcome	14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar 2.758 ----- x 100 % Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di Kabupaten 2.758	100%	Dinkes	

3	Urusan Pekerjaan Umum	Outcome	1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten (ha) 5.686 -----x 100 % Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kabupaten (ha) 14.254	40,00%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
		Outcome	2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten/kota	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten (m) 24.281 ----- x 100 % Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan Kabupaten (m) 29.721	82%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Baik= 7.501 + Sedang 16.780= 24.281 meter
		Outcome	3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Luas irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha) ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasi dan dipelihara (ha) 1.322,9 -----x 100% Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten Ha 1.587	83%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
		Outcome	4.	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah Kabupaten 24.374 ----- x 100 % Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh Kabupaten tersebut 31.226	78%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Terlayani JP 26.114 + Terlayani BJP 3.201=29.315

		Outcome	5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur finjanya telah diolah di PLT + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD 29.991 -----x100% Jumlah rumah di Kabupaten 41.996	71,00%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
		Outcome	6	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya 542 -----x100% jumlah IMB yang berlaku 542	100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	2014= 33 2015=66 2016=92 2017=37 2018=28 2019= 92 2020 =60 2021=96 2022= 14, 2023 24 berjumlah 542 IMB dari tahun 2014-2022 sudah divalidasi oleh TIMNAS
		Outcome	7	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	Panjang jalan kewenangan Kabupaten yang mantap 353.097 -----x100% Panjang jalan keseluruhan di wilayah kabupaten/kota 951.375 m	37%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
		Outcome	8.	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis / analisis 50 ----- x 100 % Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis / analisis di wilayah Kabupaten 50	100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Berdasarkan surat keterangan kepala dinas pekerjaan umum no 600/66.9/S.KET/PUPR/2024 menerangkan tidak ada F.3 dan F.2
		Outcome	9.	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya yang terjadi kecelakaan konstruksi 0 ----- x 100 % Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya 108	0%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	

4	Urusan Perumahan Rakyat	Outcome	1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n Unit Rumah 0 ----- x 100 % Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n 0	0%	Dinas Perumahan, Pemukiman	Surat Keterangan no 600.2/16.b/SUKET/DPKPP/2024 no 1 Outcome 1 menerangkan tidak ada pelaksanaan kegiatan di tahun 2023
		Outcome	2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Rumah Tangga Penerima Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni 0 ----- x 100 % Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan 0	0%	Dinas Perumahan, Pemukiman	Surat Keterangan no 600.2/16.b/SUKET/DPKPP/2024 no 2 Outcome 2 menerangkan tidak ada pelaksanaan kegiatan di tahun 2023
		Outcome	3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 0 ha yang ditangani (ha) 0 ----- x 100 % Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha 93	0%	Dinas Perumahan, Pemukiman	Berdasarkan SK bupati Banggai Kepulauan no 358 tahun 2022 tentang penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di kabupaten banggai kepulauan dengan luasan 93 Ha
		Outcome	4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Jumlah unit rumah tidak layak huni 13.183 ----- x 100 % Jumlah total unit rumah kabupaten/kota 31.664	42%	Dinas Perumahan, Pemukiman	
		Outcome	5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU 164 ----- x 100 % Jumlah unit rumah kabupaten/kota 31.664	0,52%	Dinas Perumahan, Pemukiman	

5	Urusan Ketentaraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Outcome	1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah pengaduan yang ditangani 8 ----- x 100 % Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk 8	100%	PoL- PP	
		Outcome	2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan 8 ----- x 100% Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi 8	100%	PoL- PP	
		Outcome	3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana 125.461 Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sesuai target yang ditetapkan 125.461	100%	BPBD	
		Outcome	4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 125.461 Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana 125.461	100%	BPBD	
		Outcome	5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana 4.959 Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana 4.959	100%	BPBD & POL PP	

		Outcome	6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di kabupaten dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah + jumlah layanan pemadaman di kabupaten dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran Perangkat Daerah 8 -----x 100 % Jumlah kejadian kebakaran di Kabupaten 8	100%	BPBD & DAMKAR	
		Outcome	7	Waktu tanggap (respon time) penanganan kebakaran	Rata-rata waktu tanggap dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadam kebakaran.	15 Menit	DAMKAR	
6	Urusan Sosial	Outcome	1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti 1.163 ----- x 100 %	97,73%	Dinas Sosial	Lansia terlantar 421/438, Penyandang disabilitas 125/125, anak terlantar 66/76, PMKS 181/181 ODGJ 370/370
					Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis 1.190		Dinas Sosial	

		Outcome	2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran 135 ----- x 100 % Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah Kabupaten yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten 150	90%	Dinas Sosial Dinas Sosial	
7	Urusan Ketenagakerjaan	Outcome	1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD Kegiatan 3 -----x 100% Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di kabupaten/kota 7	43%	Disnaker Disnaker	
		Outcome	2	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi 74 ----- x 100 % Jumlah tenaga kerja keseluruhan 65.020	0,00%	Disnaker	
		Outcome	3	Tingkat Produktivitas tenaga kerja	PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan) 2.983,31 ----- x 100 % Jumlah tenaga kerja 65.020	459%	Disnaker	
		Outcome	4	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB,LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan	Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak 0 ----- x 100 % Jumlah perusahaan 594	0%	Disnaker	
		Outcome	5	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota	Jumlah pencari kerja (pencari kerja) yang ditempatkan 96 ----- x 100 % Jumlah pencari kerja yang terdaftar 364	26%	Disnaker	
8	Urusan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak	Outcome	1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Jumlah ARG pada belanja operasional dan modal APBD Rp.1.100.000.000,- ----- x 100 %	0,14%	DP3AP2KB	

					Jumlah seluruh belanja operasional dan modal di APBD Rp. 775.372.305.186			Belanja Operasi 624.319.448.894 + Belanja modal 151.052.856.292 = 775.372.305.186
		Outcome	2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten/kota yang didampingi 17 ----- x 100 % Jumlah anak korban kekerasan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (penduduk usia kurang dari 18 tahun) 17	100%	DP3AP2KB	
		Outcome	3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per100.000 penduduk perempuan)	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan 6 ----- x 100 % Jumlah penduduk perempuan 88.942	67,46%	DP3AP2KB	
9	Urusan Pangan	Outcome	1	Persentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	Jumlah cadangan pangan 19.775,9 ----- x 100 % Jumlah kebutuhan pangan 27.115,89	72,9%	Dinas Ketahanan Pangan	
10	Urusan Pertanahan	Outcome	1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Luas tanah sesuai peruntukan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) 0 ----- x 100 % Seluruh Luas tanah yang diberikan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) 0	0%	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan	Berdasarkan surat keterangan no 500.17.2.3/16/suket/DPKPP/2024 outcome 1 Berdasarkan surat keterangan no 500.17.2.3/16/suket/DPKPP/2024 outcome 1
		Outcome	2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan/fasilitas umum 0 -----x 100% Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum 0	0%	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Berdasarkan surat keterangan no 500.17.2.3/16/suket/DPKPP/2024 outcome 2
		Outcome	3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai peruntukan diatas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang 0 -----x 100% Luas tanah diatas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diterbitkan 0	0%	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Berdasarkan surat keterangan no 500.17.2.3/16/suket/DPKPP/2024 outcome 3

		Outcome	4	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Jumlah penerima tanah objek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0,5 ha 0 -----x 100% Jumlah penerima tanah objek landreform 0	0%	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan/ Kantor Pertanahan	Berdasarkan surat keterangan no 500.17.2.3/16/suket/DPKPP/2024 outcome 4
		Outcome	5	Tersedianya tanah untuk masyarakat	Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan izin membuka tanah 0 -----x 100% Luas izin membuka tanah yang diterbitkan 0	0%	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Berdasarkan surat keterangan no 500.17.2.3/16/suket/DPKPP/2024 outcome 5
		Outcome	6	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Jumlah pengaduan tanah garapan yang ditangani 6 -----x 100% Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan 6	100%	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	
11	Urusan Lingkungan Hidup	Outcome	1	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) kabupaten/kota	IKH Kab = (IKA 30%) + (IKD 30%) = (ITH 40%). IKA = Indeks Kualitas Air IKD = Undeks Kualitas Udara ITH = Indeks Tutupan Hutan IKLH = (x) + (x) + (x) = IKLH = 0.376 x IKA) + (0.405 x IKU) + (0.219 x IKL)	74,05%	Dinas Lingkungan Hidup	IKA = 70.00 IKU = 93.15 ITH = 45.67
		Outcome	2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	Total volume sampah yang dapat ditangani 6.169 ----- x 100 % Total volume sampah kabupaten 6.169	100%	Dinas Lingkungan Hidup	
		Outcome	3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lokasi lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan pemerintah kab/kota 3 ----- x 100 % Usaha dan atau kegiatan dilakukan pemeriksaan 29	10,34%	Dinas Lingkungan Hidup	

12	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Outcome	1	Perekaman KTP Elektronik	Jumlah Penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki E-KTP 88.883 ----- x 100 % 97,52%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
		Outcome	2	Persentase anak usia 0- 17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Jumlah penduduk 17 tahun ke atas 91.145 Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA 16.350 ----- x 100 % 46,24%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
		Outcome	3	Kepemilikan akte kelahiran	Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir 33.145 ----- x 100 % 88,32%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
		Outcome	4	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Jumlah anak usia 0-18 tahun 37.527 Jumlah OPD yang telah dimanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama 0 ----- x 100 % 0%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
13	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Outcome	1	Persentase pengentasan desa tertinggal	Jumlah OPD 51 Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun 8 ----- x 100 % 31%	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
		Outcome	2	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun n) 26 Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa Mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun 1 ----- x 100 % 1%	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
14	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Outcome	1	1	TFR (Angka Kelahiran Total) TFR $= 5 \sum_{i=1}^7 ASFR_i$ $ASFR_i = \frac{b_i}{P_i} \times K$	2,41%	DP3AP2KB	Siperindu Web

				<p>TFR = Angka Kelahiran Total ASFR = Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur bi = Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur i pada tahun tertentu pi = Jumlah penduduk perempuan kelompok umur i pada pertengahan tahun yang sama i = kelompok umur (i=1 untuk kelompok umur 15-19, i=2 untuk kelompok umur 20-24, , i=7 untuk kelompok Umur 45-49) K = Bilangan Konstanta biasanya 1000</p>			
	Outcome	2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate /mCPR)	<p>Jumlah peserta KB aktif modern 13.527 ----- x 100 % Jumlah pasangan usia subur 17.241</p>	78%	DP3AP2KB	
	Outcome	3	Persentase kebutuhan ber- KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	<p>Jumlah PUS yang ingin ber - KB tetapi tidak terlayani 3.714 ----- Jumlah pasangan usia subur 17.241</p>	21,54%		

15	Urusan Perhubungan	Outcome	1	1	Rasio konektivitas Kabupaten/kota	<p>Rasio konektivitas Kabupaten/Kota = $(IK1 \times \text{bobot angkutan jalan}) + (IK2 \times \text{Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan})$</p> <ul style="list-style-type: none"> • IK1 (angkutan jalan) = $(\text{Jumlah trayek yg dilayani pd kabupaten/kota} \times \text{bobot trayek}) / \text{dibagi jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten/kota tersebut}$ • IK2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan) = $\text{jumlah lintas Penyeberangan yang beroperasi pd kabupaten/kota tsb} \times \text{bobot lintas} / \text{dibagi} (\text{jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada kabupaten/kota tersebut})$ <p>Keterangan:</p> <p>IK1 (Angkutan Jalan)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Jumlah trayek yang dilayani adalah jumlah trayek perintis ditambah trayek AKAP <input type="checkbox"/> Jumlah kebutuhan trayek adalah jumlah kebutuhan trayek perintis dalam kurun waktu tertentu dan kebutuhan trayek AKAP dalam <p>IK2 (Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi adalah jumlah lintasa perintis ditambah lintasan komersil <input type="checkbox"/> Jumlah kebutuhan lintas adalah jumlah kebutuhan lintas penyeberangan baik lintas penyeberangan perintis maupun komersil untuk menghubungkan antar wilayah yang direncanakan dalam kurun waktu tertentu 	42%	Dinas Perhubungan	$IK1 = (16 \times 30) / 16 = 30$ $2 = (5 \times 70) / 5 = 70$ Rasio Konektivitas kab = $(30 \times 70) + (70 \times 30) = 42\%$
----	--------------------	---------	---	---	-----------------------------------	--	-----	-------------------	---

					<p>Bobot Angkutan Jalan atau Sungai, Danau dan Penyeberangan:</p> <p>1. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih tinggi dibandingkan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 70, bobot angkutan jalan = 30)</p> <p>2. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan sama dengan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP 50, bobot angkutan jalan = 50)</p> <p>3. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 30 (bobot angkutan jalan = 70)</p> <p>4. Wilayah yang tidak memiliki angkutan penyeberangan dan laut (bobot angkutan SDP = 0, bobot angkutan jalan = 100)</p> <p>Bobot Trayek atau Lintas:</p> <p>a. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi tinggi (>5x dalam seminggu), bobot = 1</p> <p>b. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi</p>			
		Outcome	2	V/C Ratio di jalan Kabupaten/Kota	V/C ratio di jalan Kabupaten/Kota	5,22%	Dinas Perhubungan	
16	Urusan Komunikasi dan Informatika	Outcome	1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas Kominfo	<p>Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo</p> <p>41</p> <p>----- x 100 %</p> <p>jumlah OPD 51</p>	80,39%	Dinas Kominfo	
		Outcome	2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	<p>Jumlah layanan publik diselenggarakan secara online dan teritegrasi 11</p> <p>----- x 100 %</p> <p>Jumlah layanan publik 11</p>	100%	Dinas Kominfo	

		Outcome	3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas dan pemerintah kabupaten/kota 0 ----- x 100 % jumlah penduduk 96.105	0%	Dinas Kominfo	
17	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Outcome	1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset 28 ----- x 100 % jumlah seluruh koperasi 101	28%	Dinas Koperasi, perindustrian, perdagangan dan UMKM	
		Outcome	2	Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha 3.420 ----- x 100 % Jumlah usaha mikro keseluruhan 3.420	100%	Dinas Koperasi, perindustrian, perdagangan dan UMKM	
18	Urusan Penanaman Modal	Outcome	1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	(Jumlah investasi tahun n - jumlah investasi tahun n-1) di kabupaten /kota 2.666.200.000-1.537.000.000 ----- x 100 % Jumlah investasi tahun n-1 di kabupaten/kota 1.537.000.000	73%	Dinas PTSP	
19	Urusan Kepemudaan dan Olahraga	Outcome	1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	(Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di kabupaten/kota) 91 ----- x 100 % Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota 32.832	0,28%	Dinas Pemuda dan Olahraga	
		Outcome	2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	(Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten/kota) 672 ----- x 100 % Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota 32.832	2,05%	Dinas Pemuda dan Olahraga	
		Outcome	3	Peningkatan prestasi olahraga	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional	15	Dinas Pemuda dan Olahraga	

20	Urusan Statistik	Outcome	1	Persentase Organisasi Perangkat (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	(Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah) 0 ----- x 100 % Jumlah OPD 51	0%	Diskominfo	
		Outcome	2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	(Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah) 0 ----- x 100 % Jumlah OPD 51	0%		
21	Urusan Persandian	Outcome	1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Jumlah nilai per area keamanan informasi 0 ----- x 100 % Jumlah area penilaian 0	0%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
22	Urusan Kebudayaan	Outcome	1	Terlestarikannya Cagar Budaya	(Jumlah cagar budaya yang dilestarikan 43 ----- x 100 % Jumlah cagar budaya yang terdata 43	100%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
23	Urusan Perpustakaan	Outcome	1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca yang diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca masyarakat	50,3%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Berdasarkan laporan hasil survey minat baca
		Outcome	2	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM) $UPLM = \frac{\sum UPLM}{ALM} \times 100$ UPLM 1 = layanan perpustakaan UPLM 2 = n koleksi UPLM 3 = Ketercukupan tenaga perpustakaan UPLM 4 = Tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan= UPLM 5 = Perpustakaan ber-SNP UPLM 6 = Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan UPLM 7 = Anggota perpustakaan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat =	64,73	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	

24	Urusan Kearsipan	Outcome	1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	$T = (a + i + s + j)/4$ T = Tingkat ketersediaan arsip a = Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip i = Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip s = Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik j = Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	8230,25		$a= 32.921, i=0, s=0, j=0$ $T=(32.921+0+0+0)/4$
		Outcome	2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	$T = (m + b + g + a + c + i)/6$ T = Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban m = Tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK = b = Tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK g = Tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip Perangkat Daerah Kabupaten yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran daerah Kabupaten/Kota dengan NSPK a = Tingkat kesesuaian kegiatan autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK c = Tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK i = Tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK	0%		
25	Urusan Perikanan	Outcome	1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/Kota 631.354,14 -----	100,92	One data KKP	
					----- x 100 %			
26	Urusan Pariwisata	Outcome	1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Jumlah wisatawan tahun n- jumlah wisatawan tahun n-1 (263-31) ----- x 100 %	262	Dinas Pariwisata	

					Jumlah wisatawan tahun n-1 31			
		Outcome	2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	Jumlah wisatawan tahun n- jumlah wisatawan tahun n-1 133.614 - 107.251 ----- x 100 % Jumlah wisatawan tahun n-1 107.251	133.613	Dinas Pariwisata	
		Outcome	3	Tingkat Hunian Akomodasi	Jumlah kamar yang terjual 6.230 ----- x 100 % Jumlah kamar yang tersedia 69.715	9%	Dinas Pariwisata	
		Outcome	4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Total nilai kontribusi sektor pariwisata pada PDRB 1.105,29 ----- x 100 % Total PDRB Berlaku 4.925,53	33,44%	Dinas Pariwisata	Perdagangan besar , transportasi dan Perdagangan 997,05, Penyediaan Makan Minum 21,43, Real Estat 86,81(KDA Bangkep 2024= 1.105,29 PDRB atas dasar berlaku)= 4.925,53
		Outcome	5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap Jumlah Total PAD	Total realisasi PAD dari sektor pariwisata 1.284.749.202,10 ----- x 100 % Total realisasi PAD 30.515.769.829,55	4,21%	Dinas Pariwisata	Pajak Hotel 128.451.700,10,Pajak Restoran 1.154.422.502,00, Pajak Hiburan 1.875.000 = 1.284.749.202,1 realisasi PAD 30.515.769.829,55
27	Urusan Pertanian	Outcome	1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun 32,02 ----- x 100 % Luas panen 1.932,48	1,66%	Dinas Pertanian	Ubi Jalar 126,87/7,40, Jagung 459/1,73 ,padi sawah 477/3,23, kacang tanah 421,67/2,26, ubi kayu 181,44/9,63, ubi benggai 266,50 /7,77 =1.932,48/32,02
		Outcome	2	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	Jumlah kejadian penyakit/kasus tahun berjalan (t) – jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) (0 - 0)/ ----- x 100 % Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) 0	0%	Dinas Pertanian	Berdasarkan surat keterangan kepala dinas pertanian menyatakan tidak kasus penyakit hewan menular tahun 2021 sampai 2023
28	Urusan Kehutanan	Outcome	1					Provini
29	Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral	Outcome	1	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin ----- x 100 % Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi	--	Dinas Lingkungan Hidup	Provini

30	Urusan Perdagangan	Outcome	1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan	Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan 1.785 ----- x 100 % Jumlah pelaku usaha di wilayah kab/kota 3.420	52,19%	Dinas Koperindak	
		Outcome	2	Persentase kinerja pupuk	Realisasi 53,450 ----- x 100 % RDKK 61,885	86,37%	Dinas Pertanian	
		Outcome	3	Persentase alar-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Jumlah UTTP bertanda tera yang berlaku pada tahun berjalan 164 ----- x 100 % Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kab/kota 1.492	11%	Dinas Koperindak	
31	Urusan Perindustrian	Outcome	1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten/kota	(Jumlah Industri kecil dan menengah tahun n – Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1) 1.427-1.267 ----- x 100 % Jumlah industri n-1 1.267	13%	Dinas Koperindak	
		Outcome	2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	Jika terdapat N indikator pembangunan industri dalam RPIP maka nilai masing-masing bobot indikator adalah (100/N)% Untuk masing-masing penilaian indikator adalah persentase capaian indikator dibagi target dikali (100/N)% Nilai akhir adalah akumulasi dari N indikator tersebut	0%	Dinas Koperindak	berdasarkan surat keterangan kepala dinas nomor 900/34/Disperindakopukm/2024
		Outcome	3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah Izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan 0 ----- x 100 % Jumlah izin yang dikeluarkan 0	0%	Dinas Koperindak	
		Outcome	4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin perluasan industri (IPUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah Izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan 0 ----- x 100% Jumlah izin yang dikeluarkan 0	0%	Dinas Koperindak	

		Outcome	5		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya	Jumlah Izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan 0 ----- x 100 % Jumlah izin yang dikeluarkan 0	0%	Dinas Koperindak	berdasarkan surat keterangan kepala dinas nomor 900/34/Disperindakopukm/2024
		Outcome	6		Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	1) Keterkinian informasi industri : - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan (50%) - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan (25%) - Tidak menyampaikan informasi industri (0%) 2) Kelengkapan informasi industri meliputi : - Informasi produksi dan kapasitas produksi (10%) - Informasi bahan baku dan bahan penolong (10%) Nilai akhir adalah akumulasi dari kelengkapan dan keterkinian informasi industri (1 + 2)	90%		Industri yang yterdaftar di sinas ada 12 Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan (50%) +Informasi produksi dan kapasitas produksi (10%) Informasi bahan baku dan bahan penolong (10%) Informasi tenaga kerja (10%) Informasi Investasi (10%) (50+10+10+10+10=90%)
32	Urusan Transmigrasi	Outcome	1						

2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan.

2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci			Rumusan/Persamaan	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Urusan Pemerintahan (Perencanaan dan Keuangan)	Outcome	1	Rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	Jumlah belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan Rp. 137.517.711.052,- ----- ----- x 100 % Jumlah APBD Rp. 800.071.458.368,	17%	BPKAD	total belanja pegawai 323.630.769.748,- (Dinkes 51.489.524.394,00 Dikbut 134.623.534.302,00 (186.113.058.696) = 137.517.711.052
		Output	1)					
		Outcome	2	Rasio PAD	Jumlah PAD 30.515.769.829,55 ----- x 100 % Jumlah Pendapatan pada APBD 806.441.456.157,55	4,00%	BPKAD	
		Output	1)					
		Outcome	3	Maturitas sistem pengendalian inter pemerintahan (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Level 2	Inspektorat	
		Output	1)					
		Outcome	4	Peningkatan kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah (APIP)	Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Level 2	Inspektorat	
		Output	1)					
Outcome	5	Rasio belanja urusan pemerintahan umum (dikurangi transfer expenditures)	Jumlah belanja urusan pemerintahan - transfer expenditures 664.557.408.320,- - 182.363.420.918 ----- x 100 % Jumlah belanja APBD 800.071.458.368,00	60,00%	BPKAD	Belanja Daerah 800.071.458.368,- Belanja Modal 135.514.050.048,- = 664.557.408.320,- Transfer expenditure (182.363.420.918,-) Hibah 13.792.897.404,- Bantuan Sosial 3.860.273.000,- belanja bagi hasil 2.487.581.214,-belanja bantuan keuangan 161.116.789.300,-belanja tak terduga 1.105.880.000,- 482.193.987.402,-		
Output	1)							

		Outcome	6		Opini Laporan Keuangan	Opini Laporan Keuangan	Sementara pemeriksa an	BPKAD	
		Output		1)					
2	Urusan Pemerintahan (Pengadaan)	Outcome	1		Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. yang ditandatangani pada kuartal pertama	Jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n 0 ----- ----- x 100 % Jumlah kontrak keseluruhan tahun n 0	0%	Bagian PBJ	
		Output	2	1.	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif 47 ----- x 100 % Jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif 54	87,04%	Bagian PBJ	
		Output		1.					
		Outcome	3		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Jumlah nilai belanja operasional dan modal yang melalui pengadaan Rp. 624.319.448.894,- ----- x 100 % Total belanja operasional dan modal Rp. 775.372.305.186	80,51%	Bagian PBJ	624.319.448.894,- + 151.052.856.292,- = 775.372.305.186
		Output		1.					
		Outcome	4		Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n) - Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1) Rp. 229. 424.704.243 -Rp. 82.677.737.808 ----- x 100 %	177%	Bagian PBJ	146.746.966.435

					Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1) 82.677.737.808			
		Output	1.					
3	Urusan Pemerintahan (Kepegawaian)	Outcome	1	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai menurut pendidikan PT ke atas 988 -----x 100% Seluruh jumlah pegawai 1.371	72,06%	BKD	
		Output	1.					
		Outcome	2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan) 248 -----x 100% Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) 1.371	18,09%	BKD	
		Output	1.					
		Outcome	3	Rasio jabatan fungsional bersertifikat kopetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kopetensi 76 ----- x 100 % Seluruh jumlah pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) 257	29,57%	BKD	pertanian 41, Inspektorat 35 248 + Inspektorat Struktural 9=257
		Output	1.					
4	Urusan Pemerintahan (Manajemen Keuangan)	Outcome	1	Deviasi relisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	$(800.071.458.368,00(-) 1 - / 865.340.762.337,00) * 100)$ $\left[\left(\frac{\text{Nilai absolut dari Total belanja dalam realisasi}}{\text{total belanja APBD}} \right) - 1 \right] \times 100\%$	92%	BPKAD	LRA Konsolidasi Konederaan 2023

		Output	1.					
		Outcome	2	Deviasi PAD terhadap PAD dalam APBD	$\frac{(30.515.769.829,55)(-1)}{39.419.533.649,00} * 100$ $\left(\left[\frac{\text{Nilai absolut dari total PAD dalam realisasi}}{\text{Total PAD dalam APBD}} \right] - 1 \right) \times 100\%$	77,41%	BPKAD	LRA Konsolidasi Konsederan 2023
		Output	1.					
		Outcome	3	Assets Management	1. Apakah daftar asset tetap? (Ya/Tidak) 2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak) 3. Apakah ada proses investarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak) 4. Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak)	Ya Ya Ya Ya	BPKAD	
		Output	1.					
		Outcome	4	Rasio anggaran terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Nilai realisasi SILPA 84.261.513.003.04 -----x100% Total belanja anggaran tahun sebelumnya Rp. 865.340.762.337,-	10%	BPKAD	LRA Konsolidasi Konsederan 2023
		Output	1.					
5	Urusan Transparansi dan Partisipasi	Outcome	1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	Realisasi Belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website pemda 143.330.070.980,- ----- x 100 % Anggaran belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website pemda 171.802.630.745,-	83%	Dinas Kominfo	
		Output	1.					
		Outcome	2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	Jumlah dokumen yang dipublikasi di website pemda 10 ----- x 100 % Total jumlah dokumen yang telah dirinci 10	100%	Dinas Kominfo	
		Output	1.					



BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. dimana pelaksanaannya dapat tercermin dari adanya kontribusi Pusat atau Provinsi dalam hal pembiayaan pembangunan, maka besarnya kontribusi tersebut dapat digunakan untuk mengukur besarnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat sentralistik.

Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa.

Penyelenggaraan urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh gubernur dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan didanai dari APBN. Kegiatan Dekonsentrasi di Daerah dilaksanakan oleh SKPD yang ditetapkan oleh gubernur, sedangkan Kegiatan Tugas Pembantuan di Daerah dilaksanakan oleh SKPD yang ditetapkan oleh gubernur, bupati, atau walikota.

1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

Peraturan yang mendasari pelaksanaan Tugas Pembantuan adalah :

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah .
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah
- PP No 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan azas Tugas Pembantuan sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Pada tahun 2022 Pemerintah Daerah Kabupaten



Banggai Kepulauan tidak menerima Tugas Pembantuan yang berasal dari Pemerintah Pusat .

3. Capaian Kinerja pelaksanaan Tugas Pembantuan

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tugas Pembantuan yang dijalankan oleh organisasi perangkat daerah di Kabupaten Banggai Kepulauan tidak terlaksana.

3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten /Kota Kabupaten Banggai Kepulauan Tidak Mendapat Tugas Pembantuan Dari Provinsi Sulawesi Tengah.

3.1.1 Target Kinerja

3.1.2 Realisasi

3.2 Tugas Pembantuan Provinsi yang dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten Banggai Kepulauan Tidak Mendapat Tugas Pembantuan Dari Provinsi Sulawesi Tengah.

3.2.1 Target Kinerja

3.2.2 Relisasi

3.3 Permasalahan dan Kendala

Pada umumnya Pelaksanaan tugas pembantuan yang ada di Kabupaten Banggai Kepulauan menghadapi permasalahan yang sama yaitu kurangnya koordinasi antara organisasi perangkat daerah yang melaksanakan dengan instansi pemberi dana tugas pembantuan.

3.4 Saran dan Tindak Lanjut

Meningkatkan koordinasi sejak perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/monitoring sampai evaluasi kegiatan antara instansi pemberi bantuan dengan organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas pembantuan tersebut.



BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

4.1 Urusan Pendidikan

4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM bidang Pendidikan Kabupaten/Kota sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar teknis Pelayanan Minimal Pendidikan terdiri atas :

1. Pendidikan Anak Usia Dini
2. Pendidikan Dasar
3. Pendidikan Kesetaraan

4.1.2 Target Pencapaian

Indikator Capaian SPM Pendidikan Kabupaten Banggai Kepulauan (PP Nomor 2 Tahun 2018 dan Permendikbud Nomor 32 Tahun 2018).

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Pendidikan PAUD	1. Jumlah Penduduk Usia 5–6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD (TK, RA, KB, TPA, SPS) 2. Jumlah Penduduk Usia 5-6 Tahun yang telah mencapai perkembangan anak usia pradasar (sesuai dengan 6 aspek perkembangan anak 5-6 Tahun dalam standar Permendikbud Permendikbud 32 Tahun 2022	100 %	Setiap Tahun
2.	Pendidikan Dasar (SD/MI)	1. Jumlah Penduduk Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/MI)	100 %	Setiap Tahun
3.	Pendidikan Dasar (SMP/MTs)	1. Jumlah Penduduk Usia 13-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SMP/MTs)	100 %	Setiap Tahun
4.	Pendidikan Kesetaraan	1. Jumlah Penduduk Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan	100 %	Setiap Tahun



4.1.3 Realisasi

No.	Indikator	Sasaran Dalam Tahun	Target dalam tahun	Presentase
1.	Pendidikan Anak Usia Dini : Jumlah Anak Usia 5-6 Tahun Kabupaten Banggai Kepulauan Jumlah Anak Usia 5-6 Tahun Penerima Layanan Dasar	4.845	4.635	95 %
	a. Angka parsitipasi Sekolah	80	63	78.75%
	b. Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	10	4	40 %
	c. Pertumbuhan pendidik PAUD di S1/D-IV	75	25	33.33%
	d. Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	0	0	0%
	e. Kecukupan formasi guru ASN	0	0	0%
	f. Indeks distribusi guru	1	1	100%
	g. Proporsi PTK bersertifikat	5	2	40%
	h. Proporsi PTK penggerak	0	0	0%
	i. Pengalaman pelatihan guru	5	5	100%
2.	Pendidikan Dasar (SD) : Jumlah Anak Usia 7-12 Tahun Kabupaten Banggai Kepulauan Jumlah Anak Usia 7-12 Tahun Penerima Layanan Dasar SD	17.888	17.888	100%
	a. Angka parsitipasi Kasar	92	88	95.65%
	b. Angka Partisipasi Sekolah	90	89	98.89 %
	c. Angka Partisipasi Murni	85	85	100%
	d. Kemampuan Literasi	95	53	55.79%
	e. Kemampuan numerasi	90	41	45.56%
	f. Perbedaan Skor Literasi	5	5	100%
	g. Perbedan Skor numerasi	5	5	100%
	h. Indeks Iklim Keamanan	79	58	73.42%
	i. Indeks Iklim kebinekaan dan inklusivitas	80	46	57.50 %



	j. Kecukupan formasi Guru ASN	80	1	1.25%
	k. Indeks distribusi Guru	78	2	2.56%
	l. Proporsi PTK bersertifikat	75	60	80 %
	n. Proporsi PTK Penggerak	37	10	27%
	M.Pengalaman Pelatihan Guru	25	25	100%
	SMP			
	a. Angka parsitipasi Kasar	95	95	100%
	b. Angka Partisipasi Sekolah	90	90	100%
	c. Angka Partisipasi Murni			
	d. Kemampuan Literasi	85	85	100%
	e. Kemampuan numerasi	94	94	100%
	f. Perbedaan Skor Literasi	89	89	100%
	g. Perbedan Skor numerasi	8	8	100%
	h. Indeks Iklim Keamanan	6	6	100%
	i. Indeks Iklim kebinekaan dan inklusivitas	80	80	100%
		85	85	100%
	j. Kecukupan formasi Guru ASN	87	87	100%
	k. Indeks distribusi Guru	75	75	100%
	l. Proporsi PTK bersertifikat	76	76	100%
	n. Proporsi PTK Penggerak	30	30	100%
	M.Pengalaman Pelatihan Guru	45	45	100%
	Pendidikan Kesetaraan :			
	Jumlah Anak Usia 7-18 Tahun Kabupaten Banggai Kepulauan	2.441	2.441	100%
	Jumlah Anak Usia 7-18 Tahun Penerima Layanan Dasar			
3.	a. Angka parsitipasi Kasar	65	65	100%
	b. Angka Partisipasi Sekolah	24	24	100%
	c. Angka Partisipasi Murni	30	30	100%
	d. Kemampuan Literasi	56	56	100%
	e. Kemampuan numerasi	12	12	100%
	f. Perbedaan Skor Literasi	9	9	100%
	g. Perbedan Skor numerasi	65	65	100%
	h. Indeks Iklim Keamanan	12	12	100%
	i. Indeks Iklim kebinekaan	35	35	100%



dan inklusivitas				
j. Kecukupan formasi Guru ASN	25	25	100%	
k. Indeks distribusi Guru	35	35	100%	
l. Proporsi PTK bersertifikat	20	20	100%	
n. Proporsi PTK Penggerak	15	15	100%	
M.Pengalaman Pelatihan Guru	5	5	100%	

4.1.4 Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran untuk tahun 2023 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan dalam rangka pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan sebesar

1. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini Rp.2.151.284.188
2. Pengelolaan Pendidikan Dasar Rp. 13.668.191.972
3. Pendidikan Kesetaraan Rp. 700.000.000

4.1.5 Dukungan Personil

Pada aspek internal organisasi yang menyangkut kepegawaian, saat ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan didukung 77 orang, terdiri 40 orang PNS, 37 orang Tenaga Honorer. Keadaan pegawai dilihat dari kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan serta jabatan struktural dan fungsional sebagaimana tabel - tabel berikut :

Tabel 4.1
Keadaan PNS Dan Tenaga Honorer Tahun 2023

No.	Pendidikan	PNS Golongan				Tenaga Honorer	Jumlah
		I	II	III	IV		
1.	S2	-	-	-	9	37	19
2.	S1	-	-	19	-		56
3.	Akdemi/D3	-	3	-	-		3
4.	SLTA	-	9	-	-		9
Jumlah		-	12	19	9	37	87

Tabel 4.2
Keadaan PNS Menurut Pangkat / Golongan Tahun 2023

No.	PANGKAT / GOL	JUMLAH
-----	---------------	--------



1.	Pembina Utama Muda (IV/c)	-
2.	Pembina Tk. I (Gol. IV/b)	6
3.	Pembina (Gol. IV/a)	5
4.	Penata Tkt. I (Gol. III/d)	7
5.	Penata (Gol. III/c)	7
6.	Penata Muda Tkt. I (Gol. III/b)	2
7.	Penata Muda (Gol. III/a)	6
8.	Pengatur Tkt. I (Gol. II/d)	2
9.	Pengatur (Gol. II/c)	3
10.	Pengatur Muda Tkt. I (Gol. II/b)	2
Jumlah		40

4.1.6 Permasalahan dan Solusi

Masalah yang dihadapi selama tahun 2023 antara lain adalah belum maksimalnya Pengumpulan data ang belum sempurna dan Alokasi Anggaran di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan.

Adapun upaya dan solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah adanya peran Pemerintah Daerah mengalokasikan Anggaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Pendidikan Dasar khususnya urusan pelayanan dasar agar pelaksanaan program dan kegiatan tersebut dapat terwujud.

4.1.7 Program kegiatan

A. Program SPM Pendidikan Anak Usia Dini

Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM PAUD pada :

1. Kegiatan Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan satuan
Pemeliharaan dan perbaikan terhadap kondisi sarana dan prasarana satuan pendidikan yang rusak
2. Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (PAUD)
 - Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
 - Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan

B. Program SPM Pendidikan Dasar

Kegiatan Pemenuhan Layanan Dasar SPM SD/SMP

1. Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B)
 - Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat.



2. Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (SD/SMP/Paket A/Paket B)
 - Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
 - Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan

C. Program SPM Pendidikan Dasar

Kegiatan Pemenuhan Layanan Dasar SPM Kesetaraan

1. Pemenuhan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Kesetaraan)
 - Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
 - Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan

4.2 Urusan Kesehatan

4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar

Indikator kinerja Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif di bidang Kesehatan yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Peraturan Kesehatan Nomor 4//2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota mencakup 12 (dua Belas) jenis pelayanan dasar, terdiri dari:

- Pelayann Kesehatan Ibu Hamil
- Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin
- Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
- Pelayanan Kesehatan Balita
- Pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan Dasar
- Pelayanan Kesehatan pada usia Produktif
- Pelayanan Kesehatan pada usia Lanjut
- Pelayanan Kesehatan penderita Hipertensi
- Pelayanan Kesehatan Penderita diabetes Melitus
- Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Kejiwaan Berat
- Pelayanan Kesehatan Orang terduga tuberkulosis



- Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia(human immunodeficiency virus)

4.2.2 Target Pencapaian

No.	Jenis Pelayanan	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)
		Indikator	Target	
	2	3	4	5
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan K4 di fasilitas Kesehatan milik Pemerintah dan swasta	100	2023
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas kesehatan	100	2023
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi yang baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100	2023
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan Kesehatan balita sesuai standar	100	2023
5.	Pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan Dasar	Jumlah semua anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 mendapatkan skrining kesehatan	100	2023
6.	Pelayanan Kesehatan pada usia Produktif	Jumlah pengunjung usia 15-59 tahun mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	100	2023
7.	Pelayanan Kesehatan pada usia Lanjut	Jumlah pengunjung berusia 60 tahun ke atas yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun	100	2023
8.	Pelayanan Kesehatan penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam	80	2023



		kurun waktu satu tahun		
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita diabetes Melitus	Jumlah penyandang Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	80	2023
10.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Kejiwaan Berat	Jumlah Orang dengan Gangguan Jiwa berat (psikotik) di wilayah kerja kab/kota yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	100	2023
11.	Pelayanan Kesehatan Orang terduga tuberkulosis	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	100	2023
12	Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia(human immunodeficiency virus)	Jumlah orang beresiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar di fasyankes dalam kurun waktu satu tahun	100	2023

4.2.3 Realisasi

Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

No.	Indikator	Sasaran dalam Tahun	Target Dalam Tahun	Persentase
	2	3	4	6
1.	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan K4 di fasilitas Kesehatan milik Pemerintah dan swasta	2.334	1.987	81%
	a. Vaksin Tetanus Differi (Td)	2.334	1.985	81.55%
	b. Tablet tambah darah	2.334	1.985	81.55%
	c. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	2.334	1.985	81.55%
	d. Alat deteksi resiko Ibu Hamil :	2.334	1.985	81.55%



	Pemeriksaan HB			
	5 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	2.334	1.985	81.55%
	6 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin	2.334	1.985	81.55%
	7 . Kartu ibu/rekam medis ibu	2.334	1.985	81.55%
	8 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	2.334	1.985	81.55%
	9 . Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis kebidanan	30	30	100%
	10 . Tenaga kesehatan : Bidan	329	329	100%
	11 . Tenaga kesehatan : Perawat	315	315	100%
	12 . Kunjungan 4 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K4) (Satu kali pada trimester pertama, Satu kali pada trimester kedua, Dua kali pada trimester ketiga)	2.434	1.436	100%
2.	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas kesehatan	2.324	1.728	74,48 %
	a. Formulir Partograf	2.324	1.728	74.35%
	b. Kartu ibu (rekam medis)	2.324	1.728	74.35%
	c. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	2.324	1.728	74.35%
	d. Dokter/dokter spesialis Kebidanan dan Kandungan	30	30	100%
	e. Bidan	329	329	100%
	f. Perawat	315	315	100%
3.	Jumlah bayi yang baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	2.213	1.197	54 %
	a. Vaksin Hepatitis B0	2.213	1.197	54.09%
	b. Vitamin K1 injeksi	2.213	1.197	54.09%
	c. Salep/tetes mata antibiotik	2.213	1.197	54.09%
	d. Formulir bayi baru lahir	2.213	1.526	68.96%
	e. Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)	2.213	1.359	61.41%
	f. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	2.213	1.526	68.96%
	g. Dokter/dokter spesialis Anak	30	30	100%
	h. Bidan	329	329	100%
	i. Perawat	35	35	100%



4.	Jumlah balita 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan Kesehatan balita sesuai standar	10.487	5.427	52%
	a. Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	10.487	5.427	51.75%
	b. Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	10.487	4.662	44.46%
	c. Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	10.487	9.837	93.80%
	d. Vitamin A Biru	10.487	745	7.10%
	e. Vitamin A Merah	10.487	5.715	54.50%
	f. Vaksin imunisasi dasar: HBO	10.487	5.715	54.50%
	g. Vaksin imunisasi dasar: BCG	10.487	5.715	54.50%
	h. Vaksin imunisasi dasar: Polio	10.487	5.715	54.50%
	i. Vaksin imunisasi dasar: IPV	10.487	5.715	54.50%
	j. Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB -Hib	10.487	5.715	54.50%
	k. Vaksin imunisasi dasar: Campak	10.487	5.715	54.50%
	l. Vaksin imunisasi dasar: Rubella	10.487	5.715	54.50%
	n. Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib	10.487	5.715	54.50%
	o. Vaksin imunisasi lanjutan : Campak	10.487	5.715	54.50%
	p. 15 . Vaksin imunisasi lanjutan : Rubella	10.487	5.715	54.50%
	q. Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	010.487	5.715	54.50%
	r. Peralatan Anafilaktik	10.487	5.715	54.50%
	s. Tenaga kesehatan : Dokter	30	30	100%
	t. Tenaga kesehatan : Bidan	329	329	100%
	u. Tenaga kesehatan : Perawat	315	315	100%
	v. Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	26	26	100%
	w. Tenaga kesehatan : Kader Kesehatan	14	14	100%
	x. Tenaga Non kesehatan : Guru PAUD	14.684	14.684	100%
5.	Jumlah semua anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 mendapatkan skrining kesehatan	22.029	20.092	91%
	a. Buku raport kesehatanku	2.061	2.061	100%
	b. Buku pemantauan kesehatan	2.061	2.061	100%
	c. Kuesioner skrining kesehatan	2.061	2.061	100%
	d. Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di	2.061	2.061	100%



	dalam sekolah			
	e. Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	2.061	2.061	100%
	f. Dokter/Dokter gigi	30	30	100%
	g. Bidan	329	329	100%
	h. Perawat	315	315	100%
	i. Ahli gizi	26	26	100%
	j. Tenaga Kesehatan masyarakat	97	97	100%
	k. Tenaga kesehatan : Kader Kesehatan	40	40	100%
	l. Tenaga Non kesehatan : Guru	14.684	14.687	100%
6.	Jumlah pengunjung usia 15-59 tahun mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	88.255	49.255	56 %
	a. Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	88.255	49.355	55.83%
	b. Alat ukur berat badan, Alat ukur tinggi badan, Alat ukur lingkar perut, Tensimeter, Glukometer, Tes Strip Gula Darah, Lancet, Kapas Alkohol, KIT IVA Tes	88.255	49.355	55.83%
	c. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	88.255	49.355	55.83%
	d. Dokter	30	30	100%
	e. Bidan	329	329	100%
	f. Perawat	315	315	100%
	g. Ahli Gizi	26	26	100%
	h. Tenaga Kesehatan Masyarakat	97	97	100%
	i. Tenaga nonKesehatan masyarakat	6	6	100%
7.	Jumlah pengunjung berusia 60 tahun ke atas yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar miniman 1 kali dalam kurun waktu satu tahun	13.476	7.233	54% %
	a. Strip uji pemeriksaan gula darah, kolesterol	13.476	7.233	53.67%
	b. Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Intrumen Abbreviated Mental	13.476	7.233	53.67%



	Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)			
	c. Buku kesehatan lansia	13.476	7.233	53.67%
	d. Dokter	30	30	100%
	e. Bidan	329	329	100%
	f. Perawat	315	315	100%
	g. Ahli Gizi	26	26	100%
	h. Tenaga Kesehatan Masyarakat	97	97	100%
	i. Tenaga nonKesehatan	6	6	100%
8.	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	27.110	13.447	50%
	a. Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)I	158	158	100%
	b. Tensimeter	158	158	100%
	c. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	158	158	100%
	d. Dokter	30	30	100%
	e. Bidan	329	329	100%
	f. Perawat	315	315	100%
	g. Tenaga Kesehatan Masyarakat	97	97	100%
	h. Obat Hipertensi	27.110	14.588	53.81%
9.	Jumlah penyandang Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	1.923	1.908	71.49 %
	a. Glukometer, Strip Tes Gula Darah, Kapas Alkohol, Lancet	1.923	1.908	99.69%
	b. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	1.923	1.908	99.69%
	c. Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	1.923	1.908	99.69%
	d. Dokter	30	30	100%
	e. Bidan	329	329	100%



	f. Perawat	315	315	100%
	g. Ahli Gizi	26	26	100%
	h. Tenagakesehatan	97	97	100%
	i. Obat Diabetes Melitus	23.265	1.153	100%
10.	Jumlah Orang dengan Gangguan Jiwa berat (psikotik) di wilayah kerja kab/kota yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	250	248	99 %
	a. Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	250	248	99.20%
	b. Kit berisi 2 Alat Fiksasi	250	248	99.20%
	c. Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan	250	248	99.20%
	d. Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	250	248	99.20%
	e. Dokter	10	10	100%
	f. Tenaga kesehatan : Perawat Terlatih Jiwa	42	42	100%
	g. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Lainnya	14	14	100%
11.	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	2.030	813	40.05 %
	a. Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	2.030	813	40.05 %
	b. Reagen Zn TB	2.030	813	40.05 %
	c. Masker jenis rumah tangga dan Masker N95	2.030	813	40.05 %
	d. Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	2.030	813	40.05 %
	e. Catridge tes cepat molekuler	2.030	813	40.05 %
	f. Formulir pencatatan dan pelaporan	2.030	813	40.05 %
	g. Pedoman/Standar Operasional	2.030	813	40.05 %



	Prosedur (SOP)			
	h. Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru	2	2	100%
	i. Perawat	315	315	100%
	j. Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	2	2	100%
	k. Penata Rontgen	0	0	100%
	l. Tenaga kesehatan masyarakat	97	97	100%
	n. Tenaga non kesehatan terlatih	14	14	100%
12.	Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV yang ada di wilayah kerja dalam waktu satu tahun yang sama	3.211	2.756	86 %
	a. Media KIE (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner)	3.211	2.756	85.53%
	b. Tes cepat HIV (RDT) pertama	3.211	2.756	85.53%
	c. Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	3.211	2.756	85.53%
	d. Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK	3.211	2.756	85.53%
	e. Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	2	2	100%
	f. Perawat	315	315	100%
	g. Bidan	329	329	100%
	h. Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	42	42	100%
	i. Tenaga kesehatan masyarakat	97	97	100%
	j. Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu	14	14	100%

4.2.4 Alokasi Anggaran

1. APBD

Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan memperoleh Pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Belanja Langsung sebesar Rp128.124.332.310



b. Anggaran SPM

Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan memperoleh Pendanaan SPM sebesar Rp 1.029.342.800

4.2.5 Dukungan Personil

Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan di dukung oleh sumber daya manusia dengan latar belakang keilmuan yang berbeda-beda seperti: Ilmu Kesehatan Masyarakat, Ilmu Kedokteran, Ilmu Kefarmasian, Ilmu Keperawatan, Ilmu Kebidanan, Ilmu elektromedik, dan Umum. Namun dengan demikian dengan perbedaan tersebut lebih bersinergi dengan baik maka menghasilkan kekuatan personalia yang dapat mendukung tercapainya banggai kepulauan yang sehat. Dengan Komposisi jumlah PNS yang ada di Kantor Dinas Kesehatan dan Jaringannya (Puskesmas) berjumlah 483 orang. Non PNS berjumlah 548 PPPK 123 total tenaga kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan 1.154 orang.

4.2.6 Permasalahan dan Solusi

Dalam upaya pelaksanaan program dan kegiatan secara baik, berhasil dan maksimal dipersiapkan solusi-solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan yaitu

- Adanya komitmen yang tinggi dari Pemerintah Daerah untuk meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat
- Adanya program Indonesia sehat melalui pendekatan pendekatan Keluarga (PIS-PK)
- Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)
- Adanya Kebijakan Pengalokasian Anggaran bidang Kesehatan Minimal 10% dari Total APBD sesuai amanat undang-undang 36 tahun 2009
- Tersedianya sarana dan prasarana kesehatan walaupun belum memenuhi standar
- Tersedianya sumberdaya manusia kesehatan walaupun belum memenuhi standar
- Adanya desentralisasi bidang Kesehatan
- Adanya Dukungan Masyarakat dalam implementasi program Kesehatan
- Penambahan Sumberdaya Kesehatan sesuai dengan kompetensi dan spesifikasi Pendidikan
- Pendidikan dan Pelatihan teknis tenaga Kesehatan
- Efisiensi Penggunaan Dana

4.2.7 Program dan Kegiatan



A. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM Kesehatan :

1. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Hamil
 - Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin
 - Pengelolaan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir
 - Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita
 - Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
 - Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Produktif
 - Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut
 - Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi
 - Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus
 - Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat
 - Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
 - Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
 - Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
 - Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
 - Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana

4.3 Urusan Pekerjaan Umum

4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Jenis Pelayanan yang tertuang dalam standar pelayanan minimal adalah sebagai berikut :

1. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari hari
2. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik

4.3.2 Target Pencapaian

No.	Jenis Pelayanan	Indikator	Target	Batas waktu capaian
1.	Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	1. Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan	87.27%	2023



		perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/ hari a. Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari) b. Kualitas air (keruh, berwarna, berasa, berbusa, berbau) c. Jaringan perpipaan d. Jaringan bukan perpipaan		
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domesti	2. Tersedianya sistem saluran Sanitasi dan air limbah setempat yang memadai skala komunitas/ kawasan/kota (pembangunan MCK++ dan Tangki Septik Skala Komunal) a. Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik b. Kualitas pelayanan air limbah domestik c. Sub-Sistem pengolahan setempat d. Sub-sistem pengangkutan e. Sub-sistem pengolahan lumpur tinja (IPLT) f. Pengolahan lumpur tinja (IPAL)	83.12%	2023

4.3.3 Realisasi

No.	Jenis Pelayanan	SASARAN	REALISASI	PRESENTASI
1.	1. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	121.684	108.765	89.38 %
	a. Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	24.336	21.753	89.39%
	b. Kualitas air (keruh, berwarna, berasa, berbusa, berbau)	24.336	21.753	89.39%
	c. Jaringan perpipaan	1.251	1.251	100%
	d. Jaringan bukan perpipaan	1.251	1.251	100%
2.	1. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air	121.684	117.035	96 %



	Limbah Domesti			
	a. Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik	24.336	23.407	96.18%
	b. Kualitas pelayanan air limbah domestik	24.336	23.407	96.18%
	c. Sub-Sistem pengolahan setempat	24.336	5.367	22.05%
	d. Sub-sistem pengangkutan	850	750	88.24%
	e. Sub-sistem pengolahan lumpur tinja (IPLT)	0	0	0

4.3.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk mendukung penerapan percepatan SPM berkaitan dengan tugas pokoknya Pekerjaan Umum yang bersifat pelayanan urusan bidang Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari dan Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domesti adalah :

- APBD
- Pemenuhan kebutuhan pokok air minum Rp.10.892.401.930
- Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik Rp.203.725.500

4.3.5 Dukungan Personil

Pada aspek internal organisasi yang menyangkut kepegawaian, saat ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Banggai Kepulauan didukung 204 orang, terdiri 73 orang PNS dan 131 orang Tenaga Kontrak. Keadaan pegawai dilihat dari kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan serta jabatan struktural dan fungsional sebagaimana tabel - tabel berikut :

Tabel 4.3
Keadaan PNS Dan PTT Tahun 2023

No	Pendidikan	PNS Golongan				Tenaga Kontrak	Jumlah
		I	II	III	IV		
1.	S2	-	-	2	2	-	4
2.	S.1	-	-	39	1	38	77
3.	DIPLOMA	-	1	3	-	7	10
4.	SLTA	-	20	1	-	64	85
5.	SMP	-	2	-	-	4	2
Jumlah		-	22	45	2	109	178



Tabel 4.4
Keadaan PNS Menurut Pangkat / Golongan Tahun 2023

No	Pangkat / Gol	Jumlah
1.	Pembina, IV	2
2.	Penata Tk.I, III/d	7
3.	Penata, III/c	9
4.	Penata Muda Tk.I, III/b	12
5.	Penata Muda, III/a	16
6.	Pengatur Tk.I, II/d	11
7.	Pengatur, II/c	6
8.	Pengatur Muda Tk.I, II/b	5
9.	Pengatur Muda, II/a	-
Jumlah		69

4.3.6 Permasalahan dan Solusi

Dalam melaksanakan SPM yang merupakan bagian dari pelayanan dasar dalam urusan wajib, selain sosialisasi konsep penetapan dan petunjuk teknis pelaksanaannya yang dilakukan, juga diperlukan pemetaan kondisi awal SPM di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, khususnya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk menentukan penetapan target pencapaian sasaran SPM pada tahun berjalan dan tahun berikutnya hingga memenuhi standar capaian SPM secara nasional, penghitungan rencana pembiayaan untuk sasaran capaian tiap tahunnya, dan mengintegrasikan SPM tersebut ke dalam dokumen perencanaan.

Akses air minum dan sanitasi masih perlu peningkatan untuk mencapai target universal akses 100% dimana presentase air minum masih kurang 10,61% dan sanitasi 20,46%. Perlu pengalokasi anggaran melalui sumber dana DAU dan Dak

Langkah-langkah tersebut merupakan suatu prasyarat agar SPM dapat diterapkan secara utuh untuk kemudian dapat dianggarkan, dilaksanakan, dan dievaluasi pencapaiannya sebagai bahan kajian pelaksanaan pelayanan dasar pada tahun berikutnya.

4.3.7 Program dan Kegiatan

A. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM Pekerjaan Umum :

1. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyusutan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM
 - Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perkotaan
 - Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan



B. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM Pekerjaan Umum :

1. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Pembangunan/Penyediaan Sistem pengelolaan air limbah terpusat skala permukiman

4.4 Urusan Perumahan Rakyat

4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar

Indikator kinerja Standar Pelayanan Minimal bidang perumahan rakyat adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif di bidang perumahan rakyat yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang perumahan rakyat yang tercantum dalam Peraturan Menteri Menteri Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 29/PERMEN/M/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten/Kota mencakup 2 (dua) jenis pelayanan dasar, terdiri dari :

- Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota
- Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

4.4.2 Target Pencapaian

No	Jenis Pelayanan	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)
		Indikator	Target	
1	2	3	4	5
1.	Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	a. Tersedianya rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100%	2023
2.	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerinatah Daerah Kabupaten/ Kota	b. Tersedianya Fasilitasi Penyediaan Rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota	100%	2023



4.4.3 Realisasi

Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat tahun 2023 adalah sebagai berikut :

No	Indikator	Sasaran dalam Tahun	Target Dalam Tahun	Jumlah	Persentase
1	2	3	4	5	6
1.	RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA KABUPATEN/KOTA				
-	a. Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana		0	0	0
	b. Rehabilitasi rumah bagi korban bencana		0	0	0
	c. Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana.		100	0	0
	d. Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana.		0	0	0
2.	FASILITASI PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA				
-	a. Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	0	0	0	0
	b. Subsidi uang sewa	0	0	0	0
	c. Penyediaan rumah layak huni	0	0	0	0

4.4.4 Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran untuk tahun 2023 di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan dalam rangka pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat :

- Rp.190.000.000

4.4.5 Dukungan Personil

Pada aspek internal organisasi yang menyangkut kepegawaian, saat ini Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan didukung 64 orang, terdiri 26 orang PNS, 38 orang Tenaga Kontrak. Keadaan pegawai dilihat dari kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan serta jabatan struktural dan fungsional sebagaimana tabel - tabel berikut :

Tabel 4.5
Keadaan PNS Dan PTT Tahun 2023

	PNS Golongan	Tenaga	Jumlah
--	--------------	--------	--------



No.	Pendidikan	I	II	III	IV	Kontrak	
1.	S2	-	-	2	2	-	4
2.	S1	-	-	15	1	22	38
3.	Akdemi/D3	-	-	1	-	6	7
4.	SLTA	-	3	1	-	12	15
Jumlah		-	3	19	3	40	64

Tabel 4.6
Keadaan PNS Menurut Pangkat / Golongan Tahun 2023

No.	PANGKAT / GOL	JUMLAH
1.	Pembina Tk. I (Gol. IV/b)	1
2.	Pembina (Gol. IV/a)	2
3.	Penata Tkt. I (Gol. III/d)	9
4.	Penata (Gol. III/c)	4
5.	Penata Muda Tkt. I (Gol. III/b)	2
6.	Penata Muda (Gol. III/a)	3
7.	Pengatur (Gol. II/c)	2
8.	Pengatur Muda Tkt. I (Gol. II/b)	1
Jumlah		24

4.4.6 Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

- Kejadian bencana ditetapkan oleh Kepala Daerah. Pada tahun 2023 tidak terjadi bencana sehingga untuk capaian penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana tidak dapat disajikan
- Tidak mempunyai Baseline Data (informasi dasar yang dihimpun sebelum suatu program dimulai) penanganan rumah layak huni bagi korban Bencana sehingga belum bisa merencanakan target yang akan ditangani di tahun 2023
- Belum adanya Kebijakan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan untuk merelokasi rumah terdampak pembangunan Daerah sehingga baik perencanaan maupun realiasi belum ada

a. Solusi

Solusi dalam mengatasi masalah perumahan rakyat adalah menyesuaikan dengan program dan kegiatan yang ada pada SPM pada Dinas Perumahan, Kawasan permukiman dan pertanahan serta mengakomodir anggarannya, khususnya pada Bidang Perumahan agar pelaksanaan program dan kegiatan tersebut dapat terwujud.

4.4.7 Program dan Kegiatan



A. Program Pengembangan Perumahan

Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM Perumahan :

1. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten
 - Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota
2. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten
 - Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota

4.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

a. Satuan Polisi Pamong Praja

4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar

Indikator kinerja Standar pelayanan Minimal Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum adalah Tolak ukur Kuantitatif dan kualitatif Bidang ketentraman dan ketertiban umum yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian standar pelayanan minimal yang tercantuk dalam Peraturan Pemerintah nomor 2 Tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal. Standar Pelayanan Minimal Bidang urusan ketentraman, ketertiban umum mencakup 3 (tiga) jenis pelayanan Dasar.

1. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum
2. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

4.5.2 Target Pencapaian

No	Jenis Pelayanan	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)
		Indikator	Target	
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	- Pelayanan Ketentraman dan ketertiban	100%	2023
2.	Pelayanan informasi rawan bencana	Presentase Penduduk di daerah rawan bencana yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	2023
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiap-siagaan terhadap bencana	- Presentase penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiap-siagaan terhadap bencana	100 %	2023



4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	- Persentase penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 %	2023
5.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.	- Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.	100%	2023

4.5.3 Realisasi

Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tahun 2023

No	Indikator	Sasaran dalam Tahun	Target Dalam Tahun	Realisasi	Persentase
1	2	3	4	5	6
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum		120.142	120.142	100%
-	a. Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil		20	20	100%
	b. Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan		2	2	100%
	c. Standar operasional prosedur Satpol PP		160	160	100%
	d. Standar sarana prasarana Satpol PP		2	2	100%
	e. Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat		4	4	100%
	f. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada		4	4	100%
2.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.				100%
-	a. Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)		15	15	100%
	b. Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)		3	3	100%
	c. Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil		2	2	100%



	damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)				
	d. Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	7	7	100%	
	e. Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	2	2	100%	
	f. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	10	10	100%	

4.5.4 Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran untuk tahun 2023 di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banggai Kepulauan dalam rangka pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Bidang ketentraman, Ketertiban Umum :

- Ketentraman ketertiban Umum Rp.145.740.000
- Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran Rp.70.800.000

4.5.5 Dukungan Personil

Pada aspek internal organisasi yang menyangkut kepegawaian, saat ini Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Banggai Kepulauan didukung 218 orang. terdiri 58 orang PNS dan 160 Orang Tenaga Kontrak. Keadaan Pegawai dilihat dari kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan serta Jabatan Struktural dan Fungsional sebagaimana tabel – tabel berikut

Tabel 4.7
Keadaan PNS dan PTT tahun 2023

No.	Pendidikan	PNS Golongan				Tenaga Kontrak	Jumlah
		I	II	III	IV		
1.	S2	-	-	2	3		5
2.	S1	-	-	11	2	17	30
3.	Akademik/D3	-	-	1	-		1
4.	SLTA	-	38	-	-	141	179
Jumlah			38	14	6	158	214



Tabel 4.8
Keadaan PNS menurut Pangkat / Golongan tahun 2023

No.	PANGKAT / GOL.	JUMLAH
1.	Penbina Tkt. I (Gol. IV/b)	2
2.	Pembina (Gol. IV/a)	4
3.	Penata Tkt 1 (Gol. III/d)	7
4.	Penata (Gol. III/c)	6
5.	Penata Muda Tkt 1. (Gol. III/b)	
6.	Penata Muda (Gol. III/a)	2
7.	Pengatur (Gol. II/d)	1
8.	Pengatur Muda (Gol. II/a)	10
Jumlah		32

4.5.6 Permasalahan dan Solusi

Masalah yang dihadapi selama tahun 2023 antara lain :

1. Minimnya jumlah anggota yang memiliki SDM sehingga berdampak kurang maksimalnya pelaksanaan kegiatan operasional dan penertiban
2. Minimnya sarana dan prasarana yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten banggai Kepulauan
3. Kurangnya Koordinasi dan dukungan serta rencana terpadu penegakan perda dengan instansi terkait
4. Tidak tersedianya Sub program Kegiatan Pemenuhan Pelayanan dasar SPM dan Sub Program Kegiatan Penegakan Non yustisial dan terhadap pelaku pelanggaran perda sehingga berdampak pada penganggaran Pemenuhan SPM
5. Masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang perda dan saksi pelanggaran terhadap Perda pengaturan Perda/Perkada
6. Kurangnya pemahaman mengenai tugas dan fungsi, indikator kinerja dan fungsi perencanaan yang efektif dan efisien
7. Kurangnya komitmen dan koordinasi dalam penyusunan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan sebagai jadwal(action plan)

Solusi

1. Senantiasa melakukan penataan pembinaan anggota Polisi Pamong Praja
2. secara bertahap satuan Polisi Pamong Praja Memenuhi Kebutuhan sarana dan Prasarana yang diperlukan
3. Mengkoordinasikan Perencanaan Program kegiatan Pemenuhan Pelayanan SPM dan Mengkoordinasikan perencanaan Program kegiatan.
4. Melaksanakan edukasi dan sosialisasi secara berkala kepada masyarakat tentang pentingnya pencegahan kebakaran,serta penyebaran kontak person di masyarakat agar penanganan kebakaran cepat terdeteksi dan tertangani



5. Pemenuhan Anggaran SPM

4.6.7 Program dan Kegiatan

A. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum (Trantibum)

Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM TRANTIBUM :

1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten
 - Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan
2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
 - Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota

B. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran (DAMKAR)

Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM TRANTIBUM

1. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten
 - Pencegahan kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota
 - Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri

b. Urusan Bencana

4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal, dan pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara yang terkena dampak dikawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota; standar pelayanan dasar Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan adalah

1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana.
2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana.
3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.

4.5.2 Target Pencapaian



No	Jenis Pelayanan	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)
		Indikator	Target	
1.	Pelayanan informasi rawan bencana	- Presentase Penduduk di daerah rawan bencana yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	2023
2.	Pelayanan pencegahan dan kesiap-siagaan terhadap bencana	- Presentase penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiap-siagaan terhadap bencana	100 %	2023
3.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	- Persentase penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 %	2023

4.5.3 Realisasi

Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2023 adalah sebagai berikut :

No	Indikator	Sasaran Dalam Tahun	Target Dalam Tahun	Realisasi	Persentasi
1.	Pelayanan informasi rawan bencana				
	1. Jumlah Warga negara yang memperoleh informasi rawan bencana		120.142	120.142	100%
	a. Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana		1	0	0%
	b. Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana		120.142	1376	1.15%
	c. Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana		1	1	100%
	d. Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana		100	0	0%
2.	Pelayanan pencegahan dan kesiap-siagaan terhadap bencana				
	1. Jumlah warga negara yang memperoleh		120.142	120.142	100%



	layanan pencegahan dan kesip-siagaan terhadap bencana				
	a. Sarana prasarana penanggulangan bencana		68	68	100%
	b. Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM)		30	30	100%
3.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana				
	1. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		124.142	124.142	100%
	a. Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana		2	2	100%
	b. Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana		3	3	100%
	c. Melakukan respon cepat KLB dan respon cepat darurat bencana		2	2	100%
	d. Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit KLB/wabah zoonosis prioritas		2	2	100%
	e. Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana		3	3	100%

4.5.4 Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran untuk tahun 2023 di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dalam rangka pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Rp.2.344.800.000

4.5.5 Dukungan Personil

Pada aspek internal organisasi yang menyangkut kepegawaian, saat ini Badan penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Banggai Kepulauan didukung 17 orang. terdiri 17 orang PNS dan 54 Orang Tenaga Kontrak. Keadaan Pegawai dilihat dari kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan serta Jabatan Struktural dan Fungsional sebagaimana tabel – tabel berikut

Tabel 4.9
Keadaan PNS Dan PTT Tahun 2023



No.	Pendidikan	PNS Golongan				Tenaga Kontrak	Jumlah
		I	II	III	IV		
1.	S2	-	-	2	1		2
2.	S1	-	-	11	1	20	32
3.	Akademik/D3	-	-	-	-	3	3
4.	SLTA	-	2	-	-	31	33
Jumlah			2	13	2	54	71

Tabel 4.10
Keadaan PNS Menurut Pangkat / Golongan Tahun 2023

No.	PANGKAT / GOL.	JUMLAH
1.	Penbina Tkt. I (Gol. IV/b)	1
2.	Pembina (Gol. IV/a)	1
3.	Penata Tkt 1 (Gol. III/d)	8
4.	Penata (Gol. III/c)	2
5.	Penata Muda Tkt 1. (Gol. III/b)	2
6.	Penata Muda (Gol. III/a)	1
7.	Pengatur (Gol. II/c)	1
8.	Pengatur Muda Tkt 1. (Gol. II/b)	-
9.	Pengatur Muda (Gol. II/a)	-
10.	Juru (Gol.I/c)	1
Jumlah		17

4.5.6 Permasalahan Dan Solusi

Masalah yang dihadapi selama tahun 2023 antara lain :

1. Kurangnya Sarana dan Prasarana penunjang urusan Bencana .
2. Dalam melaksanakan SPM yang merupakan bagian dari pelayanan dasar dalam urusan wajib, selain sosialisasi konsep penetapan dan petunjuk teknis pelaksanaannya yang dilakukan, juga diperlukan pemetaan kondisi awal SPM di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, khususnya pada Dinas BPBD untuk menentukan penetapan target pencapaian sasaran SPM pada tahun berjalan dan tahun berikutnya hingga memenuhi standar capaian SPM secara nasional, penghitungan rencana pembiayaan untuk sasaran capaian tiap tahunnya, dan mengintegrasikan SPM tersebut ke dalam dokumen perencanaan.
3. Masih banyak pelatihan teknis penanggulangan dan pencegahan bencana yang diperlukan untuk meningkatkan wawasan aparatur BPBD Kabupaten Banggai Kepulauan maupun relawan

Solusi

Mengoptimalkan kualitas SDM yang ada dengan merencanakan untuk mengikutsertakan aparatur yang ada dalam pelatihan teknis sesuai kebutuhan pada Badan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan

4.5.7 Program dan Kegiatan

- A. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)



Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM Bencana :

1. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
 - Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana
 - Penanganan pasca bencana Kabupaten/Kota
 - Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana Kabupaten/Kota
2. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
 - Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota
 - Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota

4.6 Urusan Sosial

4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar

Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial memuat tentang ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar bidang sosial yang merupakan urusan wajib daerah. Peraturan Menteri ini sebagai acuan Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam menetapkan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah mengenai rencana pemenuhan Pelayanan Dasar pada SPM bidang sosial di daerah provinsi dan di daerah kabupaten/kota.

Peraturan Menteri Sosial Nomor : 9 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota tertanggal 8 Juni 2018. Dalam Peraturan menteri tersebut jenis Pelayanan Dasar pada SPM bidang sosial di daerah kabupaten/kota terdiri atas :

- a. Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di luar Panti Sosial;
- b. Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di luar Panti Sosial;
- c. Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di luar Panti Sosial;
- d. Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial; dan
- e. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota.

4.6.2 Target Pencapaian

No.	Jenis Pelayanan	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)
		Indikator	Target	
1	2	3	4	5



1.	Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di luar Panti Sosial	Persentase (%) Penyandang Disabilitas di luar Panti Sosial skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.	100 %	2023
2.	Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di luar Panti Sosial	Persentase (%) Anak Telantar di luar Panti Sosial skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.	100 %	2023
3.	Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di luar Panti Sosial	Persentase (%) Lanjut Usia Telantar di luar Panti Sosial skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.	100 %	2023
4.	Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial	Persentase (%) tuna sosial di luar Panti Sosial skala kab/kota yang menerima bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.	100%	2023
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota	Persentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100%	2023

4.6.3 Realisasi

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	Sasaran Dalam Tahun	Realisasi Dalam Tahun	Persentase
1	2	3	4	5
1.	1. Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di luar Panti Sosial	107	107	100 %
	a. Layanan data dan pengaduan	0	0	0%
	b. Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	0	0	0%
	c. Penyediaan permakanan	25	25	100%
	d. Penyediaan sandang	25	25	100%
	e. Penyediaan alat bantu	5	5	100%
	f. Penyediaan perbekalan kesehatan	0	0	0
	g. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	0	0	0%



	h. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas terlantar	40	40	100%
	j. Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	0	0	0%
	k. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar/ fasilitas layanan pendidikan dan kesehatan	12	12	100%
	l. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	0	0	0%
	1. Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di luar Panti Sosial	299	299	100%
	a. Layanan data dan pengaduan	0	0	0%
	b. Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat	0	0	0%
	b. Penyediaan permakanan	299	299	100%
	c. Penyediaan sandang	299	299	100%
	e. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	0	0	0%
	f. Penyediaan perbekalan kesehatan	0	0	0%
	g. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Anak Terlantar	0	0	0%
2.	h. Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	0	0	0%
	i. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitas layanan pendidikan dan kesehatan	0	0	0%
	j. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	0	0	0%
	1. Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di luar Panti Sosial	391	391	100%
	a. Layanan data dan pengaduan	0	0	0%
	b. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti	0	0	0%
	c. Penyediaan permakanan	100	100	100%
3.	d. Penyediaan sandang	100	100	100%



	e. Penyediaan alat bantu	0	0	0%
	f. Penyediaan perbekalan kesehatan	0	0	0%
	g. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	120	120	100%
	h. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia terlantar			
	i. Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	0	0	0%
	j. Akses ke layanan kesehatan dasar / fasilitasi layanan kesehatan	71	71	100%
	k. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	0	0	0%
	l. Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial	0	0	0%
	TIDAK ADA REHABILITASI			
	a. Layanan data dan pengaduan	0	0	0%
	b. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti	0	0	0%
	c. Penyediaan permakanan	0	0	0%
	d. Penyediaan sandang	0	0	0%
	e. Penyediaan alat bantu	0	0	0%
	f. Penyediaan perbekalan kesehatan	0	0	0%
4.	g. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	0	0	0%
	h. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas gelandangan dan pengemis terlantar	0	0	0%
	i. Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, Dan/Atau Kartu Identitas Anak	0	0	0%
	j. Akses ke layanan pendidikan	0	0	0%
	k. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	0	0	0%
	l. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	0	0	0%
	n. Layanan rujukan	0	0	0%
	o. Penyediaan layanan	0	0	0%



	ke daruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	0	0	0%
	p. Penyediaan layanan ke daruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	0	0	0%
5.	1. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota	150	150	99,98%
	a. Penyediaan permakanan			
	b. Penyediaan sandang	150	150	100%
	c. Penyediaan tempat penampungan pengungsi	0	0	0%
	d. Pelayanan dukungan Psikososial	0	0	0%

4.6.4 Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran untuk tahun 2023 di Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan dalam rangka pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Bidang sosial mendapat alokasi anggaran sebesar

a. APBD

- Anggaran Satker Rp.6.527.489.415
- Anggaran SPM Rp.932.879.500

4.6.5 Dukungan Personil

Pada aspek internal organisasi yang menyangkut kepegawaian, saat ini Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan didukung terdiri 1 orang kepala bidang,3 orang kepala seksi srt a relawan sosial 29 orang,13 orang tenaga kesehjahtraan sosial kecamatan, serta jabatan struktural dan fungsional sebagaimana tabel - tabel berikut :

Tabel 4.11
Keadaan PNS Dan PTT Tahun 2023

No.	Pendidikan	PNS Golongan				Tenaga Kontrak	Jumlah
		I	II	III	IV		



1.	S2	-	-	1	1	-	
2.	S1	-	-	9	3		15
3.	Akdemi/D3	-	-				2
4.	SLTA	-	5		-		7
Jumlah		-	5	10	4		24

Tabel 4.12
Keadaan PNS Menurut Pangkat / Golongan Tahun 2023

No.	PANGKAT / GOL	JUMLAH
1.	Pembina Tk. I (Gol. IV/b)	1
2.	Pembina (Gol. IV/a)	3
3.	Penata Tkt. I (Gol. III/d)	7
4.	Penata (Gol. III/c)	2
5.	Penata Muda Tkt. I (Gol. III/b)	1
6.	Penata Muda (Gol. III/a)	1
7.	Pengatur Tkt I	1
8.	Pengatur (Gol. II/c)	1
	Pengatur Muda Tkt. I (Gol. II/b)	2
Jumlah		19

4.6.6 Permasalahan Solusi

a. Permasalahan dan solusi

Dengan adanya Peraturan Menteri Sosial tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota maka Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dan Keputusan Menteri Sosial Nomor 80/HUK/2010 tentang Panduan Perencanaan Pembiayaan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Permasalahannya adalah mengenai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang termuat dalam Peraturan Lama tidak muncul di Peraturan Menteri Sosial tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota, padahal Jenis Pelayanan Dasar tersebut sangat penting dalam mendukung program pemerintah pada penanggulangan kemiskinan. Dengan adanya permasalahan di atas, solusi agar diketahui oleh Pemerintah Daerah berikut kami sebutkan perhitungan presentase,



alokasi anggaran dan dukungan personil mengenai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) khususnya untuk Kepala Keluarga (KK) Miskin.

4.6.7 Program dan Kegiatan

A. Program Peningkatan Sosial

Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM SOSIAL :

1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
 - Penyediaan permakanaan
 - Penyediaan sandang
 - Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat
 - Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar
2. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
 - Penyediaan makanan
3. Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Pmks Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA



BAB V

PENUTUP

Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai rangkaian pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di seluruh aspek kehidupan masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan selama kurun waktu tahun 2023 secara umum sudah dapat berjalan dengan lancar dan penuh harapan. Berdasarkan indicator kinerja kunci keluaran, indicator kinerja kunci hasil dan indicator kinerja kunci untuk fungsi penunjang urusan pemerintahan. Adapun kesimpulan dan saran dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2023 Kabupaten Banggai Kepulauan adalah sebagai berikut :

5.1. Kesimpulan

- a. Pelaksanaan indicator kinerja kunci keluaran, indicator kinerja kunci hasil dan indicator kinerja kunci untuk fungsi penunjang urusan pemerintahan di Kabupaten Banggai Kepulauan secara keseluruhan berjalan dengan baik, yang mana setiap Organisasi Perangkat Daerah penyelenggara urusan wajib urusan pilihan dan trantibum linmas mampu menyelenggarakan kegiatan dan prioritas di tiap-tiap Organisasi Perangkat Daerah dengan baik.
- b. Terselenggaranya Pemerintahan yang baik di Kabupaten Banggai Kepulauan dengan peningkatan sarana dan prasarana pemerintahan yang mampu mengakomodir semua kegiatan di tiap-tiap satuan kerja penyelenggara urusan wajib dan urusan pilihan.

5.2. Saran

- a. Pemerintah Pusat perlu melakukan fasilitasi, supervise dan monitoring dalam penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan di daerah sehingga menghasilkan kinerja yang maksimal di tiap Organisasi Perangkat Daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan pembangunan di Kabupaten Banggai Kepulauan.
- b. Peningkatan Sumber Daya Manusia di tiap Organisasi Perangkat Daerah lebih ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan sehingga mampu memberikan pelayanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal



dan mampu menjawab setiap permasalahan di tiap-tiap satuan kerja penyelenggara urusan wajib dan urusan pilihan.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini kami sampaikan dan kami menyadari masih adanya beberapa kekurangan dalam penyusunan laporan ini, untuk itu tanggapan, saran, maupun kritik yang sifatnya membangun sangat kami harapkan guna perbaikan dan penyempurnaan dalam penyusunan laporan ini dimasa yang akan datang.



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)